

381.18068
WID
f c1

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus : Kota Semarang)**

Ble jibid Blep wo yg/emas

asli
TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota**

Oleh :

**AHMADI WIDODO
L4B 098 053**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus : Kota Semarang)**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh
AHMADI WIDODO
L4B 098 053

Diajukan pada Ujian Sidang Tesis
Tanggal 22 Desember 2000

Dinyatakan lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 22 Desember 2000

Pembimbing Utama



Ir. Bambang Setioko, MEng
NIP 130 516 595

Pembimbing Pendamping



Ir. Djoko Suwandono, MSP
NIP 131 602 696

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA
NIP 130 786 142

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya, tesis berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Kota Semarang)” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan, serta masukan yang berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Bambang Setioko, MEng, selaku Dosen Pembimbing Utama;
2. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSP, selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
3. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku Dosen Pembahas;
4. Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP, selaku Dosen Penguji.

Kepada Bapak-bapak Dosen Pembimbing, ucapan terima kasih disampaikan penulis atas kesabaran dan kearifan yang diberikan dalam melaksanakan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Sedangkan kepada Dosen Pembahas dan Dosen Penguji, ucapan terima kasih disampaikan penulis atas masukan dan penilaiannya yang berharga sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada:

1. Bapak DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) Universitas Diponegoro; Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP dan Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP selaku Sekretaris Program MTPK; seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah di MTPK; dan seluruh Staf Sekretariat, atas perkenan dan kerja sama yang baik yang tercipta selama ini sehingga pelaksanaan studi menjadi lancar;
2. Bapak T. Soewito, selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi S-2;
3. Pimpinan dan staf Proyek Capacity Building for Urban Infrastructure Management (CBUIM) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi pendanaan kegiatan studi S-2;
4. Para pimpinan dan staf di jajaran UPD-PPKL khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Semarang pada umumnya; juga kepada bapak-bapak yang mewakili kelompok PKL di lokasi penelitian, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data untuk dijadikan bahan kajian;

5. Kepada ibu dan ayah tercinta yang senantiasa mendoakan, , demikian juga istri dan anak-anakku yang selalu memberikan dorongan dan semangat; agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar;
6. Semua suadaku angkatan-I CBUIM khususnya dan teman-teman di MTPK pada umumnya yang telah memberi dukungan baik moril maupun material hingga selesai pelaksanaan studi ini.

Akhirul kata, dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Namun setidaknya, karya ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pembaca dan pemerhati masalah pembangunan kota.

Amin yaa robbal 'alamin.

Semarang, 22 Desember 2000

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Perkotaan	1
1.1.2. Pentingnya Sektor Informal di Perkotaan.....	1
1.1.3. Fenomena Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan.	4
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Dan Sasaran Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah	9
1.5.2. Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.6. Kerangka Pikir Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II URBANISASI, PEDAGANG KAKI LIMA DAN LOKASI KEGIATAN PERDAGANGAN	14
2.1. Teori Migrasi dan Urbanisasi	14
2.2. Konsepsi Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja	17
2.3. Teori Lokasi Kegiatan Perdagangan dan Aglomerasi.....	18
2.3.1. Teori Bid-Rent.....	18
2.3.2. Toeri Pusat-Pusat Pelayanan	19
2.3.3. Teori Aglomerasi dan Aspek Kedekatan (<i>Proximity</i>) dalam Aktivitas Ekonomi	22

2.4. Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan	24
2.4.1. Sektor Informal Perkotaan	24
2.4.1.1. Pengertian Sektor Informal	24
2.4.1.2. Ciri-Ciri Sektor Informal	25
2.4.2. Pedagang Kaki Lima di Perkotaan	27
2.4.2.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	27
2.4.2.2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	29
2.5. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha	32
2.5.1. Kedekatan dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota.....	32
2.5.2. Kedekatan dengan Tempat Tinggal	34
2.5.3. Pengaruh Strategi Pemasaran dalam Pilihan Lokasi Usaha...35	
2.5.3.1. Jenis Barang (Produk) Dagangan	36
2.5.3.2. Bentuk (Struktur) Pasar Pedagang Kaki Lima	36
2.5.4. Pengaruh Latar Belakang Sosial Pedagang Kaki Lima	38
2.6. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha dari Aspek Konsumen.....	39
2.7. Rangkuman Kajian Pustaka	40
2.8.1. Ulasan Teori dan Konsep	40
2.8.2. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima	44
2.9. Hipotesis	45
2.10. Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Metode Dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Obyek Penelitian	48
3.3. Pengambilan Sample	48
3.4. Pengumpulan Data	51
3.5. Teknik Analisis	54
BAB IV DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN KOTA SEMARANG.....	61
4.1. Kondisi Demografi Kependudukan.....	61
4.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	61
4.1.2. Migrasi Masuk dan Keluar	62
4.1.3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Mata Pencarian.....	64

4.2. Sektor Informal di Kota Semarang	69
4.2.1. Peranan Sektor Informal dalam Ketenagakerjaan	69
4.2.2. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Kota	70
4.2.2.1. Kontribusi Sektor Informal Terhadap Pendapatan Regional	70
4.2.2.2. Kontribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah	71
4.2.3. Aspek Keruangan Sektor Informal	72
4.2.3.1. Sektor Pekerjaan “Lain-lain” di Wilayah Pinggiran dan Pusat Kota	72
4.2.3.2. Persebaran Lokasi Pedagang Kaki Lima	75
4.2.3.3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	78
4.3. Kebijakan Terhadap Pedagang Kaki Lima	83

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN LOKASI USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.....86

5.1. Identifikasi Karakteristik PKL	86
5.1.1. Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur	86
5.1.2. Daerah Asal PKL dan Latar Belakang PKL	88
5.1.3. Motivasi Responden Menjadi PKL	91
5.1.4. Jenis Usaha dan Modal	93
5.1.5. Sarana Transportasi Yang Digunakan PKL.....	96
5.2. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha PKL	97
5.2.1. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Keramaian..	97
5.2.2. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal.....	98
5.2.3. Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Lokasi.....	100
5.2.4. Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi	102
5.3. Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap PKL	104
5.3.1. Kebijakan Pengaturan Ruang PKL.....	104
5.3.2. Pembinaan Dan Penataan PKL.....	110
5.3.2.1. Persepsi Aparat Pemerintah Kota tentang Penataan dan Pembinaan PKL.....	111

5.3.2.2. Persepsi PKL Tentang Ijin Tempat Usaha dan Retribusi	117
5.3.2.3. Persepsi PKL Tentang Penataan Ulang Lokasi ...	120
5.4. Persepsi Konsumen Terhadap Keberadaan PKL.....	121
5.4.1. Karakteristik Konsumen	121
5.4.2. Pengaruh Keberadaan PKL Terhadap Lingkungan	122
5.4.3. Persepsi Konsumen Terhadap Penataan Ulang Lokasi	123
5.5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PKL Dalam Memilih Lokasi Usaha	124
5.5.1. Analisis Hubungan Antara Jenis Dagangan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi	127
5.5.2. Analisis Hubungan Antara Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha.....	131
5.5.3. Analisis Hubungan Antar Modal dengan Karakteristik Pilihan Lokasi	135
5.5.4. Analisis Hubungan Antara Umur dengan Karakteristik Pilihan Lokasi	138
5.5.5. Analisis Hubungan Antara Pendidikan dengan Karakteristi Pilihan Lokasi	141
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	148
6.1. Kesimpulan	148
6.2. Rekomendasi	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	
LAMPIRAN-1 : Hasil Perhitungan Komputer Uji Kuadrat Chi	156
LAMPIRAN-2 : Daftar Kuesioner dan Jawaban Responden	176

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. : Penduduk Kota Semarang Tahun 1994 s/d tahun 1998	2
Tabel II.1. : Perbandingan Karakteristik Sektor Formal dan Informal.....	25
Tabel III.1. : Identifikasi Kebutuhan Data Dan Informasi dari PKL	53
Tabel IV.1. : Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Semarang Th 1993 s/d 1993..	61
Tabel IV.2. : Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pergi Tahun 1993 s/d 1998.....	62
Tabel IV.3. : Komposisi Penduduk menurut kelompok umur di Kota Semarang Tahun 1993 dan 1998.....	64
Tabel IV.4. : Penggunaan Tanah di Kota Semarang	65
Tabel IV.5. : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Kota Semarang Tahun 1993	68
Tabel IV.6. : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Kota Semarang Tahun 1998	68
Tabel IV.7. : Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu di Kota Semarang ,Tahun 1998.....	69
Tabel IV.8. : Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Semarang Tahun 1998	69
Tabel IV.9. : Pendapatan Retribusi Sewa Lahan Untuk Pedagang Kaki Lima... ..	72
Tabel IV.10 : Persebaran Lokasi di Kota Semarang.....	75
Tabel V.1. : Proporsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	87
Tabel V.2. : Proporsi Responden Menurut Tingkat Usia.....	87
Tabel V.3. : Daerah Asal PKL.....	88
Tabel V.4. : Alasan PKL Meninggalkan Daerah Asal.....	89
Tabel V.5. : Alasan Memilih Kota Semarang sebagai tujuan.....	90
Tabel V.6. : Pekerjaan Semula Para PKL.....	90
Tabel V.7. : Alasan menjadi PKL.....	92
Tabel V.8. : Responden PKL Berdasarkan Jenis Usaha.....	94
Tabel V.9. : Besar Modal PKL.....	95
Tabel V.10. : Sarana Transportasi Yang Digunakan	96
Tabel V.11. : Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota	97
Tabel V.12 : Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal.....	99
Tabel V.13. : Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Lokasi	101
Tabel V.14. : Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi	104
Tabel V.15. : Kepemilikan Ijin Menempati Lokasi	117
Tabel V.16. : Karakteristik Konsumen PKL	121
Tabel V.17 : Variabel-Variabel Yang Digunakan Dalam Analisis	126
Tabel V.18. : Hubungan antara Jenis Dagangan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi	127
Tabel V.19. : Hubungan antara Sarana Transportasi Yang Digunakan Dengan Karakteristik Pilihan Lokasi	131
Tabel V.20. : Hubungan antara Modal dengan Karakteristik pilihan lokasi.....	135
Tabel V.21. : Hubungan antara Umur dengan Karakteristik pilihan lokasi	138
Tabel V.22. : Hubungan antara Pendidikan dengan Karakteristik pilihan lokasi..	141
Tabel V.23. : Rekapitulasi Hubungan Antar Variabel	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. : Kerangka Pikir Penelitian	12
Gambar 2.1. : Teori Dorong-Tarik dalam Migrasi	15
Gambar 2.2. : Pertalian Jarak Bid-Rent Dari Struktur Kota	19
Gambar 2.3. : Wilayah Pasaran Heksagonal model Christaller	21
Gambar 2.4. : Diagram Hubungan Antar Variabel.....	45
Gambar 3.1. : Diagram Pengambilan Sampel PKL	51
Gambar 3.2. : Persebaran Lokasi PKL di Kota Semarang.....	55
Gambar 3.3. : Lokasi Sampel PKL Jl. Kokroso dan Jl. Simongan / Bongsari	56
Gambar 3.4. : Lokasi Sampel PKL Jl. Citarum, Jl.Progo, Jl.Bugangan dan Jl. Dr.Cipto	57
Gambar 3.5. : Lokasi Sampel PKL Jl. Stadion dan Kawasan Simpang Lima...	58
Gambar 3.6. : Lokasi Sampel PKL Jl. Empu Tantular	59
Gambar 3.7. : Lokasi Sampel PKL Jl. Dr. Karyadi	60
Gambar 5.1. : Hubungan antar variabel.....	125

ABSTRAK

Timbulnya sektor informal di kota-kota merupakan fenomena yang umum terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kota sebagai satu pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, kiranya merupakan daya tarik penduduk untuk bermigrasi. Para migran yang umumnya berpendidikan rendah dan tidak punya ketrampilan kurang terserap di sektor formal sehingga mereka memilih pekerjaan di sektor informal. Sektor informal yang paling dominan di kota adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL ini senantiasa tumbuh subur memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau oleh publik. Kota Semarang sebagai obyek penelitian juga menghadapi permasalahan oleh sektor ini.

Beranjak dari hal tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sasaran diinginkan adalah mengidentifikasi karakteristik PKL menyangkut latar belakang sosial-ekonomi dan kecenderungan dalam memilih lokasi usaha; mengkaji kebijakan Pemerintah Kota dalam penataan dan pembinaan terhadap PKL serta ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PKL.

Populasi penelitian ini adalah para PKL dan masyarakat (konsumen) yang melakukan transaksi dengan PKL di wilayah Kota Semarang. Sedangkan untuk memperkaya pemahaman terhadap PKL, dilakukan wawancara mendalam dengan pejabat yang bertanggungjawab langsung pada masalah PKL. Disamping itu data-data sekunder dihimpun dari instansi terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai "explanatory" dengan pendekatan analisa kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis diskriptif dan analisis korelasi bivariat.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah di Kota Semarang terdapat dua tipe PKL yaitu berijin dan tidak berijin. Karakteristik PKL umumnya berpendidikan rendah, sedikit yang berpendidikan SLTA keatas dalam usia kerja produktif. Umumnya mereka sebagai pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang lebih dari 5 tahun. Faktor yang mempengaruhi mereka meninggalkan daerah asal adalah karena usaha pertanian di daerah asal tidak mencukupi kebutuhan, penghasilan kurang dan tidak ada pekerjaan, dengan modal awal yang relatif kecil mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Mereka termotivasi menjadi PKL karena bekerja di bidang ini telah memberikan hasil yang cukup, ada yang karena di PHK dari perusahaan dimana mereka bekerja, dan menjadi PKL bagi mereka adalah merupakan pekerjaan tetap. Modal yang digunakan untuk menjalankan usaha relatif kecil, sarana transportasi yang digunakan menuju lokasi usaha adalah dengan naik angkutan umum, jalan kaki dan sepeda motor. Kecenderungan PKL dalam memilih lokasi usahanya adalah dekat dengan tempat keramaian, dekat tempat tinggal, serta dimana lokasi banyak angkutan umum dan keinginan mengelompok dengan pedagang sejenis. Keberadaan PKL pada lokasi-lokasi tersebut menurut pandangan masyarakat (konsumen) disamping memberikan manfaat yaitu mudah mencari makan, mencari kebutuhan sehari-hari dan harganya murah, keberadaan PKL memberikan dampak spusial yang negatif seperti lingkungan yang kurang bersih dan kurang tertib serta mengganggu lalu lintas. Kebanyakan PKL setuju jika ada rencana penataan ulang lokasi, namun ada kecenderungan menolak untuk dipindah, bentuk penataan yang diinginkan adalah dirapikan dan ditertibkan dengan lokasi tetap dan mengarah kepada pengelompokan dengan dagangan sejenis. Peran Pemerintah Kota dalam upaya pembinaan dan penataan PKL melalui instrumen hukum telah membuktikan penanganan dan antisipasi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan telah dirumuskan bagaimana prosedur dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Kota maupun oleh para PKL. Ternuat juga beberapa kewenangan Pemerintah Kota dalam pembinaan dan penataan PKL dan sekaligus pengaturan tempat usaha PKL dengan berbagai kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan para PKL dimaksud.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor karakteristik PKL meliputi jenis dagangan, modal awal, sarana transportasi yang digunakan, umur dan pendidikan PKL terdapat hubungan yang signifikan dengan faktor pilihan lokasi usaha yang dekat dengan keramaian atau dekat dengan rumah tinggal. Sedang hubungan dengan kemudahan angkutan umum yang signifikan adalah sarana transportasi, dan hubungan dengan banyaknya penjual sejenis menunjukkan hubungan yang signifikan dengan modal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempegaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha adalah faktor jenis dagangan, sarana transportas, modal, pendidikan, umur, jarak dengan tempat keramaian serta jarak ke tempat tinggal.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan holistik untuk memperluas faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha serta rekomendasi dalam kaitannya dengan para pengambil keputusan yaitu stratifikasi PKL menyangkut jenis dagangan, umur, modal, jarak lokasi ke tempat keramaian dan tempat tinggal perlu dipertimbangkan dalam program pembinaan, penataan maupun relokasi PKL.

ABSTRACT

The emergence of informal sector in urban area is a general phenomenon in developing countries such as Indonesia. Urban as a central of government, education, industry, trade and services could attract people to migration and they stay for living. The imigrants who have a low education and unskilled, they couldn't involve in formal sector, so they choose to earn their living in informal sector. The dominant of informal sector in urban area is vendors (PKL). They grow rapidly and commonly select the location for their trade in strategic and accessible places like an area for urban people to circulation their activity. Semarang city as place for the research face the some problems either in in formal sector.

The aim of the research is to know the factors that could influence the vendors in selection the location for their trade. The target of the research is to identify the characteristics of vendors, among others their background, social-economy and their tendency to select their location for trading; to examine the urban public policy in management guidance towards vendor as well as to know the consumer point of view to vendors.

The object of the research is vendors and consummates who make some transactions between them. To enhance the understanding of vendors, interview some officials who have directed responsible to vendors was also done. Besides that the secondary data was collected from related institution. The research used the explanatory survey methods through qualitative analysis approach, which was supported by qualitative analysis. The quantative analysis used descriptive and correlation bivarian analysis.

The research founds in Semarang City there are two types of vendors, namely permitted and unpermitted. Generally, the characteristics of vendors are low education, only a few that graduated from high school and college. There are some factors influence vendors to leave behind their village, the first, agricultural in their village could not full fill their basic need, the second, small income and no more job could be done, the third become a vendor needs only a little capital but they could earn their living. They are motivated to be vendors because of working in this field could get more income; and they quit from their job and they choose to be a vendor as a permanent job. They need only small amount of money to run their bussines, they used public transportation, on foot or ride motorcycle to the location of their job. They tend to choose the location for their trade close to crowds (CBD), their home, or the location, which passed by public transportation, and they like to make cluster with the some type of trading. The existence at those locations could be either positive or negative. According to communities' view vendors could give some beneficial such as the consummates could find the food easily and they could buy their daily needs with cheaper price, but to the spatial could give the negative impact namely vendors disturb the environment and traffic. Most of vendors agree if government intend to rearrangement the location of their trade, but they refuse to relocate to other place. They wish the location of their trade to put in order and make clustering the same type of trade. The role of government city in guidance the vendors used the low instrument as a anticipate was proved. It can be seen from some regulations have been formulated how the procedures and the duties have been done by government and vendors. Substantially, the regulations have been accommodated within city government's authority in guidance and ordering the vendors also to put in order the vendors's trading place with some duties and authorities that should be performed by vendors.

The analysis' results show that characteristic factor of vendors cover type of trade goods, the first capital, transportation infrastructure used, the age and education of vendors those of them have significant correlation with the factor of choosing the location for trade close to the crowds or their home. While the correlation with public transport facility its significant with the transport superstructure; and the correlation with the number of the same type of trade show the correlation significant with the capital. From the analysis could be concluded that factors which could be influenced the vendors in choosing the location for their trade are type of good, transportation superstructure, capital education and age, distance to the crowds and to their home.

Based on the research' s conclusion, the recommendations is it should be followed by other research with more comprehensive and holistic in order to enlarged the factors which influence the vendors in choosing the location, and also recommendation for the decision makers namely the stratification of vendors involve the type of trade, age, capital, distance location to the crowds and home have to be considered in guidance program, arrangement and relocation of vendors.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Perkotaan

Salah satu permasalahan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung atau Yogyakarta adalah tingginya urbanisasi. Tingginya urbanisasi ini dapat diindikasikan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota. Kalau dilihat dari data hasil SPI (Sensus Penduduk Indonesia) bahwa laju pertumbuhan penduduk kota di Indonesia cukup berarti. Dalam sensus tahun 1961 tercatat dari 97 juta penduduk Indonesia, 14 juta tinggal di kota (15 %). Angka ini meningkat dalam sensus tahun 1971 dimana dari 119 juta penduduk Indonesia, 33 juta tinggal di kota (22 %). Dalam sensus terakhir tahun 1990, penduduk Indonesia mencapai 180 juta, dimana 56 juta (31 %) diantaranya tinggal di kota-kota. Bahkan ada yang memprediksi melalui analisis proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 220 juta jiwa, sebanyak 85 juta tinggal dikota-kota (40 %) atau hampir separuhnya. Demikian halnya kalau dilihat pada Kota Semarang. sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pada periode 5 tahun terakhir. Penduduk Kota Semarang pada tahun 1994 sebesar 1.206.363 jiwa, sedangkan tahun 1998 meningkat menjadi sebesar 1.273.552 jiwa, selanjutnya sebagaimana tercantum dalam tabel . I.1.

TABEL I.1
PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 1994 S/D TAHUN 1998.

Keterangan	1994	1995	1996	1997	1998
Jumlah Penduduk	1.206.363	1.229.667	1.252.930	1.261.904	1.273.552
Penduduk Lahir	16.285	16.636	14.675	12.675	13.844
Penduduk Mati	6.432	6.723	6.545	6.343	6.556
Penduduk Datang	40.826	38.751	36.062	26.713	33.903
Penduduk Pergi	33.026	33.337	31.520	23.838	28.125

Sumber: Kantor Statistik Kota Semarang, 1998

Pada tabel I.1 tersebut terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Semarang selain dari penambahan alami (lahir-mati) juga akibat adanya penambahan migrasi (datang-pergi).

Dengan melihat pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota, hal ini mempunyai implikasi terhadap penambahan jumlah angkatan kerja sebagai awal terjadinya proses urbanisasi. Rachbini dan Hamid (1994:114) berpendapat proses urbanisasi terjadi akibat lahan di pedesaan yang semakin menyempit dan upah yang diterima oleh petani tidak memadai/mencukupi kebutuhan sehari-hari serta akibat adanya konsentrasi lahan pertanian yang dikuasai oleh golongan elit di desa. Kondisi ini telah mendorong penduduk desa untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga, Todaro (1994:278) dalam teorinya yang menyangkut "*Labor Migration*" mengatakan, bahwa dorongan utama migrasi desa-kota adalah keinginan kaum urbanit untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dari upah yang mereka terima di tempat asal.

Faktor lain yang menyangkut permasalahan di kota adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja di perkotaan, yang bila tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diikuti dengan bertambahnya peluang lapangan pekerjaan. Kondisi saat ini, peluang lapangan pekerjaan

sangat terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan di sektor formal memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh para migran dari desa. Oleh karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya ketrampilan dari sebagian besar kaum migran, akibatnya banyak yang mengambil pelarian ke sektor informal, sehingga sektor informal di perkotaan tumbuh sangat pesat (Mantra, 1986; 5) dan merupakan salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi kaum urbanit.

1.1.2. Pentingnya Sektor Informal di Perkotaan

Menyangkut pentingnya sektor informal perkotaan, penelitian Baswir (1997:44) pada tahun 1982 menunjukkan bahwa jumlah pekerja Indonesia pada waktu itu sebanyak 57,8 juta jiwa, yang bekerja di sektor informal sebanyak 14,93 jiwa (25,84%); yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 28,95 juta jiwa (50,09 %); dan yang berkerja di sektor formal sebanyak 13,91 juta jiwa (24,07 %). Dari 14,03 juta jiwa pekerja sektor informal, 10,93 juta jiwa (73,18%) di antaranya berada di daerah pedesaan. Sedangkan sektor pertanian dan sektor formal masing-masing menyerap sekitar 60,08 % dan 16,72 %. Sekitar 4,63 juta jiwa (42,26 %) dari pekerja sektor informal di pedesaan ini, bekerja di sektor perdagangan. Selebihnya bekerja di sektor industri (25,51 %), jasa (13,77 %) dan lain-lain (2,60 %).

Adapun untuk daerah perkotaan, jumlah pekerja sektor informal berjumlah 4,01 juta jiwa atau sekitar 26,83 % dari seluruh pekerja sektor informal. Dibandingkan dengan sektor-sektor lain, sektor informal menyerap sekitar 37,42 % dari seluruh pekerja di daerah perkotaan. Sedangkan sektor pertanian 6,16 % dan sektor formal 56,46 %. Sebagaimana halnya di daerah pedesaan, sebagian pekerja sektor informal di kota bekerja di sektor perdagangan (pedagang kaki lima). Jumlah pekerja di sektor perdagangan tercatat

sebanyak 50,42 % dan pada sektor-sektor lain, masing-masing adalah jasa 20,12 %, bangunan 9,5 %, industri 8,04 % dan lain-lain 0,43 %.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan betapa peranan sektor informal baik di pedesaan maupun di perkotaan dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tergolong cukup besar. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila sektor informal ini perlu lebih mendapatkan perhatian, dan bukan sebaliknya yaitu digusur atau di”*marginal*”kan

Mengingat pentingnya sektor informal perkotaan khususnya bagi usaha pedagang kaki lima, baik dalam menyediakan lapangan pekerjaan ataupun usaha mengatasi pengangguran di perkotaan, maka sudah sewajarnya bila diusahakan untuk mengembangkan sektor ini dengan melakukan pembinaan dan penataan untuk meningkatkan produktivitasnya.

1.1.3. Fenomena Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Fenomena sektor informal tampaknya sudah menjadi salah satu “*trade mark*” di negara dunia ketiga. Di negara maju sektor informal mungkin bersifat sementara. Namun di negara dunia ketiga seperti di Indonesia, mungkin lebih bersifat agak permanen. Kecenderungan ini karena terkait erat dengan situasi dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Menurut Wirahadikusumah (1991:32), di negara dunia ketiga, dalam masyarakat pasca kolonial (*post colonial societies*) dan kapitalisme pinggiran (*peripheral capitalism*), termasuk Indonesia, sektor informal atau PCP (*petty commodity production*) bukan merupakan suatu fenomena yang bersifat sementara (*temporary symptom*), namun sudah

menjadi hukum (*rule*) yang berlaku, perkembangan sektor informal sudah merupakan ciri yang dominan didalam keadaan ekonomi masyarakat lapisan bawah di dunia ketiga.

Sektor informal akan terus berkembang searah dengan perkembangan industri kapitalis, penambahan penduduk dan jumlah tenaga kerja murah yang telah keluar dari sektor pertanian ke sektor industri, namun sebagian mereka gagal atau tercampak dari sektor formal. Kota Semarang sebagai salah satu pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan, dan sektor jasa, kiranya merupakan suatu daerah yang memiliki *pull factor* yang cukup besar, sehingga telah menimbulkan fenomena urbanisasi atau dianggap daerah yang dapat memberikan sumber pendapatan, tetapi para urbanis terbetur oleh berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya karena kota telah membentuk bidang-bidang kerja khusus yang membutuhkan spesialisasi atau keahlian (Kostof, 1991:40) . Kenyataan ini yang cenderung melahirkan informalitas bagi para urbanis yang tidak lolos di jalur formal tersebut. Tarik-menarik kepentingan antara formal dan informal inilah yang melahirkan kesulitan dalam membentuk kota yang tertib. Sektor informal sering dianggap melanggar aturan oleh Pemerintah Kota karena dianggap ilegal, sementara Pemerintah Kota menginginkan kota segalanya berbentuk formal, serba tercatat atau *administrative minded*, seperti yang dikemukakan oleh Kostof (1991:40) yang mengatakan: *cities are places that must rely on written record*".

Salah satu sektor informal di perkotaan yang paling menonjol dan relatif khas adalah yang bergelut di sektor perdagangan, dan ciri yang umumnya terlihat di negara berkembang seperti Indonesia menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 228-230) adalah usaha Pedagang Kaki Lima atau lebih dikenal dengan sebutan **PKL**. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Usaha PKL tidak membutuhkan pendidikan

yang tinggi, cukup memiliki sedikit ketrampilan dan sedikit modal, asal ada kemauan yang membuat mereka mampu bertahan hidup dikota.

PKL sebagai salah satu bentuk kegiatan sektor informal diartikan sebagai pedagang yang melakukan usaha yaitu berjualan pada kaki lima atau trotoar yang dulu berukuran lebar \pm 5 feet atau lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi didaerah keramaian umum, seperti trotoar di depan pertokoan, pasar, sekolah, dan lain-lain (Fak. Hukum Unpar, 1980: 1).

Diperkirakan jumlah PKL terutama di kota-kota besar akan terus bertambah oleh karena sektor ini tidak menuntut ketrampilan tertentu, modal usaha yang relatif kecil serta variasi yang cukup luas. PKL memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah dan lebih dari itu sektor ini mampu memberikan lapangan pekerjaan, menunjang ekonomi penduduk dan pemerataan kesejahteraan (Rahardjo, 1980). Di Kota Semarang , hampir disetiap bagian kota dijumpai adanya Padagang Kaki Lima, dimana hasil pendataan terakhir pada tahun 1998 oleh UPD-PKL Kota Semarang , jumlah PKL adalah 7.091 PKL (lihat tabel IV-10). Diperkirakan jumlah PKL pada saat ini mencapai lebih dari 10.000 PKL. Maraknya PKL ini kiranya perlu didukung oleh pembinaan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Keberadaan PKL ini, bila diamati dari kaca mata penguasa, cenderung menimbulkan dilema bagi pemerintah kota karena disatu sisi sektor ini banyak menampung tenaga kerja sehingga bisa dijadikan katup pengaman dalam suasana lapangan kerja yang terbatas, bahkan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan asli daerah (PAD), sebagai misal pemasukan dari retribusi PKL di Kota Semarang pada tahun 1998/1999 adalah sebesar Rp. 320.115.000,-. Tetapi bila ditinjau

dari segi planologi, kehadiran PKL di perkotaan sering menimbulkan masalah, karena kebanyakan mereka memanfaatkan ruang publik yang pada perencanaan awalnya tidak diperuntukkan untuk usaha PKL, misalnya di trotoar yang berfungsi untuk pejalan kaki, serta tempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan seperti bahu jalan, jembatan penyeberangan, taman dan lain-lain. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri di perkotaan, seperti terganggunya pejalan kaki, bahkan pada daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya kebersihan dan keindahan kota.

Pemerintah Kota bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan menghindarkan seminimal mungkin timbulnya segi-segi negatif melalui suatu kebijakan, yaitu menempati pada trotoar dan penggalan-penggalan jalan yang telah ditentukan dengan luas areal dan waktu usaha yang telah ditentukan. Di Kota Semarang pengaturan tempat usaha PKL yang menempati lahan-lahan kosong, penggalan-penggalan jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya diatur dengan SK. Walikota.

Atas dasar latar belakang itulah kiranya penelitian perihal PKL perlu dilakukan guna mencari alternatif dalam mengatasi masalah sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan serta untuk menambah wawasan dalam manajemen pembangunan kota.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha ?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pokok permasalahan yang diangkat, yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Mengetahui karakteristik PKL
- 2). Mengetahui karakteristik lokasi usaha PKL.
- 3). Mengkaji kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan dan penangan PKL.
- 4). Mengetahui tanggapan konsumen (pembeli) terhadap keberadaan dan penataan lokasi PKL.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat agar :

- 1). Dapat memberikan masukan yang berguna dalam rangka mengatasi masalah sektor informal di perkotaan.
- 2). Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pengembangan PKL khususnya dan penataan ruang kota pada umumnya.
- 3). Bagi para perencana, pengelola dan penentu kebijakan pembangunan kota, menjadi bahan pertimbangan untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada pada PKL.
- 4). Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang manajemen perkotaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menurut lingkup wilayah penelitian dan lingkup pembahasan, sebagai berikut :

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini mengambil wilayah Kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa di Kota Semarang keberadaan PKL akhir-akhir ini kecenderungannya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Disamping itu dibanding dengan kota-kota lain, dalam kaitannya dengan PKL, Kota Semarang mempunyai kelebihan yaitu :

- Kota Semarang secara spesifik telah mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur tempat usaha dan pembinaan PKL , yaitu Perda No. 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL dan SK Walikotamadya tanggal 5 Agustus 1999 Nomor. 511.3/367/1999 tentang Penetapan Lokasi PKL (PKL) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Adanya institusi khusus yang menangani masalah PKL, yaitu Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lim (UPD-PPKL) yang dibentuk dengan SK Walikotamadya tanggal 18 Maret 1991 Nomor 511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima

1.5.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup materi yang dibahas dalam penelitian terdiri dari tiga aspek yaitu :

- 1). Penelitian terhadap PKL dibatasi hanya pada PKL yang berusaha atau berjualan dipinggir-pinggir jalan atau trotoar dan tidak termasuk mereka yang berjualan keliling Sedangkan materi yang akan dibahas adalah antara lain menyangkut karakteristik PKL, peranan PKL dan kecenderungan PKL dalam menentukan lokasi usahanya
- 2). Penelitian terhadap konsumen yang melakukan transaksi dengan PKL diatas menyangkut persepsinya terhadap keberadaan lokasi usaha PKL.
- 3). Kajian terhadap kebijakan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan penataan PKL.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini secara garis besar dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

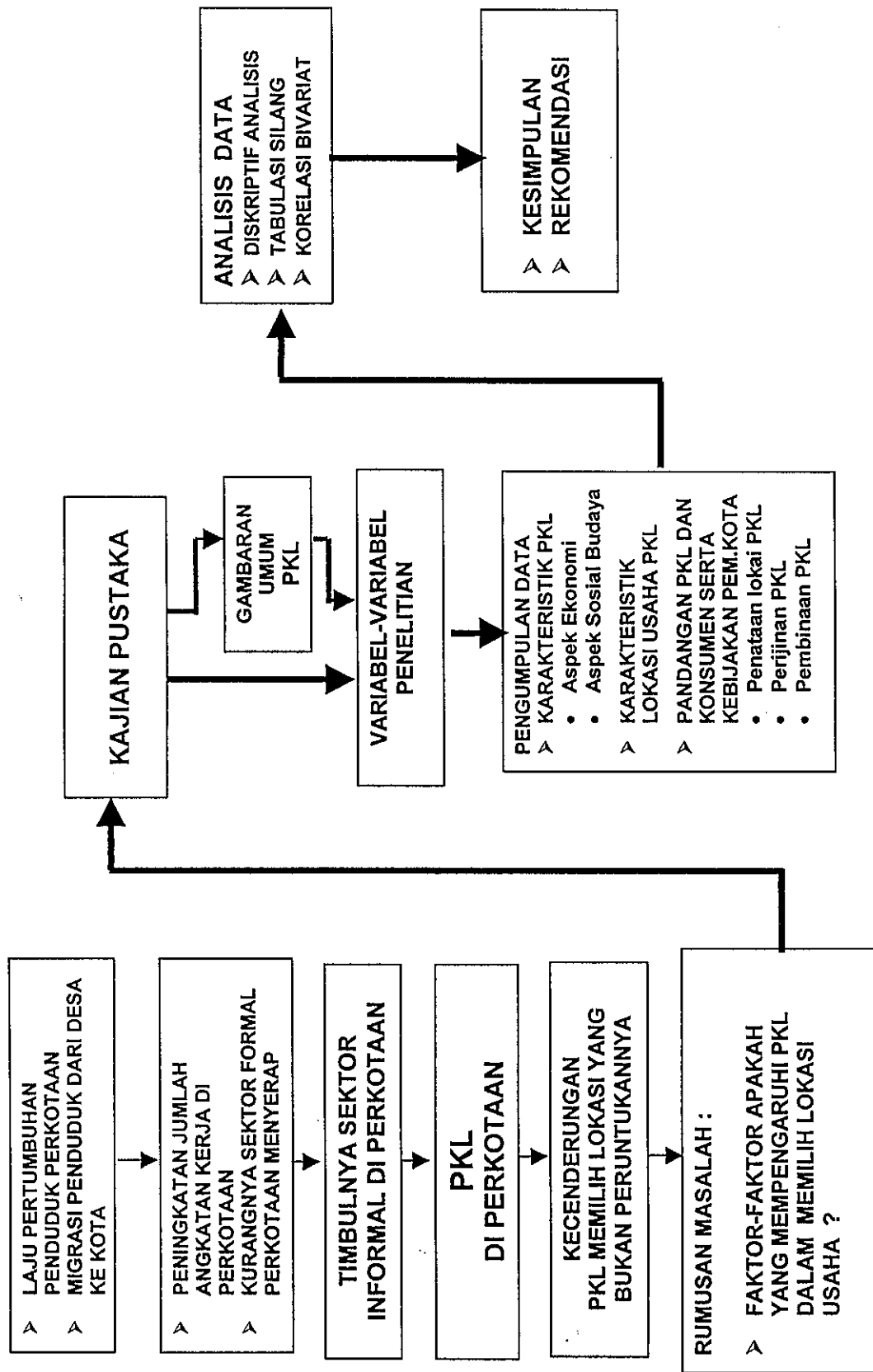
- Tumbuhnya sektor informal di perkotaan merupakan fenomena yang umum terlihat terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Sektor ini tumbuh cepat akibat kegagalan sektor formal dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat. Permintaan tenaga kerja meningkat dipacu dengan adanya perkembangan kota (urbanisasi) dalam konteks yang lebih luas. Adanya perbedaan kondisi daerah secara alamiah antara desa dan kota menjadikan aliran perpindahan penduduk usia angkatan kerja bergerak dari desa bermigrasi ke kota. Para migran yang pada umumnya mempunyai latar belakang sosial-ekonomi-budaya yang berbeda-beda berbondong-bondong ke kota untuk mengadu nasib dan berkompetisi dalam mengisi peluang lapangan pekerjaan yang terjadi di kota. Lapangan pekerjaan sektor formal di kota yang pada umumnya memerlukan pendidikan /ketrampilan yang cukup dan padat modal, maka para migran kurang terserap dalam sektor formal. Bagi mereka yang tidak dapat terserap sebagian ada yang kembali ke desa asalnya, dan ada yang memilih pekerjaan di sektor informal perkotaan yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha perdagangan atau sering disebut pedagang kaki lima (PKL).
- Permasalahan adanya PKL di perkotaan adalah adanya kecenderungan bagi PKL dalam memilih lokasi usahanya untuk beraktivitas memilih atau memanfaatkan lahan-lahan yang potensial untuk sirkulasi penduduk kota seperti diatas trotoar, bahu jalan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bisa dimengerti karena kurangnya disiplin baik dalam pengawasan oleh aparat maupun kurang disiplinnya bagi PKL yang menempati lahan tidak dalam peruntukannya. Dalam produk Rencana Tata Ruang Kota pada umumnya

kurang secara spesifik mengakomodasi sektor informal tersebut dalam produk perencanaannya

- Dari kondisi permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana karakteristik PKL, faktor-faktor apa yang mempengaruhi didalam memilih lokasi usaha, kebijakan pemerintah kota Semarang yang menyangkut penataan dan pembinaan PKL, serta bagaimana tanggapan masyarakat (konsumen) terhadap keberadaan PKL.
- Kajian Pustaka dilakukan sebagai landasan teoritik penelitian didalam menemukan variabel-variabel yang menyangkut karakteristik PKL, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau kriteria-kriteria dalam menentukan lokasi usaha dari aspek PKL dan menyangkut tanggapan konsumen. Hasil dari kajian pustaka berupa jawaban sementara dari permasalahan yang diangkat, yang kemudian digunakan sebagai pedoman kerja penelitian.
- Proses Analisis dilakukan terhadap data penelitian yang terkumpul, baik dari survai lapangan (data primer) ataupun data produk instansional (data sekunder), kemudian diolah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
- Hasil akhir penelitian berupa kesimpulan, dan rekomendasi sebagai masukan dalam menyusun strategi manajemen penataan PKL dalam rangka pembangunan kota.

Untuk melihat kerangka pemikiran yang lebih sistematis dapat dilihat pada diagram alur pikir pada gambar I.1 sebagai berikut :

GAMBAR I.1.
KERANGKA PIKIR PENELITIAN



1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam kajian penelitian ini dibagi beberapa bab, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi paparan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, lingkup penelitian , metode penelitian dan sistematika penulisan .

Bab Kedua, merupakan bab kajian pustaka yang bersisi kajian-kajian teori yang akan dipakai sebagai dasar didalam menguraikan dan menganalisa problematik penelitian yang diperkirakan akan dapat mendukung tujuan dan pelaksanaan penelitian.

Bab Ketiga, merupakan bab metode penelitian yang berisi uraian mengenai metode dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan .

Bab Keempat, pada bab ini berisi uraian diskripsi wilayah penelitian menyangkut keadaan kependudukan, ketenagakerjaan, peranan sektor informal dan persebarannya dalam ruang kota.

Bab Kelima, merupakan pembahasan hasil penelitian lapangan yang didasarkan atas beberapa kajian teori dan pada kerangka pikir penelitian.

Bab Keenam, merupakan kesimpulan, rekomendasi dan implikasi kebijakan yang merupakan jawaban terhadap pokok pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II URBANISASI, PEDAGANG KAKI LIMA DAN LOKASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Untuk mengawali kajian pustaka dalam penelitian ini maka dibahas terlebih dahulu teori-teori atau konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendasari sebagai landasan teori untuk mencapai tujuan penelitian.

2.1. Teori Migrasi dan Urbanisasi

Menurut Bintarto (1986:56), urbanisasi sebagai suatu proses dapat diamati pada adanya :

- Penggelembungan atau pembekakan kota-kota,
- Perpindahan penduduk desa ke kota,
- Perubahan suasana desa (*rural sphere*) menjadi suasana kota (*urban sphere*)

Urbanisasi ditinjau dari perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota, Bintarto (1986:33) menyatakan bahwa hal itu karena adanya daya dorong (*push factor*) dari desa seperti rendahnya tingkat penghasilan, adanya pengangguran baik yang nyata maupun yang tersembunyi atau tidak adanya pemilikan tanah. Selain itu juga adanya daya tarik (*pull factor*) kota, seperti kesempatan kerja dengan upah yang menarik, kesempatan sekolah, berwiraswasta atau penawaran jasa lainnya.

Everret Lee pada tahun 1966 (dalam Mantra,1985) membuat teori dorong-tarik (*push-pull theory*) yang mengemukakan bahwa setiap migrasi mempunyai daerah asal, daerah tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi meliputi

- 1). Migrasi dirangsang terutama oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang rasional mengenai manfaat dan biaya-biaya relatif, yang sebagian besar dalam bentuk uang tetapi juga dalam ukuran psikologis.
- 2). Keputusan untuk migrasi tergantung pada perbedaan upah riil “yang diharapkan” antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang sebenarnya, dimana perbedaan yang diharapkan ditentukan oleh dua variable yaitu perbedaan antara upah kota dan desa yang sebenarnya, dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan.
- 3). Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.
- 4). Tingkat migrasi di atas tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan bukan hanya mungkin tetapi juga rasional dan bahkan mungkin terjadi apabila ada kesenjangan “pendapatan yang diharapkan” yang sangat besar.

Asumsi yang dikemukakan Todaro tersebut menjadi kenyataan, dengan banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan di kota. Mereka menganggap pekerjaan di kota akan dapat memberikan upah yang lebih besar dari upah mereka di desa asal.

Dalam hubungannya dengan kerangka ekonomi sebagian besar negara Dunia Ketiga, diakui sendiri oleh Todaro (1994:277) bahwa asumsi teori model Todaro diatas tidak realistis, alasannya adalah bahwa negara-negara di Dunia Ketiga tersebut sedang menghadapi masalah pengangguran yang serius dan kronis yang akibatnya seorang migran tidak segera mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bekerja di sektor informal.

Pengalaman di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pada umumnya PKL terdiri dari migran (Manning dan Effendi, 1996 : 184). Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat pada PKL dalam penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1995:21) pada empat kota di Indonesia (Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya), dimana sebanyak

80,3 persen responden dari PKL tersebut merupakan migran ke kota, dengan tingkat pendidikan rendah yaitu 53,0 % tamat dan tidak tamat SD , 10 % tidak pernah sekolah, para migran tersebut pada kelompok usia produktif antara 24 sampai 34 tahun.

2.2. Konsepsi Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Perkotaan

Penawaran tenaga kerja di kota tergantung pada besar, komposisi umur, serta tingkat partisipasi penduduk kota. Besar penduduk kota tergantung pada kelahiran, kematian, serta migrasi neto. Komposisi umur tergantung pada tingkat kesuburan dan migrasi. Tingkat partisipasi tergantung pada tingkat upah, tingkat pengangguran, komposisi umur dan kelamin penduduk. Penawaran tenaga kerja di kota juga tergantung pada upah-upah relatif distribusi pencapaian tingkat pendidikan dan latihan anggota masyarakat. Sedangkan perubahan-perubahan dalam penawaran dipengaruhi oleh perubahan dalam tingkat partisipasi tenaga kerja, misalnya sifat musiman karena libur sekolah, atau resesi. Permintaan terhadap tenaga kerja erat hubungannya dengan permintaan akan hasil produksi perusahaan. Ada tiga yang dapat mengubah bentuk atau kedudukan fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu (1) perubahan relatif tenaga kerja, yaitu apabila harga tenaga kerja tetap sedang harga faktor produksi lain naik, maka tenaga kerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan lebih baik memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja sampai fungsi produk fisik tenaga kerja batas sama dengan produk batas faktor produksi yang lain, (2) perubahan teknologi akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang terampil dan cakap, sedang permintaan akan tenaga yang tidak terampil tidak akan terserap. (3). Perubahan permintaan akan hasil produksi, bila harga produk naik, maka fungsi permintaan akan tenaga kerja dan faktor produksi lain cenderung naik (Reksohadiprojo, 1994:22).

Para migran yang datang ke kota kebanyakan adalah mereka yang berpendidikan rendah dan kurang ketrampilan, sehingga mereka tidak mudah terserap oleh sektor (perusahaan) formal. Penelitian Dewan Riset Nasional di empat kota yaitu di Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya (Firdausy, 1995:33) mencatat bahwa 77,9 persen dari responden, motivasinya menjadi PKL adalah karena kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan/skill yang dimiliki.

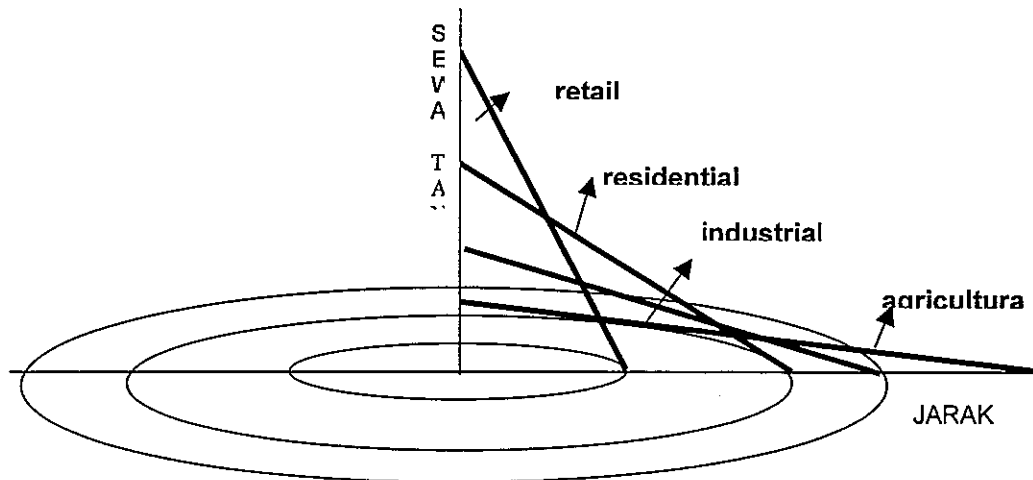
2.3. Teori Lokasi Kegiatan Perdagangan dan Aglomerasi.

2.3.1. Teori Bid Rent

Di perkotaan, persaingan untuk memperebutkan lahan sangatlah kuat, terutama di kota bagian pusat karena di kawasan itu terdapat lokasi-lokasi yang menguntungkan, disamping itu tanah di situ pada umumnya langka. Karena alasan inilah harga tanah di kawasan pusat kota amat mahal. Semakin jauh lokasinya dari pusat kota, semakin menurun permintaan akan tanah dan apabila tanah banyak, maka sewa yang ditawarkan orang untuk membayar tanah per meter persegi menurun mengikuti jaraknya. Di dalam kota, biaya transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun sewa yang tergantung dengan keterjangkauan (*accessibility*) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunlah sewa. Para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menempati tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kemampuannya keuangannya. Jika hal ini dihubungkan dengan kegiatan perdagangan eceran atau pertokoan, maka mereka harus mempunyai kemampuan untuk membayar lokasi sewa dengan imbalan keterjangkauan tempat mereka oleh penduduk. Sementara penduduk memilih lokasinya dipinggir kota dengan diimbangi oleh biaya transport ke pusat kota. Bagi golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya

transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang merupakan zone perumahan yang sewanya murah, untuk itu mereka harus berutumpah-tumpah dikawasan yang berpenduduk sangat padat (Daldjoeni, 1997:166-170).

GAMBAR II.2
PERTALIAN JARAK BID-RENT DARI STRUKTUR KOTA



Dari teori Rent dapat dilihat bahwa faktor jarak merupakan faktor penentu lokasi kegiatan perdagangan

2.3.2. Teori Pusat-Pusat Pelayanan (Teori Tempat Pusat)

Teori tempat pusat (*central places theory*) ini dikembangkan oleh Christaller (1933) dan Losch (1954) yang merumuskan pola keterkaitan ruang berdasarkan hirarki pusat kegiatan. Christaller memaparkan teorinya tentang persebaran dan besarnya permukiman yang dapat diterangkan berdasarkan fungsi pelayanannya. dengan pendekatan yang sifatnya keruangan di bidang ekonomi yang diaplikasikan pada fasilitas perdagangan eceran, dengan dua konsep dasar teori ini adalah:

- Ambang batas penduduk atau ambang batas pasar yang merupakan rasio antara penduduk dengan suatu kegiatan usaha yang menguntungkan. Konsep ini menjelaskan berapa jumlah penduduk efektif bagi suatu pelayanan barang/jasa, yang dipengaruhi

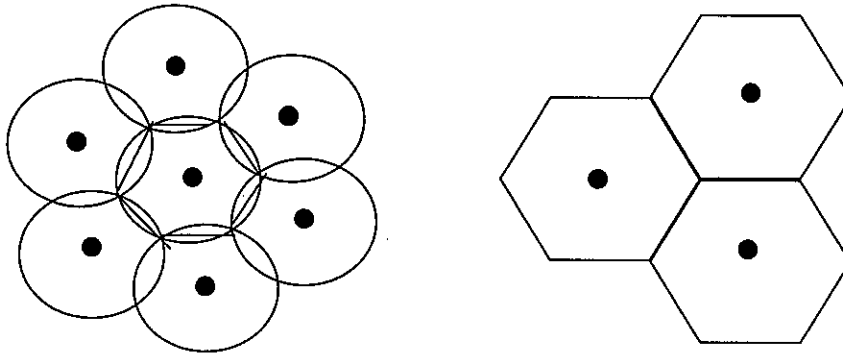
oleh faktor-faktor : tingkat kebutuhan barang, kualitas barang, daya tahan barang dan frekwensi belanja.

- Ambang batas jarak (*distance treshold*) yaitu ukuran jarak yang dapat ditolelir penduduk untuk mendapatkan barang dan jasa. Menjelaskan seberapa jauh jarak maksimal untuk mendapatkan barang dan jasa.

Christaller menganggap suatu wilayah (*region*) sebagai suatu dataran yang homogen secara geografis dengan penduduk yang merata persebarannya. Wilayah-wilayah yang tersebar di dataran tersebut berfungsi sebagai "*central places*" (tempat pusat). Wilayah-wilayah tersebut menyajikan berbagai barang dan jasa untuk wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki. Untuk melayani permintaan tempat-tempat kecil yang tersebar luasnya, disediakan barang dan jasa tingkat rendah. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, makin besar range-nya dari penduduk ditempat kecil, wilayah-wilayah (kota-kota) besar terdapatlah pasar yang besar. Wilayah-wilayah yang saling berhubungan tersebut oleh Christaller dipakai "*hexagon*". (gambar 2.4). Wilayah-wilayah pasaran yang saling bertindih dibelah dengan garis lurus, dengan maksud agar dalam berbelanja, orang memilih tempat (kota) yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. (Daldjoeni,1997:108).

Dari Teori tempat pusat dapat dilihat bahwa hirarki kegiatan perdagangan yang didukung oleh jumlah penduduk dan luas daerah layanan tertentu. Faktor penentu lokasi perdagangan dari masing-masing hirarki perdagangan adalah besar dan jenis barang yang dijual pada masing-masing fasilitas perdagangan, jumlah penduduk pendukung dan luas daerah layanan. Selain itu faktor jarak merupakan faktor penentu lokasi kegiatan perdagangan.

GAMBAR 2. 3.
WILAYAH PASARAN HEKSAGONAL MODEL CHRISTALLER



Sim (1982) membagi analisa perdagangan pusat kota atas faktor yang berpengaruh yaitu aksesibilitas dan keterkaitan spasial. Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan pencapaian suatu lokasi melalui kendaraan umum dan pribadi dan pedestrian, yang dapat diukur dengan kepadatan lalu lintas, jumlah kendaraan umum, kendaraan pribadi dan pola sirkulasi. Keterkaitan spasial bersamaan pengertiannya dengan posisi relatif suatu kegiatan dalam ruang, yang secara internal dapat diukur melalui adanya fungsi yang paling mendukung perkembangan kegiatan di lokasi dan secara eksternal diukur dengan melalui jarak dari fungsi perdagangan lain dan posisi relatif lokasi terhadap pusat perdagangan yang lain.

Dari kedua teori tersebut diatas yang akan menjadi perhatian oleh perusahaan perdagangan dalam memilih lokasi kegiatannya yaitu sewa tempat di sentral yang tinggi dan keinginan akan kemudahan hubungan (*accessibility*) serta keterkaitan spasial dengan kegiatan lain. Efek dari sewa tempat yang tinggi ini akan menarik atau mencegah masuknya perusahaan, dan mendorong aglomerasi bagi tipe-tipe tertentu.

2.3.3. Teori Aglomerasi dan Aspek Kedekatan (*Proximity*) dalam Aktivitas Ekonomi

Aspek kedekatan (*proximity*) dalam melakukan aktivitas ekonomi karena adanya keinginan untuk melakukan aglomerasi (*agglomeration economies*). Dalam Ekonomi Perkotaan, istilah aglomerasi ekonomi dipakai untuk menjelaskan adanya keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial yang dihasilkan dari skala ekonomi pada suatu area perkotaan (Mills, 1972 :16). Aglomerasi dilakukan karena mempunyai skala ekonomi (*scale economies*) yang tinggi dan keuntungan komparatif (*comparative advantage*) yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Studi Hotelling (dalam Chadwick, 1987) menunjukkan bahwa penjual barang sejenis mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada suatu lokasi. Sedangkan menurut Richardson (1977; 69) aglomerasi dari kegiatan-kegiatan tertentu yang serupa akan menimbulkan keuntungan-keuntungan ekstern tertentu (yakni seperti adanya kawasan perdagangan umum, penghematan biaya transport lokal), untuk beberapa kegiatan yang tidak serupa akan beraglomerasi disebabkan karena mereka saling komplementer (seperti kantor-kantor dengan kafetaria, bioskop dengan restoran.)

Kota dipilih oleh pelaku ekonomi sebagai lokasi usahanya karena mempunyai nilai skala ekonomi dan keuntungan komparatif yang tinggi, sehingga ada keinginan bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh kemudahan hubungan (*accessibility*), sewa tempat di sentral usaha, pengurangan biaya-biaya akibat kemacetan (*congestion*), kenyamanan dalam melakukan aktivitas (*amenities*) (Richardson, 1977:55). Keinginan itulah yang ditempuh oleh pelaku ekonomi tidak terkecuali bagi PKL untuk selalu mendekatkan diri pada lokasi-lokasi strategis yang mempunyai nilai skala ekonomi dan keuntungan komparatif.

Kota sebagai lambang dari gejala aglomerasi ekonomi menjadi sasaran para pelaku PKL di perkotaan. Meskipun nilai sewa tanah di kota mahal, mereka cenderung bertempat tinggal yang dekat lokasi usahanya di pusat kota dengan mencari harga sewa rumah yang murah. Sebagai konsekuensinya mereka bertempat tinggal di daerah dekat pusat kota yang kondisinya tidak memenuhi syarat (*slum area*), karena keinginan untuk tinggal pada daerah yang sewanya murah. Untuk lokasi usahanya mereka berusaha mendekati diri dengan pusat-pusat keramaian seperti kawasan perdagangan/pertokoan atau CBD, karena disini banyak pengunjung yang mempunyai latar belakang ekonomi dan kelas sosial yang berbeda-beda. Kecenderungan para PKL yang menempati kawasan-kawasan perdagangan, disebabkan karena mereka tidak akan mampu memiliki atau bahkan menyewa lokasi, karena tempat-tempat tersebut harga tanahnya sangat mahal. Sehingga mereka akan mencari dimana saja asal dekat dengan kawasan tersebut yang terbebaskan dari biaya sewa, untuk itulah trotoar atau tepi jalan dipilih sebagai lokasi usahanya, meskipun dari aspek tata ruang, lokasi tersebut tidak diperuntukannya dan bahkan dapat mengganggu para pejalan kaki. Disisi lain bagi para grosir dan pedagang pengecer (formal), keberadaan PKL disekitar kawasan perdagangan tersebut akan membantu mendistribusikan barang-barang yang mereka jual. Karena melalui PKL barang mereka akan dapat langsung ke konsumen. Sedang bagi para konsumen, manfaatnya terletak pada efisiensi waktu, jarak dan biaya, seperti barang dapat dibeli setiap waktu dan lokasi yang mudah dijangkau.

2.4. Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

2.4.1. Sektor Informal Perkotaan

2.4.1.1. Pengertian Sektor Informal

Konsep sektor informal, pertama kali diperkenalkan oleh J.K. Hart pada tahun 1971, yang membedakan secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal. (Rachbini, 1994 : 26; Daldjoeni, 1998 : 222).

Menurut Hart (dalam Manning dan Effendi, 1996:78-79) dalam penelitiannya di Ghana, sektor formal dan informal dibedakan dalam berbagai kategori yang didasarkan pada kegiatan yang dilakukan individu, jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mengalir dalam perekonomian kota, serta membedakan yang dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu dan status hukum kegiatan yang dikelola.

Dalam konteks Indonesia, menurut Hidayat (1978:6-7) pengertian sektor formal diberikan sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya "accessibility" terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Dilihat dari keberadaannya menurut Hidayat (1978:8), sektor informal dapat berada di daerah kota maupun di desa. Sektor informal yang berada di desa disebut sektor tradisional, sedangkan yang berada di kota tetap disebut dengan sektor informal. Dengan adanya pengertian ini maka secara konseptual di daerah kota dikenal istilah sektor formal dan sektor informal, sedangkan di desa dikenal sektor formal dan sektor tradisional.

Perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor informal dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

TABEL II.1.
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL

Karakteristik	Sektor Formal	Sektor Informal
Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	Birokrasi	Mempunyai organisasi keluarga
Kredit	Dari lembaga resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
Serikat buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada
Hubungan dengan desa	One-way trafic untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
Sifat dunia usaha	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau import	Berdikari
Hubungan kerja majikan buruh	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan atas saling percaya

Sumber : Hidayat (1978 : 10)

2.4.1.2. Ciri-ciri Sektor Informal

Mengenai ciri-ciri sektor informal, ILO (Sethuraman,1976:125) dalam penelitiannya di Kenya mengemukakan tujuh ciri-ciri sektor informal yaitu :

- (1) Mudah dimasuki;
- (2) Bersandar pada sumber daya sekitarnya;
- (3) Kegiatan usaha keluarga;
- (4) Ukuran usahanya dalam skala kecil;
- (5) Bersifat intensif kerja dan dengan teknologi tepat guna;
- (6) Ketrampilan dari yang bersangkutan bukan hasil didikan sekolah formal;
- (7) Di luar jalur yang diatur pemerintah dan bergerak dalam pasar sangat bersaing.

Sedangkan menurut Hidayat (1978 : 8) dalam penelitiannya mengenai sektor informal di Kodya Yogyakarta menghasilkan sebelas ciri pokok tentang sektor informal yaitu :

- (1) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
- (2) Pada umumnya tidak mempunyai izin;
- (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
- (5) Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya;
- (6) Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;
- (7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil;
- (8) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- (9) Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan *one man enterprises* dan kalau mengerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga;
- (10) Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi;
- (11) Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Untuk mengetahui apakah suatu unit usaha termasuk kedalam unit usaha formal atau informal maka harus diperhatikan ke-11 karakteristik tersebut diatas. Bila satu unit

usaha mempunyai beberapa karakteristik di atas, maka unit usaha tersebut dapat dikatakan sebagai unit sektor informal;

Menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 230) diantara berbagai usaha sektor informal adalah usaha PKL, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan.

2.4.2. Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

2.4.2.1. Pengertian dan Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

PKL sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha sektor informal diartikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau secara individual. Istilah kaki lima asalnya adalah trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki-lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop. (Fak. Ekonomi Unpar, 1980:2).

Pengertian tentang PKL terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi di setiap jalur pejalan kaki, jalur-jalur tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling kerumah-rumah penduduk (Fak. Teknik Unpar, 1980:2).

Pengertian PKL menurut Pemerintah Kota Semarang adalah mereka yang didalam menjalankan usahanya menggunakan dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang /dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.(Perda No.8 Tahun 1986)

Dilihat dari klasifikasinya, PKL dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut :

- ◆ Klasifikasi menurut jenis barang dagangan :
 - 1) Dagangan makanan-minuman,
 - 2) Dagangan non makanan-minuman,
 - 3) Dagangan Jasa
- ◆ Klasifikasi menurut waktu usaha
 - 1) Siang hari
 - 2) Malam hari
- ◆ Klasifikasi menurut sifat lokasi usaha
 - 1) Menetap
 - 2) berpindah
 - 3) Keliling
- ◆ Klasifikasi menurut status lokasi usaha
 - 1) Berijin
 - 2) Tidak berijin
- ◆ Klasifikasi menurut tipe "*shelter*" yang ditempati
 - 1) *Shelter* dengan bangunan permanen (berupa bangunan kios yang menetap, tidak bisa dipindah)
 - 2) *Shelter* dengan bangunan tidak permanen (berupa kios atau tenda yang mudah bongkar-pasang, kotak yang bisa dipindah).

2.4.2.2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Seperti telah dikemukakan dimuka, sebagai bagian dari kegiatan usaha sektor informal, PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor informal. Penelitian yang dilakukan Kartini Kartono, dkk (Fak.Sospol, Unpar, 1980:3) mencatat ada 21 ciri-ciri PKL. Ciri-ciri tersebut adalah :

- (1) Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti sebagai produsen, misalnya pedagang makanan-minuman yang dimasak sendiri;
- (2) Perkataan kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis. Juga kelompok pedagang yang mempergunakan meja, kereta dorong dan kios kecil;
- (3) PKL umumnya menjual barang secara eceran;
- (4) PKL umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang hanya merupakan "alat" bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah;
- (5) Pada umumnya para PKL merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal;
- (6) Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah bahkan ada yang mengkhususkan diri dalam hal berjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah;
- (7) Omzet penjualan PKL pada umumnya tidak besar;
- (8) Para pembeli umumnya yang berdaya beli rendah;
- (9) Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jejang hirarki pedagang yang sukses agak langka atau jarang terjadi;

- (10) Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha "*family enterprise*", dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
- (11) Mempunyai sifat "*one man enterprise*";
- (12) Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar dan "*shifting*" jenis barang yang diperdagangkan sering kali terjadi;
- (13) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas usaha perdagangan para PKL;
- (14) Sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa "*full time job*", sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja, atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan "*additional*";
- (15) Sebagian PKL melaksanakan pekerjaan secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya juga berubah-ubah;
- (16) Barang-barang yang umumnya dijual oleh PKL merupakan apa yang dalam ilmu marketing dinamakan "*convenience goods*", jarang sekali mereka memperdagangkan "*specialty goods*";
- (17) Para PKL umumnya dalam suasana tidak tenang, takut kalau-kalau sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh TIBUM;
- (18) Masyarakat umum sering menganggap, bahwa para PKL merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan;
- (19) Mengingat faktor pertentangan kepentingan, maka kelompok PKL merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi, walaupun perasaan setia kawan cukup kuat diantara mereka;
- (20) Jam dan waktu kerja pada umumnya tidak menunjukkan pola yang tetap, hal mana merupakan salah satu ciri perusahaan perorangan;

(21) Para PKL terlihat jiwa “*entrepreneurship*” yang kuat;

Sedangkan menurut Julissar An-naf (1983: 30) terdapat dua belas karakteristik PKL yaitu :

- (1) Bagi PKL, berdagang di kaki-lima umumnya sebagai mata pencaharian pokok.;
- (2) PKL umumnya tergolong angkatan kerja produktif;
- (3) Tingkat Pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
- (4) Sebagian besar PKL merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
- (5) Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
- (6) Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
- (7) Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
- (8) Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan dengan Bank;
- (9) Kurang mampu memupuk modal;
- (10) Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
- (11) Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
- (12) Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi.

2.4.2.3. Pelaku Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Pengalaman di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pada umumnya PKL terdiri dari migran (Manning dan Effendi, 1996 : 184). Kecenderungan tersebut juga

dapat dilihat pada PKL dalam penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy,1995: 21) pada 4 (empat) kota di Indonesia seperti dikemukakan diatas, dimana sebanyak 80,3 persen dari Pedagang Kaki Lima tersebut merupakan migrasi ke kota.

Menurut Bryant (1989:337), PKL yang bertahan hidup sebagai penghuni kaki lima dan tempat-tempat hunian liar, umumnya mengatakan bahwa kehidupan mereka sudah dianggap jauh lebih baik di lingkungan perkotaan yang baru daripada di kampung halaman mereka sebelumnya. Karena banyak diantara mereka yang memang sudah tidak memiliki akses tanah, oleh sebab itu mereka hanya menggantungkan hidupnya pada upah yang tidak menentu sebagai buruh tani yang senantiasa bergantung pada ketidaktentuan musim dan iklim bagi tanaman-tanaman subsisten. Selain itu nilai tukar komoditi sektor pertanian terhadap komoditi non pertanian cenderung menurun, sehingga posisi pedesaan dan sektor pertanian secara relatif juga tidak menguntungkan (*recessive*). Ini menimbulkan kefrustasian para petani yang bekerja keras memproduksinya, sehingga mereka memutuskan untuk bermigrasi ke kota.

2.5. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha.

2.5.1. Kedekatan dengan Pusat-Pusat Kegiatan /Keramaian Kota.

Diperkotaan, persaingan untuk memperebutkan ruang cukup ketat. Perebutan ruang ini tidak hanya untuk fungsi industri, pusat perdagangan, perumahan, perkantoran, pelebaran jalan, yang sifatnya berskala besar, tetapi juga memperebutkan ruang yang sempit seperti trotoar atau bahu jalan. Masalah yang mencolok adalah penggunaan ruang kota oleh sektor informal PKL, yaitu di trotoar dan bahu jalan sebagai tempat menjajakan dagangan. Menurut Surbakti (1996) trotoar diperebutkan sebagai area pejalan kaki, jalan sepeda, dalam keadaan tertentu sepeda motor (pada kondisi jalan macet). Selain itu trotoar

diperebutkan untuk PKL sebagian atau seluruh lebar trotoar. Kondisi ini menyebabkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang menggunakan ruang.

Kecenderungan PKL ini tidak terlepas dari eksistensi sektor formal di daerah tersebut atau dengan kata lain adanya interaksi ekonomi di sektor formal (misalnya kawasan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Jalan-jalan protokol dalam kota yang terdapat pusat-pusat kegiatan sektor formal atau pelayanan umum seperti pertokoan, perkantoran, pasar, gedung bioskop, sekolah dan tempat kegiatan lainnya tentunya merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, sehingga merupakan tempat yang strategis untuk berjualan. Dalam observasinya di Jakarta dan Surabaya mengenai PKL, Rachbini dan Hamid (1994:90) mengamati adanya kecenderungan dimana setiap berdiri gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet sepanjang jalan. Mereka melayani pegawai/karyawan bergaji rendah.

Kecenderungan tersebut juga dikemukakan oleh Todaro (1994:267) bahwa sektor informal terkait erat dengan sektor formal di perkotaan seperti penyediaan input-output produksi dan tenaga kerja yang murah. Demikian juga oleh Takeli (dalam Pardoko, 1987:36) bahwa amat sukar untuk mengadakan garis pemisah yang tajam antara pekerjaan formal dan informal, karena keduanya ada dalam hubungan yang tetap. Kedua kelompok ini ada wujudnya dalam kerangka waktu dan tempat yang sama.

Dean Forbes (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 348) dalam penelitiannya mengenai PKL di Ujung Pandang, menyebutkan bahwa adanya variasi pemusatan-pemusatan ruang dalam PKL di kota Ujung Pandang disebabkan oleh hubungan yang kompleks antara suplay pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran dan sarana dan prasarana transportasi. Perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber-sumber bahan baku telah mendorong timbulnya pemusatan sektor informal PKL.

2.5.2. Kedekatan dengan Tempat Tinggal.

Suharso (1986:21) menyatakan bahwa para migran dalam memilih tempat tinggal dan memilih lokasi usaha atau melakukan kegiatan ekonominya mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain : murah, dekat teman, dengan usaha sejenis dan sedapat-dapatnya dengan teman sekampung, dekat dengan tempat pemasaran serta mudah dicapai dengan biaya murah. Dengan dasar pertimbangan demikian tidak ayal lagi sering berbenturan dengan hal-hal atau aturan yang bersifat formal, sehingga sering terjadi pengusuran tempat-tempat kumuh, penertiban tempat usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, penangkapan gerobak-gerobak dorong dan sejenisnya.

Turner (1972:167) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan pada tingkat penghasilan masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pilihan rumah tinggal dekat dimana mereka bekerja. Kebanyakan tingkat penghasilan PKL adalah rendah (An-naf, 1983:30) sehingga bila pendapat Turner diaplikasikan dalam penelitian ini, PKL akan memilih lokasi usaha (tempat bekerja) yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Dalam hubungannya dengan mobilitas lokasi usaha, Rachbini dan Hamid (1994:101) dalam penelitiannya mengenai PKL di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas lokasi usaha dengan mobilitas tempat tinggal. PKL akan bertempat tinggal dimana saja dan kemana saja gerobak alat dagangannya dipangkalkan. Mereka harus dekat dengan lokasi usahanya. Kalau tidak mereka akan dililit masalah ongkos transportasi.

2.5.3. Pengaruh Strategi Pemasaran dalam Pilihan Lokasi Usaha

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. (William J. Stanton dalam Swastha, 1986; 5). Dengan demikian terdapat empat variabel pemasaran yang secara umum dijadikan dasar untuk menyusun strategi pemasaran, yaitu produk, harga, tempat (distribusi) dan promosi.

Informasi tentang penempatan barang, penting untuk memberikan penilaian apakah barang dagangan PKL selalu siap dalam jangkauan konsumen. Sebagai pedagang, PKL akan selalu berusaha menempatkan barang dagangannya untuk selalu siap dalam jangkauan konsumen. Penempatan disini adalah penempatan barang atau jasa pada lokasi tertentu sedemikian rupa sehingga mudah dicapai dan diperoleh oleh para pembeli potensial. Sehubungan dengan itu mereka berusaha untuk menempati lokasi yang strategis, salah satunya adalah di kaki lima atau jalan tertentu yang banyak orang hilir mudik. Seperti penelitian lapangan yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1995 :39) mengenai PKL di beberapa kota di Indonesia, dimana pada umumnya responden berusaha menempatkan barang dagangan secara fisik sedekat mungkin dengan calon pembeli.

Dilihat dari sudut pemasaran, maka apa yang dilakukan PKL tersebut diatas sebetulnya cermin dari mereka yang berusaha menggugah terwujudnya proses AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) (Swastha, et al, 1986 : 347) yaitu suatu proses timbulnya perhatian yang diikuti dengan keinginan untuk memiliki dan kemauan untuk membeli dan berakhir dengan dilaksanakannya tindakan membeli oleh calon pembeli potensial. Proses AIDA ini merupakan fungsi dari promosi. Sebetulnya dengan

mendekatkan barang sedekat mungkin dengan calon pembeli, para PKL telah melaksanakan dua hal sekaligus yaitu fungsi lokasi dan fungsi promosi. Dengan berbuat demikian mereka berusaha menekan serendah mungkin biaya yang timbul dari kedua fungsi tersebut.

2.5.3.1. Jenis Barang (Produk) Dagangan

Jenis barang yang diusahakan PKL sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional (Firdausy,1995:32) di 4 kota yaitu di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya adalah barang kebutuhan sehari-hari, yang sebagian besar adalah jenis makanan-minuman (54,9 %), sisanya 45,1 persen merupakan barang-barang lainnya seperti klontong, rokok, sayuran, buah-buahan, barang loak, mainan anak, makanan burung, bunga, majalah, buku, pakaian serta jasa. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan berharga relatif tidak tinggi, sebagian dari barang-barang tersebut mudah mengalami penurunan mutu, barangnya tersedia dibanyak tempat dan calon pembeli tidak banyak memerlukan pertimbangan lain bila ingin membelinya.

Dari segi marketing kelompok barang tersebut diatas termasuk kategori barang-barang "*convenient*", yang biasanya banyak diminati oleh kelompok masyarakat berpendapat menengah dan rendah.

2.5.3.2. Bentuk (Struktur) Pasar Pedagang Kaki Lima

Seorang pedagang yang akan menjalankan usahanya yang pertama perlu disadari adalah bagaimana posisi seorang pedagang terhadap pedagang lainnya. Suatu barang yang dipilih untuk diproduksi / dijual bagi seseorang bukan semata-mata masalah bagaimana memproduksi/ membeli barang tersebut dan biaya produksinya tetapi juga mencakup

bagaimana menjual produknya. Untuk itu perlu disadari pada bentuk (struktur) pasar yang bagaimana pedagang tersebut berada.

Para ahli ekonomi mendefinisikan struktur pasar sebagai karakteristik yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan yang menjual di pasar tersebut misalnya jumlah perusahaan dipasar atau jenis produk yang mereka jual (Lipsey, et.al, 1987:3).

Menurut Pass, Lowes dan Davis (1998 : 400) dalam teori ekonomi, struktur atau bentuk pasar yang dihadapi seorang pengusaha dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain jumlah penjual dan pembeli, mudah tidaknya memasuki bidang usaha yang bersangkutan, homogen atau tidaknya sifat dari barang penjual di mata pembeli, tingkat kesempurnaan dari pengetahuan penjual dan pembeli terhadap tingkat harga.

Pada lokasi tempat PKL berusaha, informasi mengenai banyaknya pedagang yang menjual barang yang sama, atau hampir sama dalam jenisnya sangat penting. Barang / produk tersebut meskipun sama tetapi untuk menarik pembeli, bentuk /design, rasa dan pelayanan dapat dilakukan dengan cara berbeda (tidak sama). Faktor produk dan mutu merupakan tumpuan utama seperti produk yang cepat rusak, tidak cepat rusak, dan mempunyai merek dagang atau tidak. Selain faktor produk, penetapan harga juga dapat dipengaruhi oleh lokasi usaha yang strategis. Lokasi usaha yang strategis seperti mudah dicapai, dapat digunakan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pedagang yang tempatnya sulit dicapai. Ada pembeli yang tidak suka repot-repot seperti berdesakan untuk memperoleh harga yang lebih mahal sedikit. Sebaliknya ada pula pembeli yang selalu berusaha memperoleh harga yang termurah.

2.5.4. Pengaruh Latar Belakang Sosial Pedagang Kaki Lima.

Menurut Dietvorst (dalam Daldjoeni, 1997:91) bagian dari pendekatan analisis spasial adalah masalah lokasi kegiatan ekonomis manusia. Di situ dipakai model citra manusia, yang intinya penentuan lokasi berdasarkan keputusan dari para pengusaha yang ingin mencapai hasil optimal, dan untuk itu mereka harus memiliki dua hal, yaitu informasi tentang lingkungan serta kemungkinan optimal dapatnya mengambil keputusan.

Dalam bahasa geografi perilaku (Dietvorst dalam Daldjoeni, 1997:94) ada pengertian-pengertian seperti antara lain : Persepsi, kognisi, lingkungan psiko, peta mental, citra, dan sikap.

Persepsi adalah fungsi psikologis yang memampukan individu untuk mengamati rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi pengalaman yang berkaitan secara tertata. Persepsi terhadap lingkungan adalah interpretasi tentang suatu seting (ruang) oleh individu. Setiap individu, dengan demikian akan mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda, karena latar belakang budaya, nalar dan pengalaman yang berbeda.

Salah satu hal yang dipersepsi manusia tentang lingkungannya adalah ruang (space) di sekitarnya. Pengertian ruang itu termasuk persepsi tentang jarak jauh-dekat, luas-sempit, longgar-sesak, kurang nyaman dan sebagainya.

Sikap (attitude) yaitu kondisi kejiwaan seseorang yang permanen dalam menghadapi aspek-aspek tertentu dari dunia pengalamannya.

Menurut Triandis (1971) menyatakan bahwa sikap (attitude) merupakan suatu kesiediaan manusia dalam bereaksi terhadap suatu obyek. Sikap tersebut terdiri dari 3 komponen yakni (a) komponen kognitif merupakan pengetahuannya terhadap obyek; (b) komponen afeksi merupakan hubungan emosi terhadap obyek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang disukai atau tidak sehingga tumbuh perasaan positif maupun negatif;

(c) komponen tingkah laku merupakan kecenderungan untuk bertindak sesuai komponen kognitif dan komponen afeksi.

Dalam kaitannya dengan sikap tersebut, Suwandhini (dalam Firdausy, 1995:125) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan menentukan sikap seseorang karena apa yang didengar dan dilakukan seseorang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dengan orang-orang dilingkungannya. Hal ini intinya bahwa status sosial-ekonomi dan pengetahuan seseorang tentang lingkungannya akan mempengaruhi sikap orang tersebut. Sikap tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi tindakan manusia di dalam memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri.

Menurut Rusli Ramli (1992), tingkat pendidikan dan kelompok umur para PKL berpengaruh pada pola-pola sosialisasi di perkotaan. Hal ini karena tingkat pendidikan memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir, beradaptasi dan bereaksi terhadap lingkungan barunya, sedangkan umur akan memberi pengaruh kepada kemampuan fisik PKL dan adaptasi terhadap pola-pola sosial budaya baru.

Kalau hal-hal tersebut diaplikasikan terhadap kecenderungan PKL dalam memilih lokasi usaha, hasil penelitian PKL di Bandung oleh Fakultas Ekonomi Unpar (1980), menunjukkan bahwa adanya perbedaan kecenderungan dalam menentukan lokasi usahanya yaitu bagi pedagang yang usianya lebih tua lebih suka berjualan menetap pada lokasi tertentu, sedangkan pedagang yang berusia muda mempunyai mobilitas yang lebih besar (cenderung mudah berpindah).

2.6. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha dari Aspek Konsumen

Transaksi perdagangan eceran merupakan hasil pilihan pembeli (konsumen) terhadap faktor-faktor daya tarik dan penghambat dari fasilitas perdagangan yang ada.

Elemen-elemen dari faktor ini menurut Nelson (1958), adalah :

- ◆ Ketersediaan barang dagangan menyangkut : tipe, ukuran, luas pilihan, pelayanan yang memadai,
- ◆ Keuntungan harga : unit retail standar, harga kompetitif, dampak promosi, penjualan khusus,
- ◆ Kenyamanan tempat penjualan,
- ◆ Kemudahan : transportasi umum (beaya,waktu, frekwensi), transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jarak parkir).

Lebih lanjut Nelson (1958) mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran menyangkut tanggapan konsumen adalah :

- ◆ Konsumen cenderung mengunjungi pusat perdagangan yang dominan,
- ◆ Konsumen tidak akan melewati suatu pusat perdagangan untuk menuju pusat perdagangan lain yang mempunyai fasilitas yang sama,
- ◆ Konsumen akan mengunjungi pusat perdagangan terdekat dengan fasilitas yang sama,
- ◆ Konsumen cenderung mengikuti pola sirkulasi yang sudah umum.

2.7. Rangkuman Kajian Pustaka

2.7.1. Ulasan Teori dan Konsep

Dari Kajian Pustaka yang menelusuri beberapa teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan atau mendapatkan kejelasan hubungan dari teori-teori sebagai instrumen untuk mengupas permasalahan penelitian. Sehingga diharapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usahanya dapat diidentifikasi. Adapun rangkuman dari beberapa teori yang

digunakan untuk mengupas permasalahan penelitian serta untuk dapat mencapai tujuannya, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ditambah adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, memerlukan lapangan pekerjaan. Para migran bermigrasi ke kota termotivasi oleh persepsinya bahwa upah di kota lebih tinggi dari upah di desa dan adanya tingkat kemudahan mencari pekerjaan sektor formal di kota. Tetapi karena sektor formal di kota menggunakan padat modal dan membutuhkan ketrampilan pekerja, maka para migran yang biasanya tidak berbekal pendidikan/ ketrampilan harus bersaing dengan penduduk kota yang relatif mempunyai pendidikan/ ketrampilan, para migran akhirnya menjadi pengangguran dan akhirnya memasuki lapangan pekerjaan sektor informal perkotaan diantaranya adalah usaha dagang dengan skala kecil dan biasa disebut sebagai PKL

Tumbuhnya sektor informal PKL dalam suatu kota tidak lepas kaitannya dengan fungsi kota yang begitu dominan dari aspek aktivitas ekonomi. Kota menjadi sasaran dari aktivitas ekonomi karena mempunyai "*scale economies*" yang tinggi terutama didalam memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari, baik mencukupi kebutuhan internal ataupun eksternal (eksport). Adanya kota yang memberikan "*comparative advantages*" yang semakin berkembang dan bersaing. Orang pada suatu waktu dapat memproduksi lebih murah barang dan jasa pada suatu tempat tertentu sehingga dapat menarik tenaga kerja ke suatu daerah yang mempunyai fungsi secara regional berbeda kondisi alamiahnya. Perpindahan tenaga kerja mempengaruhi proses produksi dan pemakaian ongkos antar daerah dalam perdagangan, sehingga faktor kedekatan (*proximity*) merupakan pilihan yang tepat/efisien bagi pelaku ekonomi. Kedekatan tersebut bisa dalam hal jaraknya dengan sumber bahan baku, dekat dengan pusat keramaian, dekat dengan

dimana para pelaku ekonomi bertempat tinggal. Kondisi inilah yang mempengaruhi didalam mencari/menentukan lokasi-lokasi yang begitu strategis dalam melakukan aktivitas ekonominya, termasuk didalamnya adalah bagi sektor informal PKL.

Keinginan ber-“aglomerasi” akibat adanya “*scale economies*” dan “*comparative advantages*” sangat menguntungkan bagi proses perkembangan kota (urbanisasi). Fenomena aglomerasi dalam suatu kota bisa pula dijelaskan dalam lingkup yang lebih spesifik. Misalnya pada aglomerasi kegiatan-kegiatan serupa atau berkumpulnya aktivitas-aktivitas ekonomi yang mempunyai kegiatan sejenis dalam lokasi tertentu. Selain mempunyai kelebihan dalam konteks “*scale economies*” dan “*comparative advantages*”, juga menimbulkan keuntungan dalam akses-akses tertentu (yakni keuntungan dalam akses fasilitas perkotaan, perbankan, perdagangan, dan penghematan biaya transportasi). Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak serupa akan beraglomerasi karena satu sama lain bisa saling menunjang (bekomplementer). Pola-pola gejala aglomerasi ini ada kemungkinan akan memperlihatkan suatu struktur hirarki, dimana suatu daerah yang menjadi pusat kegiatan yang mempunyai fungsi lebih primer bagi daerah lain (fungsi sekunder) sebagai daerah pengaruh (hinterland) terstruktur dalam suatu hirarki, seperti yang dijelaskan oleh teori “*central place*”nya Christaller.

Kondisi tersebut diatas berimplikasi terhadap kegiatan sektor informal PKL yaitu kecenderungannya dalam memilih lokasi usahanya dan merupakan faktor-faktor penentu mengapa kegiatan sektor informal PKL di perkotaan mempunyai lokasi yang beraneka ragam kondisi lingkungannya karena ada latar belakang yang berbeda namun saling kait-mengkait. Mulai dari teori urbanisasi; migrasi dari desa ke kota; konsep *supply & demand* dalam tenaga kerja; teori lokasi bid rent, aglomerasi; adanya keinginan untuk saling berdekatan (*proximity*); kemudahan dalam akses-akses kebutuhan tertentu; dalil Christaller

dan Locsh dan sebagainya, semuanya memberi wacana dan menjadi landasan berpikir dalam penelitian.

Dalam memasarkan dagangannya, PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila lokasi tersebut dekat dengan pusat kegiatan/keramaian atau banyaknya hilir mudik warga kota yang menjalankan aktivitasnya. Lokasi tersebut seperti di kawasan perdagangan, perkantoran, dekat pasar dan lain-lain yang bertendensi aglomerasi lokasi. Sesuai dengan teori lokasi, bagi para grosir dan pedagang pengecer (formal), keberadaan PKL akan membantu mendistribusikan barang-barang yang mereka jual. Karena melalui PKL barang mereka akan dapat langsung ke konsumen. Sedang bagi para konsumen, manfaatnya terletak pada efisiensi waktu, jarak dan biaya, seperti barang dapat dibeli setiap waktu dan lokasi yang mudah dijangkau. Pada lokasi-lokasi tersebut harga lahan sangat mahal, mereka tidak mungkin dapat membeli atau menyewa tempat, karena tidak ada pilihan lain dan untuk dapat bertahan hidup di kota, mereka berusaha memasarkan dagangannya di sebarang tempat seperti di trotoar, bahu jalan, taman dan lain-lain yang bukan peruntukannya, sehingga dapat mengganggu sirkulasi pejalan kaki, lalu-lintas ketertiban dan kebersihan.

Untuk menetapkan lokasi usahanya, disamping lokasi yang strategis yaitu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan kota, dalam menentukan lokasi usahanya PKL juga akan melihat bagaimanan posisinya terhadap pedagang lain yang ada di lokasi tersebut, hal ini akan menyangkut tingkat persaingan terutama dalam hal jenis dagangan atau banyaknya penjual sejenis pada lokasi tersebut. Bagaimana kemudahan memperoleh barang dagangan juga merupakan faktor yang diperhitungkan menyangkut biaya transportasi yang akan ditanggung, disamping itu faktor lokasi tempat tinggal pedagang akan ikut menentukan

dimana mereka akan memilih lokasi usahanya, menyangkut bagaimana cara mereka membawa peralatan dan biaya transportasi yang akan ditanggung.

Pengaruh latar belakang sosial-ekonomi menentukan bagaimana seorang PKL mengambil keputusan dalam memilih lokasi usahanya, karena menyangkut modal kerja yang akan digunakan seperti dalam pengadaan peralatan, bahan baku atau dagangan yang akan dibeli. Pengalaman seseorang akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang akan mengambil sikap untuk memutuskan, ini akan menyangkut tingkat pendidikan dan umur seseorang.

2.7.2. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima

Dari kajian pustaka diatas diidentifikasi beberapa hal yang menyangkut pemilihan lokasi usaha PKL, yaitu :

- a) Faktor sosial-ekonomi, yang diukur dengan :
 - (1) Pendidikan
 - (2) Umur
 - (3) Besarnya modal yang akan digunakan
- b) Faktor aksesibilitas (keterjangkauan menuju lokasi) diukur dengan sarana transportasi yang digunakan PKL ke lokasi dan kemudahan memperoleh angkutan umum di lokasi.
- c) Faktor Pemasaran diukur dengan jenis produk (dagangan) yang dipasarkan.
- d) Faktor Bentuk (struktur) Pasar diukur dengan banyaknya penjual usaha sejenis di lokasi,
- e) Faktor kedekatan dengan tempat tinggal, diukur dengan jarak tempat tinggal pedagang dari lokasi.

- f) Faktor kedekatan (*proximity*) sebagai daya tarik lokasi, diukur dengan jarak lokasi ke pusat kegiatan /keramaian kota,

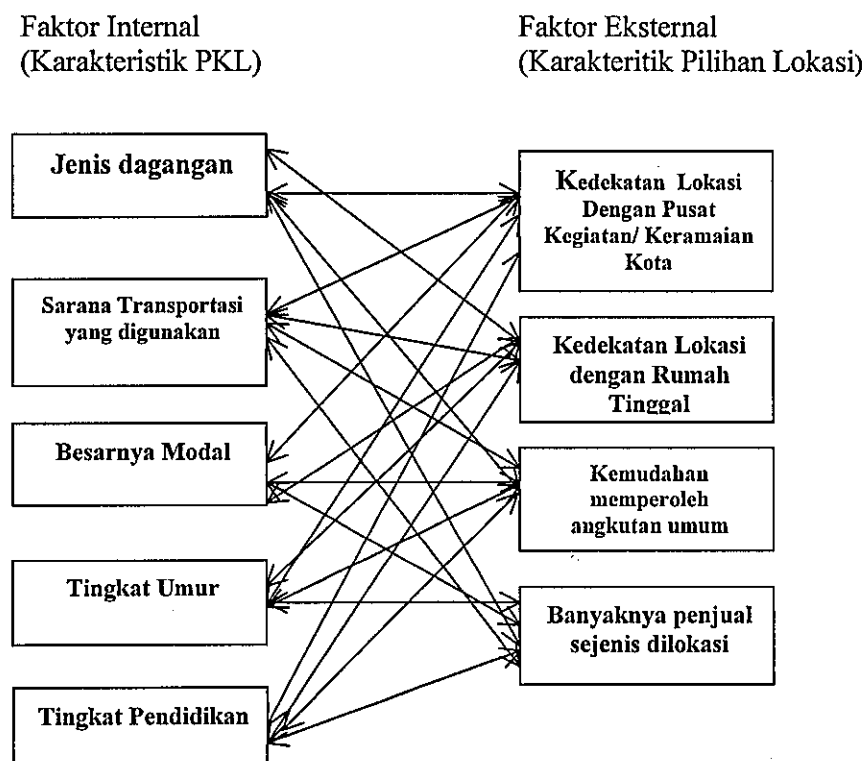
2.8. Hipotesis

Diawali dari ulasan teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini kemudian dicoba merumuskan beberapa hipotesis yang merupakan dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan (*question research*) yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Faktor-faktor pilihan lokasi usaha PKL dipengaruhi oleh karakteristik internal yang terdiri jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal umur dan pendidikan .

Hipotesa tersebut bila distrukturkan kedalam diagram seperti tercantum dalam gambar 2.4 berikut.

GAMBAR 2.4.
DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR VARIABEL.



2.9. Definisi Operasional

- (1). **Pedagang Kaki Lima** atau yang selanjutnya disingkat **PKL** dalam penelitian ini adalah pedagang yang dalam menjalankan usahanya menempati lokasi-lokasi dimana lokasi-lokasi tersebut merupakan lahan yang dikuasai pemerintah yang seharusnya mempunyai fungsi untuk kepentingan umum.
- (2). **Lokasi usaha PKL** adalah bidang tanah atau lahan yang statusnya dibawah penguasaan pemerintah dimana sudah mempunyai fungsi untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan untuk tempat usaha seperti trotoar, selokan, bahu jalan, taman-taman kota, halte, bantaran sungai dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya yang sengaja dipilih oleh PKL untuk menjalankan usahanya.
- (3). **Lokasi PKL Diiijinkan** adalah lokasi-lokasi sesuai dengan definisi pada item nomor (2) diatas dimana dengan pertimbangan tertentu pemerintah menetapkan lokasi-lokasi yang ditunjuk (diiijinkan) untuk digunakan para PKL sebagai tempat menjalankan usahanya selama jangka waktu dan tanggung jawab tertentu serta kewajiban membayar retribusi.
- (4). **Lokasi PKL Tidak Diiijinkan** adalah lokasi-lokasi sesuai dengan definisi pada item nomor (2) diatas yang tidak diperbolehkan untuk tempat usaha PKL

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei jenis “*explanatory*” yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, serta dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun dan Effendi, 1989). Selain itu untuk lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, dilakukan pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif

Pendekatan kuantitatif terutama digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kehidupan para PKL, menyangkut karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik lokasi usaha PKL (spasial) serta untuk menganalisis ada atau tidak adanya perbedaan atau hubungan antara dua peubah (variabel). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis pemilihan lokasi usaha PKL yang dikaitkan dengan karakteristik sosial ekonomi PKL, karakteristik lokasi usaha PKL dan kebijakan pemerintah serta pandangan masyarakat (konsumen).

Selanjutnya dalam melakukan analisis dilakukan melalui pendekatan kajian sebagai berikut :

- Analisis deskriptif, tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan yang dalam hal ini adalah gambaran tentang karakteristik sosial ekonomi dari para PKL berdasarkan variabel-variabel yang terdapat di dalam karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik lokasi usaha PKL.

- Analisis korelatif, digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara beberapa variabel.

3.2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1). Para PKL yang beroperasi di Kota Semarang. Yang dimaksudkan dengan PKL disini adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di atas trotoar, tepi jalan, jembatan penyeberangan, taman kota, emper-emper toko atau disekitar pusat kegiatan kota dengan tidak termasuk didalamnya adalah pedagang keliling.

Sedangkan kategori responden dibedakan pada tiga kelompok berdasarkan pada jenis dagangan yaitu:

- Kategori jenis dagangan makanan/minuman, PKL dengan dagangan yang dijual dengan cara diolah terlebih dulu baru dijual, atau sebagai produsen- pedagang, seperti warung makan, penjual bakso, tahu gimbali. Dilihat dari ketahanannya, jenis dagangan ini cepat mengalami penurunan mutu (basi).
 - Kategori jenis dagangan non makanan/minuman, PKL dengan jenis dagangan ini mendapatkan barang langsung dijual. PKL dalam kategori ini sangat beragam, seperti kelontong, grabadan, onderdil , sayuran/buah-buahan, koran, buku, rokok, bensin , barang bekas dan lain-lain. Dilihat dari ketahanannya, jenis dagangan ini relatif lebih tahan lama.
 - Kategori penjual jasa reparasi tv-sepeda-arloji, tukang kunci, afdruk foto dan lain-lain.
- (2). Para konsumen (pembeli) yang sedang melakukan transaksi dengan PKL tersebut diatas.

3.3. Pengambilan Sampel

a). Sampel PKL :

Lokasi-lokasi dimana terdapat konsentrasi PKL sesuai pendataan UPD-PKL Kota Semarang adalah tersebar di 97 tempat yang dibagi menjadi 5 wilayah rayon , yaitu Rayon Semarang Barat, Rayon Semarang Utara, Rayon Semarang Timur, Rayon Semarang Selatan dan Rayon Semarang Tengah dengan jumlah PKL kurang lebih 7.091 PKL. Sehubungan dengan waktu studi yang terbatas, dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik sampel gugus bertahap (Sangarimbun dan Effendi, 1989:167) dengan uraian sebagai berikut :

(1).Populasi sampling pertama, terdiri dari semua lokasi, dimana beberapa lokasi diambil per wilayah sebesar 10 % dari jumlah lokasi dalam wilayah itu, dengan perincian sebagai berikut :

- ◆ Rayon Semarang Barat = $10 \% \times 17 \text{ lokasi} = 2 \text{ lokasi}$,
- ◆ Rayon Semarang Utara = $10 \% \times 24 \text{ Lokasi} = 3 \text{ lokasi}$,
- ◆ Rayon Semarang Timur = $10 \% \times 19 \text{ Lokasi} = 2 \text{ Lokasi}$,
- ◆ Rayon Semarang Selatan = $10 \% \times 14 \text{ Lokasi} = 1 \text{ lokasi}$,
- ◆ Rayon Semarang Tengah = $10 \% \times 16 \text{ Lokasi} = 2 \text{ Lokasi}$.

Pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi yang mempunyai PKL dengan variasi jenis dagangan yang berbeda-beda dan diambil yang mempunyai jumlah PKL banyak/dominan. Dengan perincian sebagai berikut :

- ◆ Rayon Semarang Barat= Jl. Kokrosono, Jl. Simongan- Bongsari.
- ◆ Rayon Semarang Utara =Jl. Empu Tantular, Jl. Citarum-Jl. Progo, Jl. Dr. Cipto,
- ◆ Rayon Semarang Timur = Jl. Sekitar Stadion, Jl. Bugangan Raya,

- ◆ Rayon Semarang Selatan = Jl.Dr.Karyadi,
- ◆ Rayon Semarang Tengah= Jl. Simpang Lima-Jl.Pahlawan, Jl.Ahmad Dahlan,
(Kawasan Simpang Lima, malam hari).

(2).Populasi sampling kedua, yang terdiri dari beberapa lokasi terpilih, diambil tiap-tiap lokasi kurang 10 % persen dari jumlah PKL pada lokasi terpilih sebagai responden, dengan perincian sebagai berikut :

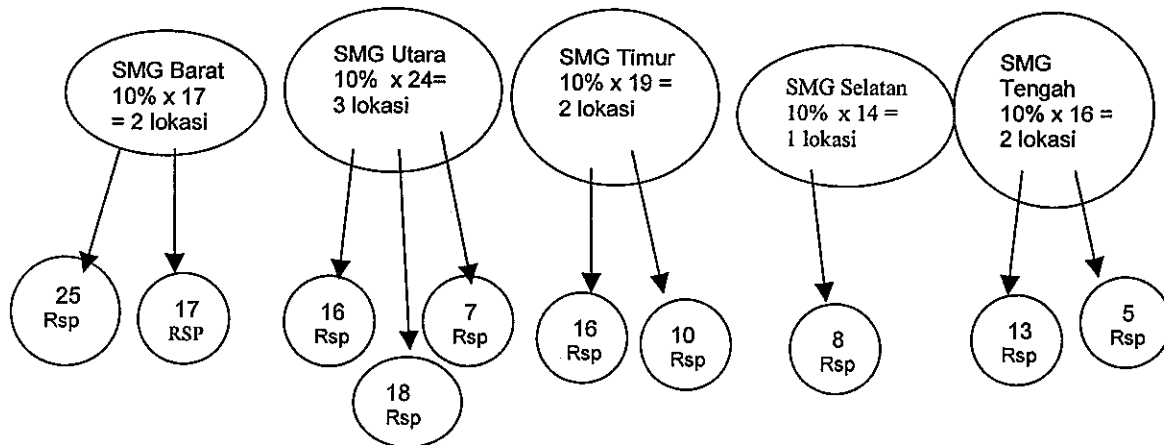
- Rayon Semarang Barat
 - Jl. Kokroso = $10\% \times 258 = 25$ Responden
 - Jl.Simongan- sekitar Pasar Bongsari = $10\% \times 163 = 17$ Responden
- Rayon Semarang Utara
 - Jl. Empu Tantular = $10\% \times 159 = 16$ Responden
 - Jl. Citarum-Jl.Progo- = $10\% \times 186 = 18$ Responde,
 - Jl. Dr. Cipto = $10\% \times 66 = 7$ Responden,
- Rayon Semarang Timur
 - Jl.Sekitar Stadion = $10\% \times 156 = 16$ Responden,
 - Jl.Bugangan Raya, = $10\% \times 105 = 10$ Responden,
- Rayon Semarang Selatan
 - Jl.Dr.Karyadi = $10\% \times 76 = 8$ Responden,
- Rayon Semarang Tengah (Kawasan Simpang Lima)
 - Jl. Simpang Lima dan Jl.Pahlawan = $10\% \times 124 = 13$ Responden
 - Jl.Ahmad Dahlan = $10\% \times 52 = 5$ Responden,

Total Responden PKL dari 10 lokasi adalah 135 Rsp (Responden).

Pengambilan sampel tersebut diatas secara diagram seperti pada gambar 3.1.

UPT-PUSTAKA-INDONESIA

GAMBAR 3.1.
DIAGRAM PENGAMBILAN SAMPEL PKL



b). Sample Konsumen (pembeli).

Karena tidak terdapat data mengenai jumlah jumlah konsumen yang melakukan transaksi dengan PKL, maka pengambilan sample konsumen (pembeli) diambil secara acak (random) dengan sistim penjatahan (kuota) yaitu tiap lokasi diambil sampel konsumen sebesar 25 % jumlah sample PKL. Dengan demikian jumlah responden untuk konsumen didapat 35 responden.

3.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut ini.

1). Observasi / Pengamatan

Dalam pengamatan diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Pengamatan ini ditunjukkan baik pada aspek fisik lingkungannya maupun para PKL sebagai responden yang akan dimintai data kuesener.

Di dalam observasi / pengamatan ini dicatat hasil pengamatannya secara deskriptif. Dengan dilakukan observasi tersebut dapat diketahui aktivitas-aktivitas para PKL di lokasi, serta konteks sosial lain yang terlibat. Data observasi ini selain ditulis secara deskriptif, juga dapat direkam dengan alat foto atau dengan sketsa mengenai gambaran lokasi dan aktivitas yang terjadi.

2). Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, merupakan salah satu upaya pencarian data dari responden di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik sosial-ekonomi para PKL dan kecenderungan-kecenderungan dalam memilih lokasi usahanya. Dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner peneliti didampingi oleh 2 (dua) orang staf dari UPD-PPKL dan tiap-tiap lokasi dibantu oleh ketua atau yang mewakili kelompok PKL dari masing-masing lokasi. Pengambilan kuesioner dari responden untuk waktu yang telah ditentukan dilakukan oleh ketua kelompok dan kemudian diambil oleh peneliti. Sedangkan kuesioner kepada konsumen (pembeli) untuk mendapatkan informasi dan tanggapan mengenai keberadaan PKL di tiap-tiap lokasi. Pelaksanaan pengumpulan data dari konsumen dilakukan oleh peneliti sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka (open ended) atau tertutup (closed). Jenis-jenis pertanyaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sesuai dengan variabel utama yang dijadikan pedoman untuk menyusun substansi daftar pertanyaan

Adapun jenis data primer yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- (a). Data dan Informasi dari PKL seperti pada tabel III.1.

TABEL III.1
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI DARI PKL

N O.	Indikator	Kebutuhan Data dan Informasi
1.	Karakteristik Sosial, Ekonomi dan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi PKL meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, besar modal, jenis usaha, sarana transportasi yang digunakan, lama usaha, latar belakang/alasan dan motivasi menjadi PKL, persaingan usaha, kepemilikan ijin • Persepsi PKL terhadap kebijakan pemerintah
2.	Karakteristik Lokasi Usaha PKL (Spasial)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak ke tempat kegiatan/keramaian kota • Jarak ke tempat tinggal • Jumlah penjual sejenis di lokasi • Aksesibilitas (kemudahan angkutan umum di lokasi)

Sumber : Hasil analisis, 2000

- (b). Informasi dari masyarakat pembeli (konsumen) meliputi sarana transportasi yang digunakan dan persepsi konsumen terhadap keberadaan PKL.
- (c). Informasi dari pejabat di lingkungan UPD-PPKL, yaitu dari Kepala UPD-PPKL dan pejabat bawahannya, selaku pejabat yang berkompeten dalam penelitian ini untuk mendapat gambaran mengenai upaya pembinaan dan penataan PKL dan hambatan-hambatan yang dialami.

3). Pengumpulan data sekunder.

Pengumpulan data sekunder terutama menyangkut peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah Kota yang berkaitan penataan ruang pada umumnya dan penataan lokasi PKL pada khususnya.

3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu analisis secara kuantitatif (statistik) dan kualitatif

Dalam analisa kuantitatif, ditentukan jumlah responden untuk setiap kelompok variabel pengaruh dicatat karena angkanya diperlukan dalam interpretasi. Untuk memudahkan pembacaan, semua data yang masuk di formulasikan dalam bentuk kode angka-angka sebagai penyederhanaan, sehingga semua angka dalam data entri memiliki makna sesuai klasifikasi atau pengkategorian dalam daftar pertanyaan. Analisis data yang akan digunakan secara umum menggunakan tabel frekwensi dan analisa statistik tabulasi silang.


Tabel frekwensi digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan karakteristik responden. Fungsi tabel frekwensi ini menurut Sangarimbun dan Effendi (1989:266) antara lain :

- (1) Mendapatkan diskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisa satu variabel tertentu.
- (2) Mempelajari distribusi variabel-variabel penelitian.
- (3) Menentukan klasifikasi yang paling baik untuk tabulasi silang.

Untuk mengetahui keterhubungan (asosiasi) antara variabel dilakukan dengan kajian bivariat (menggunakan dua variabel) dengan teknik tabulasi silang.

Analisis statistik chi square (χ^2) digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel (nominal). Dikatakan ada hubungan bilamana nilai hitung (χ^2) lebih besar bila dibanding dengan nilai tabel (χ^2).

Untuk mempercepat proses analisis diperlukan program komputer dengan menggunakan *softwer SPSS (Statistical Product And Service Solution)*.



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

POLA PENYEBARAN LOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA SEMARANG


KETERANGAN:

	: BATAS KOTAMADYA
	: BATAS KECAMATAN
	: BATAS KELURAHAN
	: REL KERETA API
	: JALAN ARTERI PRIMER
	: JLN ARTERI SEKUNDER
	: JL. KOLEKTOR PRIMER
	: LOKASI PKL
○	: LOKASI SAMPEL


SUMBER

DATA PRIMER

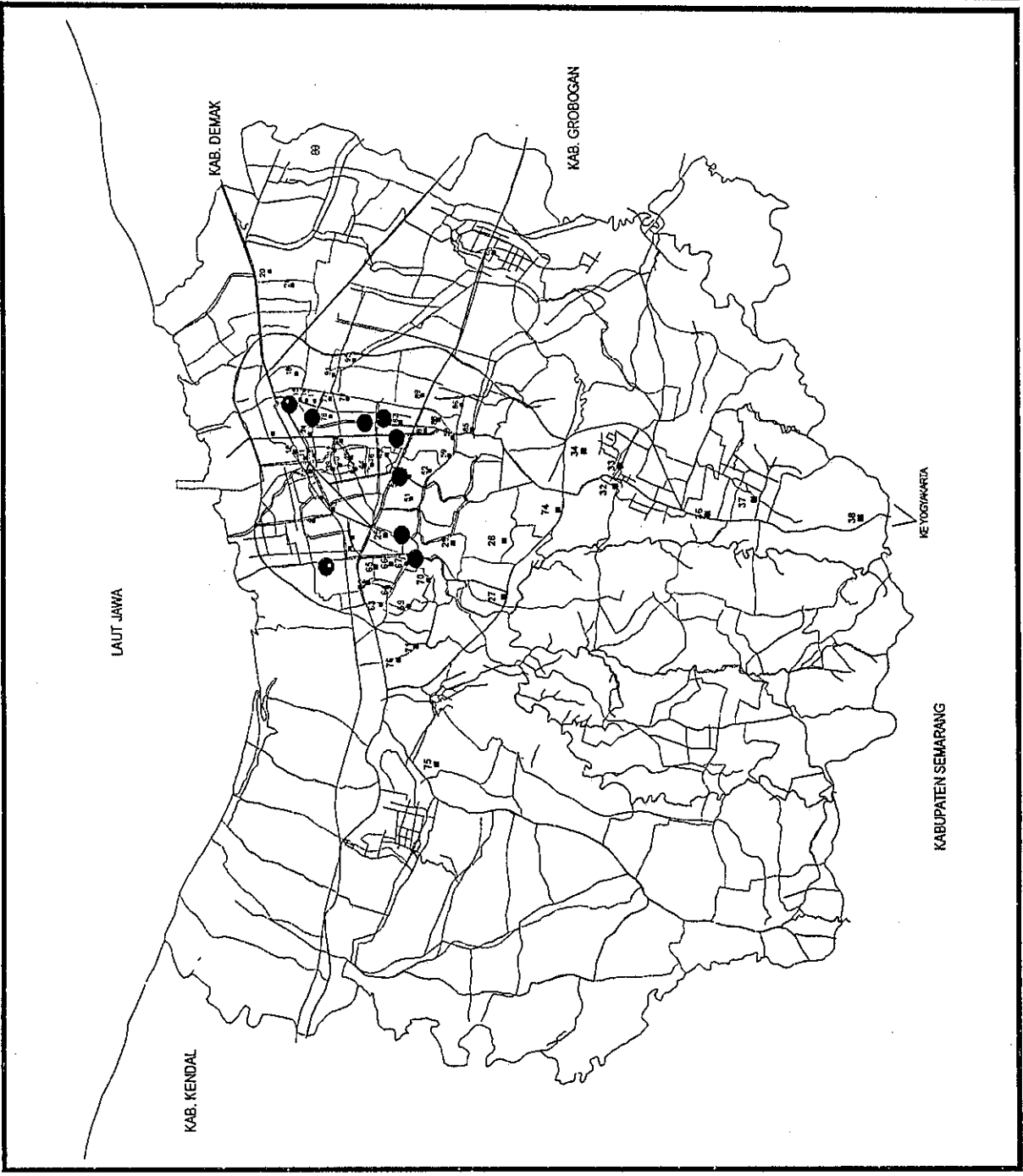
SKALA



UTARA



No Gambar
Gambar 3.2.





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

LOKASI SAMPEL PKL
JL. KOKROSONO DAN BONGSARI
/JL. SIMONGAN

KETERANGAN :

-  : JALAN
-  : SUNGAI
-  : LOKASI SAMPEL
-  : REL KERETA API

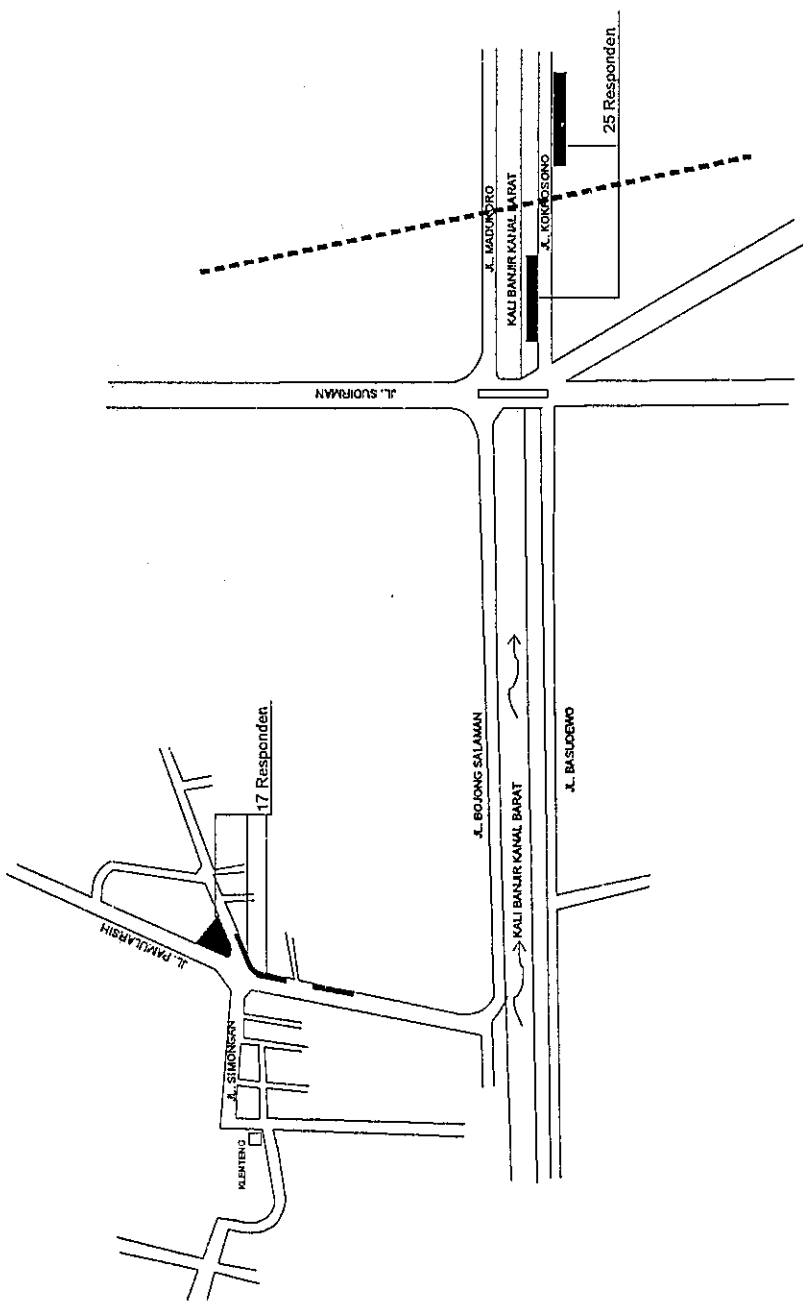
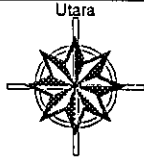
SUMBER

DATA PRIMER

SKALA

UTARA

No Gambar
Gambar 3.3.





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

LOKASI SAMPEL PKL
JL. CITARUM, JL. PROGO,
JL. BUGANGAN DAN JL. DR. CIPTO



: LOKASI SAMPEL.

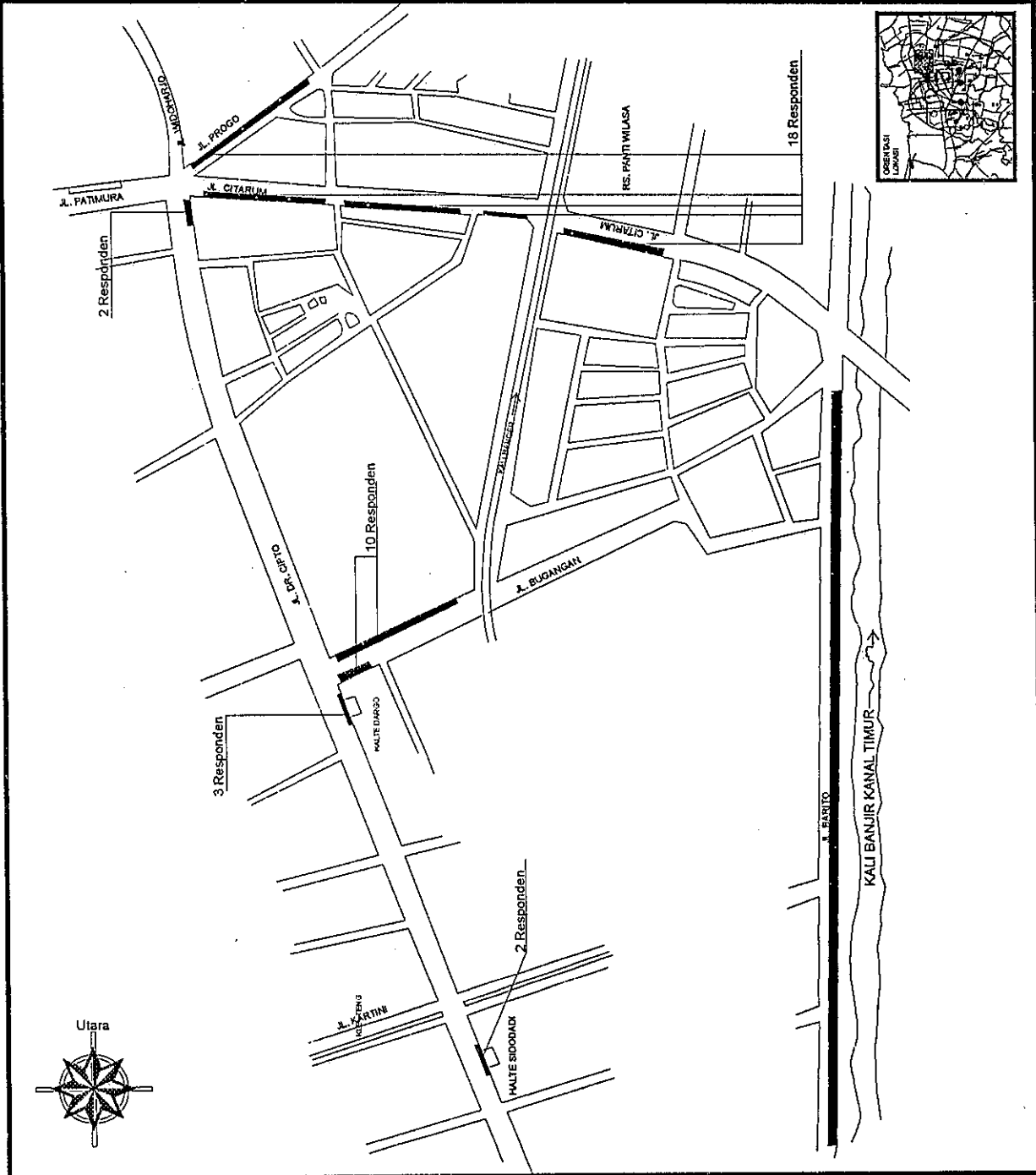
SUMBER

DATA PRIMER

SKALA

UTARA

No Gambar
Gambar 3.4.





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO




THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

LOKASI SAMPEL PKL
JL. STADION, JL. SIMPANG LIMA
JL. A. DAHLAN

KETERANGAN :

-  : JALAN
-  : SUNGAI
-  : LOKASI SAMPEL

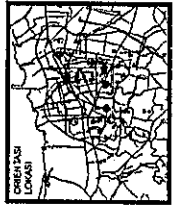
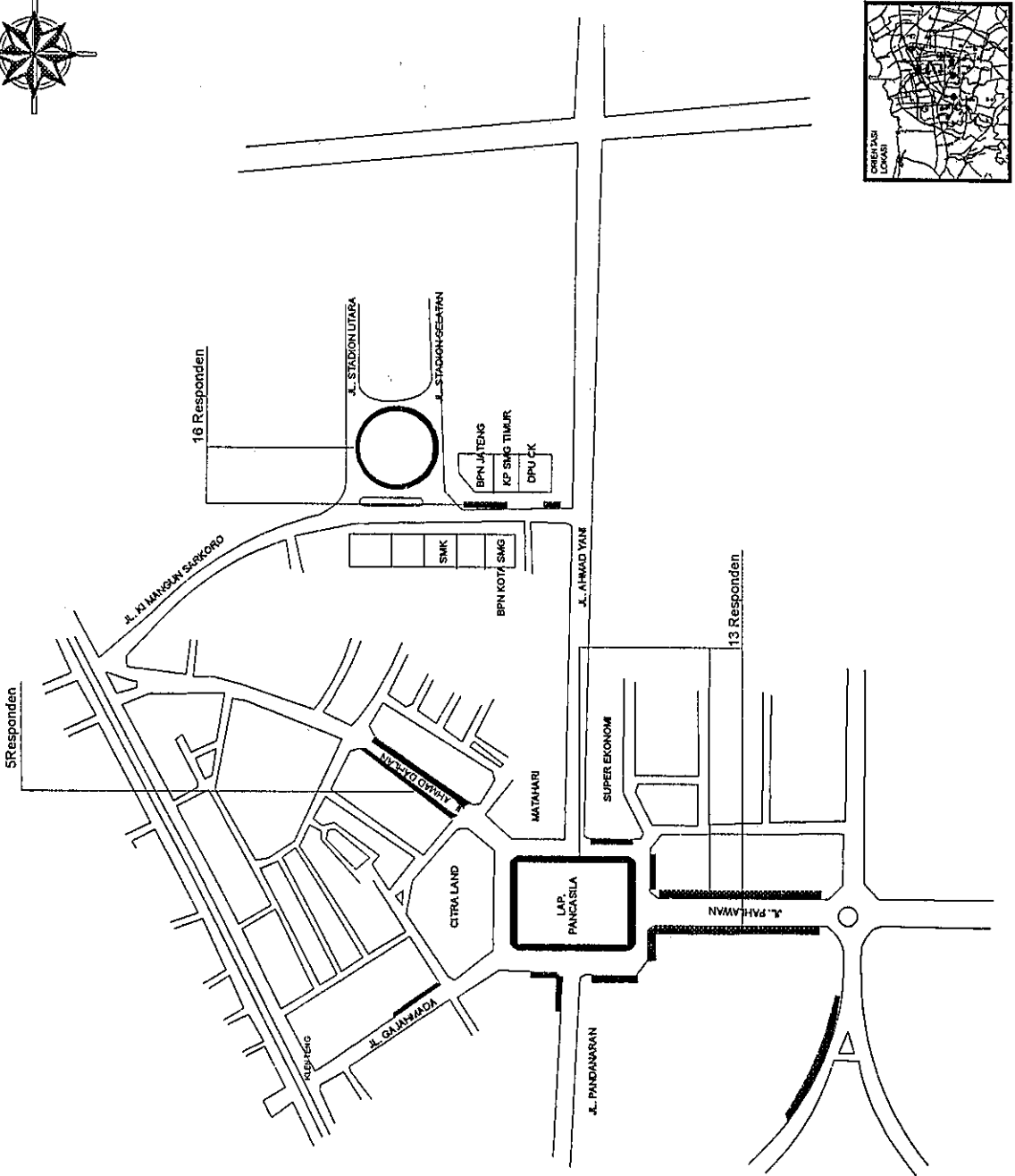
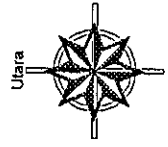
SUMBER

DATA PRIMER

SKALA

UTARA

No Gambar
Gambar 3.5.





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO




THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

LOKASI SAMPEL PKL
JL. MPU TANTULAR

KETERANGAN :

-  : JALAN
-  : SUNGAI
-  : LOKASI SAMPEL

SUMBER

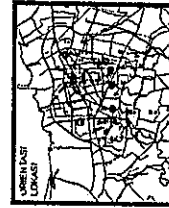
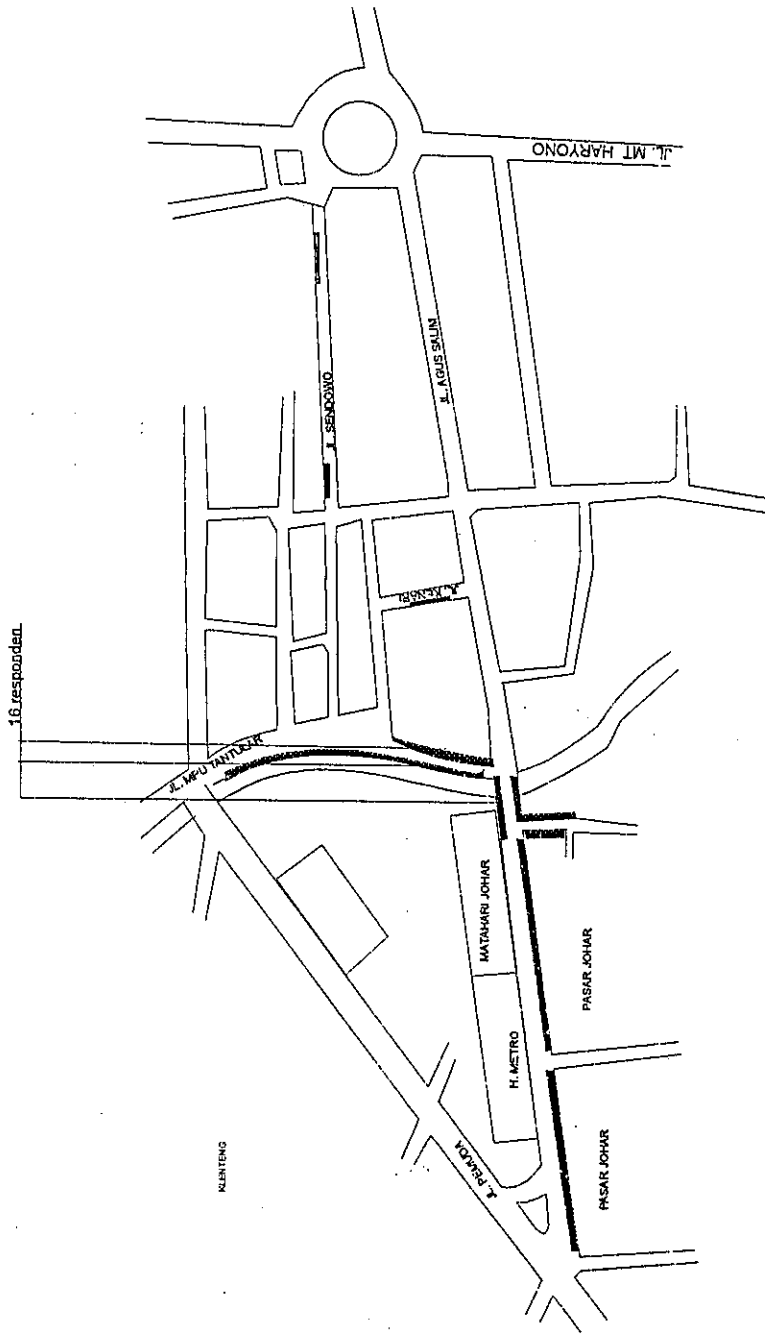
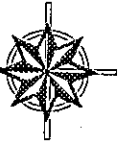
DATA PRIMER

SKALA

UTARA

No Gambar
Gambar 3.6.

Utara





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO




THESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Kota Semarang)

PETA

LOKASI SAMPEL PKL
JL. DR. KARYADI

KETERANGAN :

-  : JALAN
-  : SUNGAI
-  : LOKASI SAMPEL

SUMBER

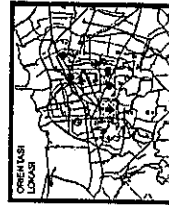
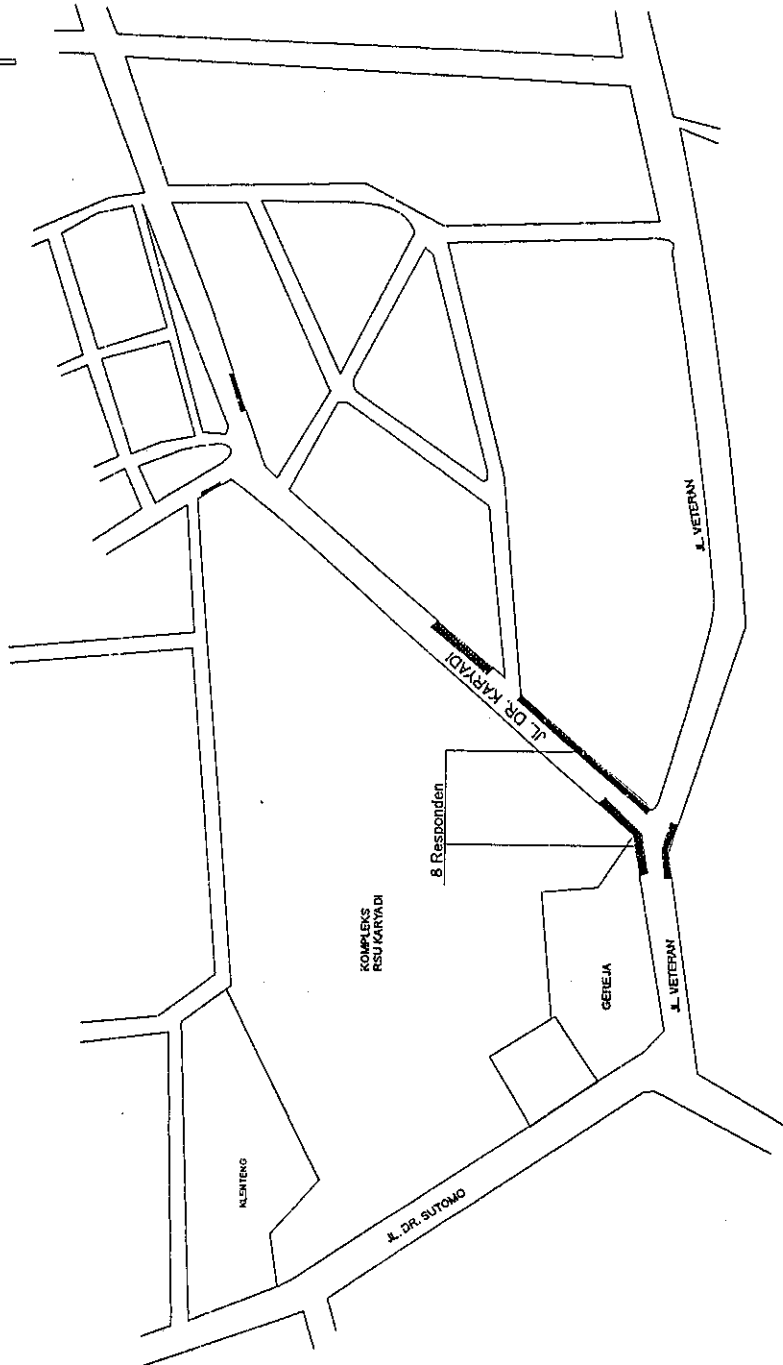
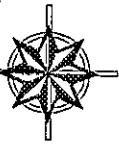
DATA PRIMER

SKALA

UTARA

No Gambar
Gambar 3.7.

Utara



BAB IV
DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN
KOTA SEMARANG

4.1. Kondisi Demografi Kependudukan

4.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Kota Semarang sebagai daerah penelitian secara administrasi terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang dengan luas 37.364 Km² tercakup didalamnya kecamatan Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Candisari, Gadjahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Selatan.

Dilihat sejak tahun 1993 sampai tahun 1998 diketahui bahwa jumlah penduduk cenderung terus meningkat, seperti terlihat dalam tabel IV.1.

TABEL. 4.1.
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 1993
S/D 1998

No.	Kecamatan	Th. 1993	Th. 1994	Th. 1995	Th. 1996	Th. 1997	Th. 1998
1,	Tugu	20.627	21.810	22.299	22.635	22.819	23.146
2,	Ngaliyan	68.917	71.235	73.485	76.753	77.513	80.956
3,	Mijen	32.771	33.232	33.926	35.726	35.735	36.442
4,	Gunungpati	48.591	49.573	50.271	54.237	54.615	55.569
6,	Banyumanik	81.561	87.402	91.425	93.681	95.372	97.818
6,	Tembalang	79.148	82.034	83.431	85.402	86.215	91.066
7,	Pedurungan	98.134	104.926	112.410	117.770	119.286	125.422
8,	Genuk	48.631	50.968	52.646	55.872	56.382	58.532
9,	Gayamsari	54.355	59.528	60.318	61.182	60.890	61.556
10,	Candisari	76.006	75.973	76.308	76.640	76.664	76.566
11,	Gajahmungkur	52.711	53.185	54.088	54.625	54.786	55.455
12,	Semarang Selatan	79.743	79.507	79.048	79.138	79.034	78.056
13,	Semarang Tengah	84.652	83.357	82.308	81.283	80.829	78.982
14,	Semarang Timur	96.260	93.471	91.628	88.413	87.743	85.631
15,	Semarang Utara	122.705	122.783	130.489	129.299	128.846	127.443
16,	Semarang Barat	132.754	137.480	138.851	139.189	139.287	140.910
	Jumlah	1.177.566	1.206.464	1.232.931	1.251.845	1.256.016	1.273.550

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang, 1998

Dari data pada tabel V.1 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1993, maka pada tahun 1998 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 95.984 jiwa. Dengan rate pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 1993 – 1998 sebesar 1,24 %.

4.1.2. Migrasi Masuk dan Keluar

Perubahan jumlah penduduk pada umumnya terjadi karena tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (datang-pergi). Adapun penduduk lahir, mati, datang dan pergi tahun 1993-1998 seperti terlihat pada tabel IV.2.

TABEL IV.2.
PENDUDUK LAHIR, MATI, DATANG DAN PERGI TAHUN 1993 S/D 1998

Kecamatan	Th. 1993	Th. 1994	Th. 1995	Th. 1996	Th. 1997	Th. 1998	Jumlah
Lahir	9.439	16.285	16.636	14.675	12.718	13.844	83.597
Mati	3.514	6.432	6.723	6.545	6.343	6.556	36.113
Datang	29.996	40.826	38.751	36.062	26.713	33.903	206.251
Pergi	24.508	33.026	33.337	31.520	23.838	28.125	174.354

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang, 1998

Dalam pengertiannya, migrasi terbagi menjadi 2 yaitu migrasi masuk (in-migration) dan migrasi keluar (out-migration). Menurut data yang terkumpul baik pada migrasi masuk atau migrasi keluar tahun 1993 sampai akhir tahun 1998 cenderung tidak tetap. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah manakala migrasi masuk naik diikuti pula migrasi keluar demikian pula sebaliknya. Pada tahun 1993 terdapat 29.996 yang masuk, tahun 1994 menjadi 40.826 orang atau naik 36,1 % yang cukup mencolok pada tahun 1995, ada 38.751 orang atau turun 5,1 %. Sedangkan tahun 1996 menjadi 36.062 orang atau 7,68 %. Tahun 1997 turun lagi menjadi 26.713 orang atau turun 25,9 % dan pada tahun 1998 naik lagi menjadi 33.903 orang.

Keadaan seperti ini terjadi pula pada migrasi keluar tahun 1993 ada 24.508 orang, tahun 1994 naik 34,75 % menjadi 33.026 orang atau ada selisih 8.518 orang, sedang tahun 1995 mengalami kenaikan sebesar 0,94 %. Pada tahun 1996 menjadi 31.520 atau turun

5,45 %, tahun 1997 menjadi 23.838 atau turun 24,3 % dan pada tahun 1998 naik lagi menjadi 28.125 atau naik 17,9 %.

Dari angka-angka diatas maka selama 6 tahun bila dihitung secara kasar (rata-rata) di Kota Semarang terdapat pendatang yang masuk 34.375 orang, keluar 29.059 orang. Selisih antara pendatang dan pergi di Semarang = 5316 berarti rata-rata yang masuk lebih banyak dibanding dengan yang keluar. Apabila tingkat migrasi dihitung berdasarkan rumus $M_i = I/P \times K$, dimana M_i = angka migrasi masuk, I = Jumlah migrasi masuk dan P = jumlah penduduk tahun tertentu serta K = Konstanta 1000, maka angka di Kota Semarang untuk tahun 1993 adalah $M_i = 29.996/1.177.566 \times 1000 = 25,47$ per 1000 orang, dan tahun 1998 = 26,62 per 1000 orang. Oleh karena itu, dapat diartikan pula bahwa angka migrasi masuk di kota Semarang ini sesungguhnya cenderung bertambah secara berarti.

Dari uraian itu terlihat bahwa pengaruh migrasi terhadap tingkat pertumbuhan penduduk tidak begitu besar. Memang apabila dilihat angka-angka itu secara kasar diketahui cukup banyak masyarakat yang keluar masuk. Kendatipun demikian adanya fenomena di berbagai kota di Indonesia yaitu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perumahan maka dibangunlah ribuan unit rumah yang tersebar di berbagai tempat di kota-kota besar, termasuk juga di Kota Semarang. Hal ini dimungkinkan terjadinya perpindahan penduduk dari satu kelurahan ke kelurahan lain dalam satu kecamatan atau dari satu kecamatan ke kecamatan lain dalam satu kota. Apabila asumsi ini benar dan apabila pengaruh terhadap besarnya angka migrasi keluar masuk, yang berasal dari para pembeli rumah dominan, maka bisa diartikan bahwa pengertian migrasi di sini perlu dipahami dalam arti yang luas, maksudnya ialah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen tanpa membatasi pada pengertian jarak. Dugaan ini penting untuk dikemukakan sebab kaitannya dengan penelitian ini, PKL dikenal sebagai kelompok masyarakat yang punya mobilitas cukup tinggi. Dengan adanya tambahan perumahan mendorong pula muncul PKL di seputar wilayah perumahan atau di tempat-tempat

strategis sekitarnya. Untuk itu dua hal yang berkaitan adalah, adanya banyak perumahan mempengaruhi tingkat migrasi, adanya perumahan mempengaruhi pula tumbuhnya PKL.

4.1.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Mata Pencaharian

Penduduk menurut kelompok umur di kota Semarang cenderung mengelompok pada usia muda. Untuk mengetahui susunannya dapat dilihat pada tabel IV.3.

Dari tabel IV.3 diketahui bahwa di kota Semarang penduduk usia muda menduduki porsi yang paling tinggi. Pada tahun 1993 untuk kelompok umur 0 – 4, 5 – 9 dan 10 – 14 cenderung naik, sedang pada tahun 1998 cenderung menurun, hal ini berarti terjadi penurunan dikelahiran, bisa jadi karena keberhasilan KB (Keluarga Berencana).

TABEL IV.3.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KOTA
SEMARANG, TAHUN 1993 DAN 1998

Kelompok Umur	Tahun 1993	Tahun 1998
0 – 4	108.819	121.893
6 – 9	114.177	120.446
10 – 14	117.346	120.451
15 – 19	117.391	126.448
20 – 24	117.411	126.960
25 – 29	108.593	116.250
30 – 34	98.039	105.339
35 – 39	87.170	94.475
40 – 44	74.066	79.686
45 – 49	64.915	70.237
50 – 54	56.721	63.220
55 – 59	43.991	51.781
60 – 64	36.557	44.371
64 +	32.366	33.993
Total	1.177.566	1.273.550

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang, 1998

Kalau umur 15 – 59 dianggap produktif maka jumlah tenaga kerja produktif di Kota Semarang pada tahun 1993 ada 768.297 jiwa dan pada tahun 1998 ada 832.396 jiwa yang berarti naik 8,3 %.

Sedangkan kelompok umur yang belum produktif (0 – 14) dan tidak produktif (60 th keatas) pada tahun 1993 ada 409.265 jiwa dan pada tahun 1998 ada 441.154 jiwa. Untuk itu apabila dihitung perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif (umur di bawah 15 tahun ditambah 60 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) maka diperoleh angka tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) adalah 53,2 berarti setiap 100 orang penduduk menanggung 53 orang yang tidak produktif. Tingginya angka ratio beban tanggungan tersebut tentunya harus semakin diperkecil, sebab semakin kecil beban tanggungan berarti akan mempermudah peningkatan kesejahteraan.

Untuk mengetahui sejauh mana kepadatan penduduk, lebih dahulu disajikan tabel.

IV.4 di bawah ini :

TABEL IV.4.
PENGGUNAAN TANAH DI KOTA SEMRANG

No	Kecamatan	Luas Sawah (km ²)		Luas Tanah Kering (km ²)	
		th 1993	Th 1998	Th 1993	th 1998
1	Tugu	567,90	460,00	2.625,90	2.669,35
2	Ngaliyan	191,70	136,60	3.069,40	3.132,98
3	Mijen	1.024,60	1.077,59	5.189,60	5.137,66
4	Gunungpati	1.688,50	1.561,55	3.711,30	3.837,53
6	Banyumanik	326,10	130,00	2.183,40	2.383,06
6	Tembalang	460,80	452,60	3.960,00	3.947,44
7	Pedurungan	91,00	71,32	1.894,30	2.000,69
8	Genuk	94,40	104,20	2.644,50	2.634,24
9	Gayamsari	36,80	33,90	599,90	517,55
10	Candisari	0,00	0,00	555,40	555,51
11	Gajahmungkur	0,00	0,00	765,10	763,09
12	Semarang Selatan	95,00	0,00	753,20	848,05
13	Semarang Tengah	0,00	0,00	605,00	604,99
14	Semarang Timur	6,10	0,00	764,30	770,25
15	Semarang Utara	0,00	0,00	1.135,40	1.133,55
16	Semarang Barat	64,70	18,57	2.322,40	2.368,40
	Jumlah	4.587,66	4.046,33	32.779,10	33.304,34

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang, 1998

Dari data pada tabel IV.4 diketahui bahwa sebagian besar tanah di Kota Semarang adalah tanah kering. Pada tahun 1993, luas tanah sawah 12,3 %. Pada tahun 1998 turun menjadi 10,8 %, dimana wilayah yang masih banyak tanah sawahnya adalah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Kecamatan Tembalang.

Terjadinya pergeseran pengguna areal tanah di Semarang kiranya tidak lepas dari tuntutan kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan seperti industri, perumahan atau fasilitas umum lainnya. Hal ini tampak jelas bila dilihat kecenderungan meningkatnya jumlah areal tanah kering.

Dilihat dari kepadatan penduduknya adalah pada tahun 1993 kepadatan brutto 31.514 jiwa/km², sedangkan tahun 1998 kepadatan brutto 34.083 jiwa/km², atau dalam selang 5 tahun naik 2,6 % %.

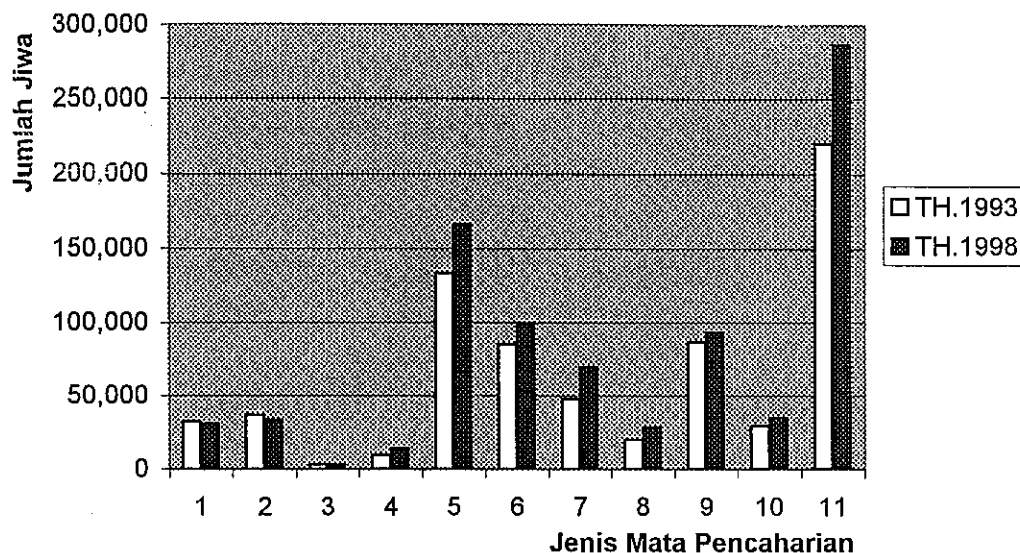
Semakin menyempitnya sawah dan semakin luasnya lahan tanah kering diikuti dengan perubahan komposisi penduduk menurut mata pencaharian seperti terlihat pada tabel.IV.5 dan tabel IV.6.

Dari tabel IV.5 dan tabel IV.6 diketahui bahwa porsi ketenagakerjaan yang digeluti masyarakat lebih banyak pada pekerjaan non agraris, yang berarti pula semakin nampak corak khas kegiatan masyarakat perkotaan. Di Kota Semarang masih terlihat adanya penduduk dengan mata pencaharian petani, baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani yaitu pada tahun 1993 sebesar 9,9 % %, sedangkan pada tahun 1998 petani pemilik dan buruh tani sebesar 7,6 % % atau mengalami penurunan. Konsentrasi petani ini terutama pada Kecamatan Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Genuk. Hal ini apabila ditelusuri lebih lanjut kemungkinan mereka juga banyak yang

mulai mengalihkan perhatian ke bidang pekerjaan lain yang terlihat adanya kenaikan pada sektor mata pencaharian buruh industri sebagai ciri kegiatan perkotaan.

Namun demikian yang penting diperhatikan adalah pada bidang pekerjaan "lain-lain", dimana menurut Sugiono Soetomo (1998) bidang pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai bidang pekerjaan yang bergerak di sektor informal termasuk didalamnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Di tahun 1993 sebesar 221.316 orang dan pada tahun 1998 sebesar 287.216 orang atau naik 29,77 % (lihat gambar 4.1, tabel IV.5 dan tabel IV.6).

GAMBAR 4.1.
KOMPOSISI PENDUDUK DI KOTA SEMARANG MENURUT MATA
PENCAHARIAN TAHUN 1993 DAN TAHUN 1998



KETERANGAN

1= Petani Sendiri

2= Buruh Tani

3= Nelayan

4= Pengusaha

5= Buruh Industri

6= Buruh Bangunan

7= Pedagang

8= Angkutan

9= PNS/ABRI

10= Pensiunan

11= Lain-lain

TABEL IV.5.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN DI
KOTA SEMARANG TAHUN 1993

No.	Mata Pencaharian	PETANI	BURUH	NELA-	PENGU-	BURUH	BURUH	PEDA-	ANGKU-	PNS/	PENSI-	LAIN-
	Kecamatan	SENDIRI	TANI	YAN	SAHA	INDUST	BANGUN	GANG	TAN	ABRI	UNAN	LAIN
1.	Tugu	823	2,938	239	85	2,862	2,725	1,167	122	559	166	1,849
2.	Ngaliyan	7,168	8,784	0	869	7,176	3,705	2,615	917	2,431	979	9,633
3.	Mijen	4,971	8,958	0	359	1,635	1,564	1,144	610	700	203	3,612
4.	Gunungpati	13,297	8,294	0	127	1,862	1,996	1,568	391	1,257	143	1,592
5.	Banyumanik	215	314	0	12	3,453	12,144	1,572	350	12,297	4,328	8,017
6.	Tembalang	815	1,274	0	89	10,447	7,774	1,084	829	8,006	787	1,844
7.	Pedurungan	1,389	3,150	0	521	16,503	8,574	2,632	2,207	7,944	1,024	14,209
8.	Genuk	3,776	2,711	5	158	8,173	3,066	1,733	340	985	258	14,978
9.	Gayamsari	46	133	34	617	8,968	6,848	1,274	755	3,280	741	5,866
10.	Candisari	0	0	0	420	5,298	7,997	5,678	1,629	5,979	1,984	5,644
11.	Gajahmungkur	0	0	0	349	3,210	2,835	1,371	1,779	9,166	5,279	20,178
12.	Semarang Selatan	0	0	0	455	8,086	6,478	3,511	708	8,767	2,627	5,069
13.	Semarang Tengah	0	0	0	1,827	4,203	3,531	6,525	1,253	3,315	1,646	20,562
14.	Semarang Timur	0	0	0	1,237	12,831	3,870	5,849	2,283	4,463	2,359	15,232
15.	Semarang Utara	0	2	2,536	1,559	22,416	7,140	5,508	3,874	8,629	3,885	38,225
16.	Semarang Barat	68	502	80	861	16,065	4,450	4,304	2,142	8,596	3,067	53,806
Total (Kota Semarang)		32,568	37,050	2,894	9,545	133,188	84,697	47,535	20,189	86,374	29,476	220,316

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang

TABEL IV.6.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN DI
KOTA SEMARANG TAHUN 1998

No.	Mata Pencaharian	PETANI	BURUH	NELA-	PENGU-	BURUH	BURUH	PEDA-	ANGKU-	PNS/	PENSI-	LAIN-
	Kecamatan	SENDIRI	TANI	YAN	SAHA	INDUST	BANGUN	GANG	TAN	ABRI	UNAN	LAIN
1.	Tugu	729	2,176	231		3,147	1,736	1,033	126	572	139	3,889
2.	Ngaliyan	4,667	2,572	0	4,492	10,094	3,914	2,507	1,381	6,614	1,267	19,807
3.	Mijen	4,223	6,698	0	312	6,284	3,897	1,816	456	728	369	4,130
4.	Gunungpati	10,942	8,291	0	214	4,232	3,503	1,650	450	1,320	333	2,548
5.	Banyumanik	1,751	2,720	0	311	14,342	7,412	2,372	2,685	13,391	6,933	18,316
6.	Tembalang	4,660	2,642	0	149	10,962	14,934	3,929	1,153	5,029	2,981	10,604
7.	Pedurungan	1,282	2,907	0	890	19,580	12,735	4,521	3,829	10,765	1,339	11,234
8.	Genuk	3,123	5,703	4	465	8,913	2,715	1,704	725	1,395	400	9,423
9.	Gayamsari	15	29	47	759	8,782	6,519	1,915	309	1,992	793	9,242
10.	Candisari	0	0	0	451	9,499	10,685	8,105	1,774	6,030	4,038	9,306
11.	Gajahmungkur	0	0	0	198	6,011	3,452	2,607	1,876	11,227	4,713	24,242
12.	Semarang Selatan	2	3	0	706	9,741	8,642	4,332	2,056	7,184	3,516	10,302
13.	Semarang Tengah	0	0	0	1,497	5,288	2,638	7,017	914	2,838	1,549	20,338
14.	Semarang Timur	0	0	0	2,322	12,218	4,621	15,153	4,627	3,365	1,176	33,528
15.	Semarang Utara	0	0	2,554	452	25,012	7,169	6,347	3,615	11,468	2,509	46,547
16.	Semarang Barat	12	115	66	867	12,041	4,971	4,345	2,712	8,946	3,046	53,760
Total (Kota Semarang)		31,406	33,856	2,902	14,085	166,146	99,543	69,353	28,688	92,864	35,101	287,216

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang

4.2. Sektor Informal di Kota Semarang

4.2.1. Peranan Sektor Informal dalam Ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang pada tahun 1998 menurut penduduk 10 tahun keatas adalah seperti pada tabel.IV.7 berikut.

TABEL IV.7.
PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN SEMINGGU
YANG LALU DI KOTA SEMARANG ,TAHUN 1998 .

No	Kegiatan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	
	- Bekerja	576.015
	- Mencari Pekerjaan	65.344
2	Bukan Angkatan Kerja	
	- Sekolah	262.309
	- Mengurus Rumah Tangga	208.134
	- Lainnya	70.206
	Total	1.182.008

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah, 1998

Ditinjau dari penduduk yang berumur 10 tahun ke atas menurut ststus pekerjaan utama di Kota Semarang seperti terlihat pada tabel IV.8 berikut :

TABEL IV.8.
PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT
STATUS PEKERJAAN UTAMA DI KOTA SEMARANG TAHUN 1998

Status Pekerjaan	Banyaknya	Keterangan
1	2	3
a. Berusaha Sendiri	105.716	Diduga bekerja pada Sektor Informal = a + b + c = 171.883. Diduga bekerja pada Sektor Formal = d + e = 404.132
b. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tak tetap.	41.570	
c. Pekerja keluarga	24.597	
d. Berusaha dengan menggunakan buruh tetap.	10.148	
e. Buruh/karyawan	393.984	
Jumlah	576.015	

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah, 1998

Pada tabel IV.8. tersebut diatas, diduga bahwa orang yang bekerja di Sektor Informal sebesar 171.883 orang antara kira-kira sebesar 29,8 % terhadap total orang yang bekerja di Kota Semarang.

Dasar pemikiran dari dugaan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, adalah merupakan ciri jenis kegiatan Sektor Informal (Hidayat, 1978 : 8).
- (2). Bekerja dengan status sebagai Pengusaha yang dibantu anggota keluarga/buruh tidak tetap, termasuk dalam ciri sektor Informal(Hidayat, 1978:8). Di dalam Sektor Formal lazimnya tidak mencampur adukkan antara keluarga dan perusahaan (dinas), yang lazim mencampur adukkan antara perusahaan dan keluarga adalah Sektor Informal.
- (3). Bekerja sebagai pekerja keluarga, penjelasannya seperti di atas.

Dari tabel IV.8. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Sektor Informal di Kota Semarang cukup besar di dalam bidang ketenagakerjaan, karena menyerap tenaga kerja sebesar 29,8 % dari total orang yang bekerja di Kota Semarang. Menurut Sethuraman (1981:128), sesuai penelitiannya yang dilakukan di kota-kota negara berkembang termasuk Jakarta, didapatkan bahwa kira-kira 20 s/d 70 persen kesempatan kerja terdapat dalam kegiatan-kegiatan kecil-kecilan yang disebut sektor informal

4.2.2. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Kota

4.2.2.1. Kontribusi Sektor Informal Terhadap Pendapatan Regional.

Di dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa peranan sektor informal dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang peranannya cukup besar, yaitu sekitar 29,8 % terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja, ini berarti bahwa peranannya terhadap bidang ekonomipun cukup besar pula.

Namun demikian seberapa besar kontribusi sektor Informal terhadap pendapatan regional suatu daerah kiranya sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena konsep perhitungan pendapatan regional pada umumnya menggunakan pendekatan arus barang (*commodity flow*), yang berarti bahwa seluruh produksi (barang dan jasa) yang ditimbulkan oleh faktor produksi semuanya dihitung tanpa membedakan faktor produksi yang menghasilkannya, apakah dari sektor formal ataupun sektor informal. Akan tetapi perlu dimaklumi, bahwa di dalam penyajiannya sulit memperinci ke dalam sektor formal dan sektor informal.

Penelitian mengenai sektor informal yang dilakukan oleh Bappeda Tingkat I Jawa Tengah dan Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1982 yang dilakukan di enam daerah termasuk kota Semarang, menunjukkan bahwa di kota Semarang kontribusi sektor informal terhadap perekonomian kota sebesar 8,9 % atau sebesar Rp. 50.890 Juta dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1982 yaitu sebesar Rp. 572.031 Juta.

Melihat maraknya sektor informal, terutama yang bergerak di sektor perdagangan (pedagang kaki Lima), patut diduga kontribusi sektor informal terhadap PDRB juga diperkirakan bertambah. Apabila dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1998 dimisalkan bahwa kontribusi sektor informal tetap, maka kontribusi sektor informal terhadap PDRB Kota Semarang pada tahun 1998 sebesar 8,9 % dari Rp. 6.793.806 Juta, yang berarti sebesar Rp.604.648 Juta.

4.2.2.2. Kontribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi dikenakan kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang sehubungan dengan penggunaan jasa/fasilitas berupa lahan pinggir jalan, trotoar, bahu jalan, kampung-

kampung dan lain-lain yang merupakan milik Pemerintah Kota yang digunakan untuk usaha jualan barang atau pemakaian jasa.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986, penarikan retribusi telah diatur dalam pasal 7. Tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No.13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Sewa Lahan untuk Perdagangan/ Jasa, penarikan retribusi terhadap PKL menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 menjadi tidak berlaku..

Adapun besarnya pendapatan retribusi pemakaian sewa lahan untuk Pedagang Kaki Lima seperti tersebut dalam tabel IV.9. berikut.

TABEL IV.9.
PENDAPATAN RETRIBUSI SEWA LAHAN UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA

Tahun Anggaran	Pendapatan (Rp.)	Keterangan
1996/1997	382.432.450	101 % dar target
1997/1998	396.972.100	95 % dari Target
1998/1999	320.115.000	88 % dari target

Sumber : UPD-PPKL,1998

Terjadinya penurunan pendapat retribusi sebagaimana dalam tabel.IV.9 tersebut, menurut keterangan dari UPD-PPKL karena krisis ekonomi, sehingga PKL enggan untuk membayar retribusi.

4.2.3. Aspek Keruangan Sektor Informal

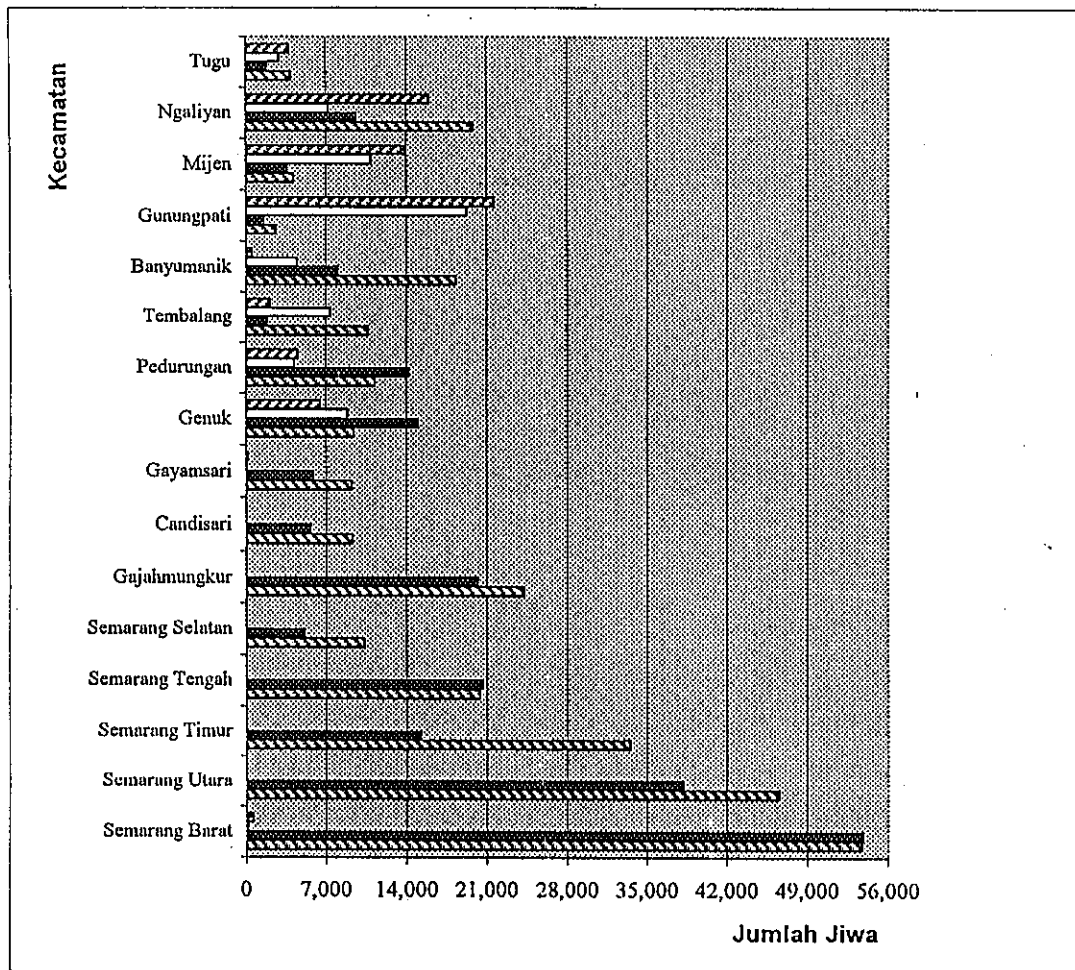
4.2.3.1. Sektor Pekerjaan "Lain-lain" di wilayah pinggiran dan pusat kota

Memperhatikan perkembangan penduduk untuk tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang pada tabel.V.1, Kota Semarang dalam perkembangannya menunjukkan adanya perubahan-perubahan jumlah penduduk baik di pusat maupun di pinggiran kota. Beberapa kecamatan di daerah pusat kota seperti kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah dan kecamatan Semarang Timur mengalami pengurangan penduduk sedangkan di pinggiran mengalami peningkatan penduduk yang lebih kuat seperti kecamatan Ngaliyan,


Gunungpati, Banyumanik dan Mijen. Keadaan tersebut apabila dibandingkan dengan komposisi penduduk menurut mata pencaharian setiap kecamatan dalam tabel. IV.5 dan tabel IV.6 terlihat adanya kecenderungan saling mempengaruhi. Beberapa kecamatan di pinggiran kota seperti kecamatan Ngaliyan, Gunungpati dan Mijen mengalami perubahan yang cukup berarti berupa penurunan kelompok mata pencaharian petani dan buruh tani di satu pihak dan peningkatan pada jenis pekerjaan "lain-lain" di lain pihak. Juga pada jenis-jenis kegiatan kota lainnya menunjukkan peningkatan seperti buruh industri dan pegawai negeri seperti terlihat pada tabel IV.5 dan tabel. IV.6 dan gambar 4.1 Sedangkan komposisi jenis kegiatan penduduk kecamatan-kecamatan kota kurang menunjukkan perubahan yang berarti, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran tipe-tipe kegiatan penduduk berada dalam komposisi ruang yang statis.

Perubahan-perubahan jenis kegiatan penduduk tersebut diatas menggambarkan terjadinya proses "urbanisasi" (pengkotaan) di pinggiran kota yang ditunjukkan adanya perubahan-perubahan komposisi masyarakat petani ke komposisi masyarakat dengan jenis kegiatan kota yang heterogen (Bintarto, 1986:23). Berkembangnya golongan pekerjaan "lain-lain" memberikan indikasi kepada tumbuhnya kegiatan-kegiatan non petani yang berorientasi ke perkotaan yang terkategori sebagai sektor informal. Sedangkan ke arah pusat kota terjadi pengurangan penduduk, tetapi dipihak lain diiringi dengan peningkatan fungsi-fungsi komersial yang merujuk kegiatan sektor-sektor ekonomi kuat, yang menjadi mobilisator terhadap ekonomi kecil yang tumbuh secara spontan di ruang-ruang publik yang biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini ditunjukkan peningkatan yang mencolok kegiatan penduduk dalam kategori "lain-lain" (sektor informal) di kecamatan-kecamatan kota seperti Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Timur dan Semarang Utara. (lihat gambar 4.2 , tabel IV.5 dan tabel. IV. 6).

GAMBAR 4.2.
PERBANDINGAN KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 1993 DAN TAHUN 1998



Keterangan :

 = Mata Pencaharaan Petani , Th. 1993

 = Mata Pencaharaan Petani , Th. 1998

 = Mata Pencaharian Lain-lain, Th. 1993

 = Mata Pencaharian Lain-lain, Th. 1998

4.2.3.2. Persebaran Lokasi Pedagang Kaki Lima

Menurut data yang diperoleh dari UPD-PPKL, jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang pada Tahun 1998 adalah 7.091 PKL yang tersebar hampir di sudut-sudut Kota Semarang yang berjumlah 97 lokasi baik untuk waktu usaha siang maupun malam. Jumlah Pedagang Kaki Lima dan lokasi persebarannya tersebut pada tahun 2000 ini menurut UPD-PPKL dengan adanya krisis ekonomi, diperkirakan meningkat dengan pesat yaitu lebih 10.000 PKL. Persebaran lokasi dan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang seperti tercantum dalam gambar.3.1 dan tabel IV.10.

TABEL IV.10.
PERSEBARAN LOKASI DI KOTA SEMARANG

NO	LOKASI PKL	JUMLAH PKL
	Rayon Semarang Utara	
1	Jl. Yudistiro	14
2	Jl. Abimanyu Raya	29
3	Jl. Imam Bonjol	37
4	Jl. Hasanuddin	62
6	Kp. Grobogan	32
6	Jl. Agus Salim	69
7	Jl. Ronggowarsito (m)	57
8	Jl. Mpu Tantular	159
9	Sekitar Kantor Pos Besar	18
10	Jl. Sandowo	18
11	Jl. Inspeksi (Berok)	20
12	Jl. Kenari	14
13	Jl. Progo	145
14	Kp. Pemali	36
15	Jl. Citarum Selatan	41
16	Jl. Ciliwung	26
17	Jl. Citandui	29
18	Sebelah Timur Sawah Besar	11
19	Sendang Indah	72
20	Jl. Padi Raya	24
21	Jl. Padi Tengah / Genuk Indah	77
22	Jl. Dr. Cipto	46
23	Jl. MT. Haryono (m,s)	120
24	Jl. Pattimura	58

lanjutan tabel.4.10.

No	LOKASI PKL	JUMLAH PKL
Rayon Semarang Selatan		
25	Jl. Dr. Sutomo	139
26	Jl. Dr. Kariadi	76
27	Jl. Kelud / Sampangan (m)	54
28	Jl. Papandayan	11
29	Jl. Malabar	14
30	Jl. Kawi	19
31	Jl. Wilis	12
32	Jl. Setyobudi (Gombel)	22
33	Jl. Ngesrep	24
34	Jl. Bukitsari	30
35	Jl. Spondol	24
36	Jl. Sukun	21
37	Perumnas Banyumanik	46
38	Jl. Perintis Kemerdekaan	30
Rayon Semarang Tengah		
39	Jl. Gang Baru I dan II	473
40	Jl. Depok (m)	59
41	Jl. Gajahmada	24
42	Jl. Karang Kembang	75
43	Jl. Seteran	77
44	Jl. Moch. Suyudi	10
45	Kp. Prembaen	190
46	Ps. Widosari	65
47	Jl.Simp.V-Pahlawan I dan II	79
48	Jl.Simp.V-Pahlawan III dan IV	45
49	Jl. KH. Ahmad Dahlan	52
50	Jl. Pandanaran II	33
51	Jl. Menteri Supeno I	16
52	Jl. Kusumawardani	31
53	Depan. RS. Roemani	16
54	Jl. Hayam Wuruk	55
55	Jl. Pemuda (m)	40
56	Jl. Tri Lomba Juang	8
57	Jl. Imam Barjo	49
58	Taman Singosari	3
59	Jl. Siwalan / Gayam	7
60	Jl. Erlangga (m)	8

Lanjutan tabel 4.10

NO	LOKASI	JUMLAH P.K.E
Rayon Semarang Barat		
61	Jl. Kokroso	486
62	Jl. Kokroso (taman)	258
63	Jl. Puspwarno Raya	59
64	Jl. Purpogiwang Barat	78
65	Jl. Puspogiwang Timur	33
66	Jl. Puspanjolo Barat	9
67	Jl. Puspanjolo Timur	19
68	Jl. Simongan	86
69	Bongsari (s)	77
70	Bongsari (m)	69
71	Jl. WR. Supratman	101
72	Jl. Simongan	86
73	Jl. Abdul Rahman Saleh	18
74	Jl. Untuk Suropati	34
75	Jl. Subali Raya	32
76	Jl. Gatot Subroto	32
77	Jl. Ngaliyan	60
78	Jl. Muradi	25
Rayon Semarang Timur		
79	Jl. Barito	1.051
80	Jl. Bugangan Raya	105
81	Jl. Bugangan Regol	177
82	Jl. Sidodadi Timur	32
83	Jl. Maluku	60
84	Kp. Yusup	69
85	Jl. Stadion (Utara, Timur dan Selatan)	159
86	Jl. Karangkebon	16
87	Jl. Kanal Timur	127
88	Taman Sompok	6
89	Selatan Metro Palace	85
90	Jl. Tandang Raya	38
91	Jl. Gajah	51
92	Jl. Majapahit	115
93	Perumnas Tlogosari	104
94	Kp. Rogojembangan	17
95	Jl. Bumi Wana Mukti	42
96	Jl. Kartini	108
97	Jl. Unta Raya	103
JUMLAH TOTAL		7.091

Sumber : UPD-PPKL, 1998

4.2.3.3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kondisi lokasi PKL, dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian, baik dari kondisi jalan, penggunaan lahan, kegiatan penduduk dan kegiatan PKL pada lokasi terpilih yaitu Jl. Kokroso, Jl. Simongan/Bongsari, Jl. Empu Tantular, Jl. Citarum-Jl. Progo, Jl. Sekitar Stadion Diponegoro, Jl. Bugangan Raya, Jl. Dr. Karyadi, Jl. Simpang Lima-Jl. Pahlawan-Jl. Ahmad Dahlan.

(1). Lokasi Jl. Kokroso

Lokasi PKL pada jalan ini terdapat dua konsentrasi PKL yaitu lokasi PKL yang menempati lahan bantaran Sungai Banjir Kanal Barat, tepatnya pada ujung jalan sisi sebelah barat Jl. Kokroso dekat dengan pertemuan dengan Jl. Indraprasta sampai dengan persimpangan Rel Kereta Api, dan lokasi yang satunya lagi adalah pada sisi sebelah kanan Jl. Kokroso yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi pertama.

Kualitas jalan merupakan jalan aspal *hotmix* dengan kondisi yang cukup baik dengan panjang kurang lebih 1,7 km dengan lebar 4 m. Ditinjau dari klasifikasi jalan merupakan jalan yang tergolong jalan lokal sekunder. Sistem arus lalu lintas pada jalan ini merupakan arus dua arah. Untuk mencapai lokasi PKL ini dapat menggunakan angkutan kota A-26 dan A-27 atau angkutan-angkutan umum yang menuju Jl. Indraprasta.

Penggunaan lahan kawasan yang berdekatan lokasi PKL secara umum didominasi sebagai kawasan pemukiman. Aktivitas kegiatan pada kawasan yang tidak terlalu jauh dengan lokasi PKL adalah adanya industri yang memproduksi garam, dan pembasmi hama serta beberapa industri kecil lainnya. Disamping itu terdapat tiga fasilitas pendidikan (SMK).

Sedangkan jenis dagangan terlihat adanya dominasi pada alat-alat rumah tangga dan perkakas pertanian alat elektronik baik bekas maupun baru, tetapi kebanyakan adalah barang bekas.

(2). Jl. Simongan- Bongsari.

Lokasi PKL pada jalan ini terutama yang terkonsentrasi pada pertemuan dengan ujung Jl. Pamularsih menempati lahan kosong dan di bahu jalan, dan yang lain di pinggir jalan pada Jl. Simongan ke arah barat. Lokasi PKL di Bongsari ini sering disebut sebagai “pasar krempyeng” yang sudah mulai berjualan waktu pagi hari sampai siang hari. Jenis dagangan didominasi pada jenis dagangan untuk kebutuhan dapur atau grabadan dan sayur-sayuran.

Kualitas jalan merupakan jalan aspal *hotmix* dengan kondisi yang cukup baik dengan panjang kurang lebih 1,2 km dengan lebar 7 m. Ditinjau dari klasifikasi jalan merupakan jalan yang tergolong jalan arteri sekunder. Sistem arus lalu lintas pada jalan ini merupakan arus dua arah. Untuk mencapai lokasi PKL ini dapat menggunakan angkutan kota A-20 dan A-21 serta dengan Bus Kota B-22 dan B-44.

Penggunaan lahan kawasan yang berdekatan lokasi PKL secara umum didominasi sebagai kawasan pemukiman. Aktivitas kegiatan pada kawasan dekat dengan lokasi adalah Kantor Kelurahan Bongsari, sarana pendidikan SD/SMP dan yang tidak terlalu jauh yaitu kearah selatan dari lokasi PKL, STIE Dharmaputra di Jl. Pamularsih dan masih termasuk dalam kelurahan Bongsari dan kelurahan Ngeplak Simongan adalah adanya kegiatan industri sedang dan besar seperti tekstil, sirup dan kecap, kayu olahan dan kaleng .

(3). Jl. Citarum dan Jl. Progo

Lokasi PKL pada Jl. Citarum terletak diatas selokan/trotoar pada sisi selatan jalan mulai dari ujung jalan pertemuan dengan Jl. Dr. Cipto sampai depan Rumah Sakit Panti Wiloso. Sedangkan jenis dagangan adalah kebanyakan barang-barang bekas baik perkakas rumah tangga, onderdil dan elektronik, sedang untuk lokasi PKL yang terletak didepan Rumah sakit Panti Wiloso adalah warung makan. Untuk lokasi Jl. Progo adalah pada ujung pertemuan dengan Jl. Widoharjo sampai Taman Progo yang menempati bahu jalan dengan dominasi dagangan adalah kebanyakan barang bekas onderdil, elektronik, alat-alat sepeda, kunci-kunci dan baut.

Dilihat dari kualitas jalan, Jl. Citarum merupakan jalan dengan aspal *hotmix* dengan lebar 6 meter termasuk dalam klasifikasi jalan arteri sekunder. Sedangkan Jl. Progo merupakan jalan kampung dengan kualitas jalan aspal penetrasi. Angkutan umum yang lewat di Jl. Citarum relatif sedikit yaitu dilalui oleh bis kota B-40,B-41 dan B-45.

Dominasi lahan pada kawasan di sekitar Jl. Citarum adalah untuk pemukiman, namun terdapat aktivitas yang penting yaitu di Jl. Senjoyo yang relatif dekat dengan Jl. Citarum adalah adanya perusahaan yang memproduksi textil.. Aktivitas lainnya adalah adanya Rumah Sakit Pantiwiloso

(4). Jl. Dr. Cipto

Lokasi PKL di Jl. Dr. Cipto menyebar pada lokasi-lakasi tertentu, yang kebanyakan di sekitar pemberhentian bus (*halte*), jembatan penyeberangan dan pada ujung jalan pertemuan dengan Jl. Citarum. Kebanyakan PKL disini adalah berjualan kelontong , rokok serta warung makan.

Jl. Dr. Cipto merupakan jalan aspal *hotmix* dengan arus lalu lintas satu arah menuju kearah selatan. Pada jalan ini dilewati oleh bus antar kota dari Terminal Terboyo menuju antara lain ke Yogyakarta dan Solo. Untuk angkutan umum baik angkutan kota dan bus kota cukup banyak lewat di jalan ini.

Aktivitas di dekat lokasi-lokasi PKL disamping para penumpang yang menunggu angkutan adalah dekat kawasan perdagangan pada Jl. Dargo. Dominasi lahan pada Jl. Dr. Cipto adalah merupakan kawasan campuran.

(5). Jl. Bugangan Raya

Lokasi PKL pada jalan ini terletak pada ujung jalan pertemuan dengan Jl. Dr. Cipto yang menempati diatas trotoar. Jenis dagangan pada lokasi ini cukup beragam, seperti grabadan, pakaian, onderdil bekas, koran/majalah, jasa las, reparasi sepeda, afdruk foto, penjahit dan lain-lain. Jalan ini beraspal *hotmix* dengan panjang kurang lebih 350 meter termasuk kualifikasi jalan lokal sekunder. Pada jalan ini tidak dilalui oleh angkutan umum, tetapi mudah diakses dengan angkutan umum yang melalui Jl. Dr. Cipto. Dominasi lahan secara umum adalah kawasan pemukiman. Aktivitas di dekat lokasi PKL yaitu terdapat Rumah Sakit Bersalin "Kusuma".

(6). Sekitar Stadion Diponegoro

Lokasi PKL pada kawasan ini terkonsentrasi melingkari tembok Stadion Diponegoro dengan variasi dagangan seperti warung makan, penjual buku, reparasi sepeda, penjual besi rongsok. Sedangkan pada Jl. Mangunsarkoro kebanyakan adalah penjual makanana/minuman (warung makan). Ada juga yang menjual klontong, jasa afdruk foto dan tukang kunci. Baik lokasi PKL yang melingkari Stadion Diponegoro dan Jl.

Mangunsarkoro lahan yang ditempati adalah diatas trotoar. Dari segi kualitas jalan merupakan aspal *hotmix* dan termasuk dalam klasifikasi jalan lokal sekunder. Pada lokasi ini tidak terdapat angkutan penumpang umum melewati, namun dapat diakses dengan angkutan yang melewati Jl. A.Yani.

Adapun aktivitas yang terwadahi di sekitar lokasi ini adalah adanya perkantoran antara lain Kantor BPN Propinsi Jawa Tengah, BPN Kota, Kanwil Ciptakarya, Kantor Pajak Semarang Timur, Depnaker Propinsi Jawa Tengah serta beberapa kegiatan pendidikan seperti SMU 17 Agustus, SMU dan STIA Walisongo.

(7). Kawasan Simpang Lima

Jl. Simpang Lima merupakan jalan yang mengelilingi Lapangan Pancasila dan merupakan persimpangan jalan yang mempertemukan Jl.Pandanaran, Jl. Gadjahmada, Jl. Ahmad Dahlan dan Jl. Ahmad Yani. Lokasi PKL yang dominan adalah yang berjualan pada malam hari dengan dominasi jenis dagangan adalah jenis makanan/minuman dan sebagian adalah berjualan seperti dompet, ikat pinggang, topi, kaset, poster terutama pada trotoar sekeliling lapangan.

Simpang Lima dikelilingi oleh aktivitas komersial, peribadatan, perkantoran. Kawasan komersial seperti Citraland pada sisi utara, disebelah timur adalah pusat perbelajaan Matahari, disebelah selatan pusat perbelajaan Super Ekonomi dan sebelah barat adalah pertokoan Gajah Mada Plasa dan gedung bioskop serta Masjid Baiturrahman.

(8). Jl. Empu Tantular

Lokasi PKL di Jl. Empu Tantular terletak pada penggalan dari Jl. Agus Salim sampai jembatan Berok, pada sisi sebelah timur Kali Berok. Lokasi PKL menempati bahu

jalan. Pada sisi jalan sebelah barat jalan lokasi PKL memanjang dari jembatann Berok sampai Jl. Agus Salim. Sedangkan pada sisi timur jalan, lokasi PKL dari ujung pertemuan dengan Jl. Agus Salim sampai ke pangkalan (“terminal tiban”) angkutan kota yang menempati pada ujung Jl. Sendowo didepan Kantor PUSKOPAD Kodam IV Diponegoro. Jenis dagangan PKL yang berjualan disini beragam seperti makanan/minuman, pakaian, sepatu/sandal/tas, klontong dan lain-lain.

Lokasi PKL ini cukup strategis karena terletak pada kawasan perdagangan, yaitu dekat dengan Pasar Johar dan pusat perbelajaan Matahari. Untuk menuju lokasi ini dengan angkutan kota sangat mudah karena lokasi PKL dekat dengan pangkalan angkutan kota.

(9). Jl. Dr. Karyadi

Lokasi PKL pada jalan ini yang menempati di atas trotoar sebelah timur jalan memanjang dari ujung pertemuan dengan Jl. Veteran sampai kira-kira sepanjang 50 m keutara, jenis dagangan pada lokasi ini didominasi oleh makanan/minuman. Disamping itu terdapat PKL yang berjualan menempati bahu jalan sisi barat pada pertemuan dengan Jl. Veteran yang didominasi oleh pedagang buah-buahan. Dilihat dari kualitas jalan merupakan jalan aspal *hotmix* dengan panjang kurang lebih 500 m dan lebar 6 m Sedangkan angkutan umum penumpang yang melewati jalan ini cukup banyak baik angkutan kota maupun bus kota. Aktivitas utama kawasan sekitar lokasi adalah adanya Rumah Sakit Dr. Karyadi.

4.3. Kebijakan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia diatur untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangan lebih lanjut Kota Semarang diperluas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Walikota Semarang menata dan mengatur wilayahnya. Penataan dan perencanaan pembangunan fisik kota Semarang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 tentang rencana Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000. Dalam Rencana tersebut telah diatur mengenai peruntukan dan penggunaan tanah, dimana telah ditetapkan, bahwa ada daerah-daerah yang yang memang dipersiapkan untuk menjadi wilayah-wilayah bagi kegiatan yang bersifat komersial, antara lain adalah kawasan perdagangan.

Keterbatasan daya tampung sektor formal dalam menyerap tenaga kerja, ditambah dengan munculnya kebutuhan masyarakat akan tersedianya tempat usaha seperti kios-kios, warung atau hal-hal semacam itu telah mendorong tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL) yang bertebaran di hampir semua sudut kota Semarang.

Fenomena PKL ini telah ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Semarang yang bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan menghindari seminimal mungkin timbulnya segi-segi negatif melalui suatu kebijakan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, Walikota membentuk instansi khusus yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima , instansi tersebut adalah Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD-PPKL) dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 18 Maret 1991 Nomor.511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pedagang Kaki Lima Kotamadaya Dati II Semarang.

Setelah UPD-PPKL terbentuk, untuk pertama kalinya Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1991 nomor. 511.2/368/1991 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Lokasi-lokasi yang ditetapkan terletak pada trotoar-trotoar dan tepi-tepi jalan dengan luas area dan waktu usaha yang telah ditetapkan yang terdiri dari 52 lokasi. Semakin bertambahnya PKL dari tahun ke tahun Pemerintah Kota menambah jumlah lokasi-lokasi yang diijinkan yaitu menjadi 114 lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 2 Maret 1994 nomor 511.2/160/1994 dan terakhir pada tahun 1999 lokasi-lokasi yang diijinkan bertambah lagi menjadi 129 lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota tanggal 6 Maret 1999 nomor 511.3/367/1999. Disamping itu Pemerintah Kota juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan untuk Perdagangan/jasa, dimana para pedagang kaki lima termasuk diantaranya yang terkena retribusi sewa lahan.

BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN LOKASI USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

5.1. Identifikasi Karakteristik PKL

5.1.1. Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur

Menurut teori *human capital*, kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan ketrampilan (keahlian) yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan menurut Rusli Ramli (1992) tingkat pendidikan dan kelompok umur para PKL berpengaruh pada pola-pola sosialisasi di perkotaan. Hal ini karena tingkat pendidikan memberi pengaruh terhadap kemampuan berpikir, beradaptasi dan bereaksi dengan lingkungan barunya, sedangkan umur akan memberi pengaruh kepada kemampuan fisik PKL dan adaptasi terhadap pola-pola sosial budaya baru. Semakin tua seseorang ada kemungkinan semakin lebih mempertahankan pola sosial budaya lama .

Dari penelitian ini didapat bahwa tingkat pendidikan PKL, kebanyakan hanya pernah mengenyam pendidikan beberapa tahun, yaitu baik yang mampu tamat SD maupun tidak berhasil sampai menamatkan sampai tingkat SLTP sebanyak 62,9 %, selanjutnya tercantum dalam tabel V.1.

TABEL V.1.
PROPORSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan PKL	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah,Tidak Tamat SD,Tamat SD	51	37,8 %
2	Tidak tamat SLTP,Tamat SLTP	34	25,2 %
3	Tidak tamat SLTA,Tamat SLTA	46	34,1 %
4	Lainnya (perguruan tinggi)	4	3 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dalam hal usia, kebanyakan PKL termasuk kelompok usia produktif. Kelompok usia sampai 40 tahun tercatat sebanyak 50,4 %. Kenyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sethuraman (1981:191) yang mengemukakan bahwa masyarakat yang terlibat di sektor informal pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan kebanyakan dalam usia kerja produktif (*prime age*). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sektor informal mempunyai peranan besar dalam menyerap tenaga kerja produktif dengan pendidikan rendah di perkotaan.

TABEL V.2.
PROPORSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT USIA

No	Struktur Umur (Tahun)	Frekuensi	Prosentase
1	< 30	27	20,0 %
2	30 – 40	43	31,9 %
3	41 – 50	49	36,3 %
4	> 50	16	11,8 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

5.1.2. Daerah Asal PKL dan Latar Belakang PKL

Pengkajian daerah asal PKL dimaksudkan untuk dapat mengetahui siapa sebetulnya yang menjadi PKL. Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa umumnya PKL terdiri dari para migran (Manning dan Effendi, 1985).

Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat pada PKL yang menjadi responden pada penelitian ini. Ditemukan 56,3 % dari responden PKL merupakan pendatang (migran) ke kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini didapatkan komposisi PKL berdasarkan daerah asalnya seperti yang terlihat pada tabel V.3.

**TABEL V.3.
DAERAH ASAL PKL**

No	Daerah Asal Pedagang	Frekuensi	Prosentase
1	Semarang	59	43,7 %
2	Luar Semarang	76	56,3 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dari tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa para PKL sebagian statusnya sebagai pendatang dari luar Semarang, yaitu sebesar 56,3 %. Asal daerah PKL antara lain dari Demak, Grobogan, Pati, Pekalongan, Madiun, Kebumen, Tegal, Sragen, Boyolali, Yogyakarta, Salatiga, Ungaran, Klaten, Jepara, Solo, Wonosobo, Bandung, Jakarta yang dari luar Jawa dari Palembang, Ujung Pandang.

Dari angka tersebut berarti sesuai dengan literatur, seperti yang dikemukakan Hugo dalam Tadjuddin (1995:209) mengatakan bahwa tekanan-tekanan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan di pedesaan yang belum mengalami perubahan,

bahkan ada kecenderungan yang makin meluas. Kondisi ini telah mendorong sebagian tenaga kerja dari pinggiran bermigrasi permanen ataupun sirkuler ke pusat untuk mencari pekerjaan. Bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa masuk ke sektor informal, dan usaha yang paling mudah dimasuki adalah sebagai pedagang eceran (Sethuraman, 1981:52,130).

Alasan PKL hingga meninggalkan daerah asalnya, dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.4.

TABEL V.4.
ALASAN PKL MENINGGALKAN DAERAH ASAL

No	Alasan Meninggalkan Desa Asal	Frekuensi	Prosentase
1	Di desa/tempat asal sudah tidak ada lahan pertanian	8	10,5 %
2	Lahan pertanian yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan	14	18,4 %
3	Di desa/tempat asal penghasilan kurang	18	23,7 %
4	Di desa/tempat asal tidak ada pekerjaan	36	47,4 %
	Jumlah	76	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Menurut teori dorong-tarik dalam migrasi oleh Everret Lee (dalam Mantra, 1985:181) faktor kesempatan kerja di kota merupakan faktor daya tarik positif yang menarik orang pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga menurut teori migrasi Todaro (Todaro 1994:23), keputusan untuk migrasi dari desa ke kota tergantung pada perbedaan upah riil yang diharapkan antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang sebenarnya dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan. Menurut Gilbert dan Gugler (1996:60) penelitian selama dua dekade menunjukkan bahwa mayoritas penduduk melakukan migran adalah karena alasan ekonomi.

Sedangkan alasan mengapa mereka memilih Kota Semarang sebagai tujuan migrasi yang tercatat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adalah sebagian besar

mereka menganggap di kota Semarang ada kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja (56,6 %).

TABEL V.5
ALASAN MEMILIH KOTA SEMARANG SEBAGAI TUJUAN

No	Alasan Memilih Kota Semarang	Frekuensi	Prosentase
1	Di kota Semarang ada kesempatan kerja	43	56,6 %
2	Ada famili di kota	26	34,2 %
3	Jarak dari tempat asal cukup dekat	7	9,2 %
	Jumlah	76	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Penelitian Sethuraman (1981:191) menyebutkan bahwa para migran dalam sektor informal ini kebanyakan sebagai penganggur sebelum mengadakan migrasi. Kecenderungan tersebut juga nampak dari hasil penelitian ini dimana sebanyak 28,9 % pendatang yang menjadi PKL adalah mereka yang semula sebagai penganggur (tidak bekerja), seperti terlihat pada tabel V.6.

TABEL V.6.
PEKERJAAN SEMULA PARA PKL

No	Pekerjaan semula	Frekuensi	Prosentase
1	Petani, pemilik sendiri	13	17,1 %
2	Buruh tani	18	23,7 %
3	Petani penggarap	9	11,8 %
4	Lainnya	14	18,4 %
6	Tidak bekerja	22	28,9 %
	Jumlah	76	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Melihat tabel V.4, tabel V.5 dan tabel V.6 dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menarik PKL ke kota adalah faktor pekerjaan. Pada akhirnya tujuan mencari

kerja itu berorientasi pada pencapaian penghasilan, maka hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rachbini dan Hamid (1994; 114) yang berpendapat bahwa akibat lahan pertanian di pedesaan semakin menyempit dan upah yang diterima petani tidak memadai/mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagai akibat konsentrasi lahan pertanian dikuasai oleh golongan elit di desa telah mendorong penduduk untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga menurut Sethuraman (1981: 184), yang mengatakan bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan penghasilan yang diharapkan. Walaupun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan, tetapi setidaknya para migran tersebut sudah mendapatkan pilihan yang lebih banyak terhadap pekerjaan di kota dibandingkan dengan desa tempat asalnya. Hal ini tercermin dengan adanya fasilitas yang terdapat di kota yang dapat menampung tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan keadaan desa.

Implikasi dari kecenderungan tersebut adalah terjadinya hubungan yang kuat antara PKL dengan migrasi. Dengan demikian, selagi masih terjadi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa-kota, maka selama itu pula masih akan terjadi arus migrasi desa-kota yang merupakan sumber bagi muka-muka baru PKL.

5.1.3. Motivasi Responden Menjadi PKL

Mengenai alasan responden termotivasi menjadi PKL, ada beberapa kemungkinan. Penelitian ini mencatat bahwa alasan menjadi PKL adalah karena memberikan pendapatan (hasil) yang relatif cukup (48,9 %) dan adanya kesulitan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan/ketrampilan yang dimiliki (25,9 %). Sedang alasan karena PHK ada 5,9 % selanjutnya seperti pada tabel V.7

TABEL V.7.
ALASAN MENJADI PKL

No	Alasan menjadi PKL	Frekuensi	Prosentase
1	Karena dapat memberi hasil yg cukup	66	48,9 %
2	Karena sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan/ketrampilan	35	25,9 %
3	Karena di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari pekerjaan semula	8	5,9 %
4	Karena dapat berpindah-pindah dengan cepat	6	3,7 %
6	Karena tidak perlu banyak modal	21	15,6 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Menurut Agus Salim (2000) dari Dewan Riset Daerah Jawa Tengah yang melakukan penelitian mengenai PKL di Semarang, Surakarta dan Tegal, sebagian besar PKL yang berstatus baru di kota Semarang berasal dari keluarga korban PHK dari berbagai perusahaan swasta di Kota Semarang dan hanya sebagian kecil yang berasal dari luar kota. Mereka rata-rata berjualan minuman (jenis the poci) dan makanan yang diujakan dengan tenda-tenda darurat.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa responden merasa termotivasi menjadi PKL antara lain karena bidang usaha itulah yang dapat mereka kerjakan dan memberikan pendapatan yang relatif cukup. Selain dari itu dari penelitian ini juga mencatat bahwa menjadi PKL bagi mereka adalah merupakan pekerjaan tetap (91,9 %) artinya bahwa menjadi PKL ini merupakan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, dimana menurut Maslow merupakan pemenuhan kebutuhan tingkat pertama. Disamping itu menurut responden, mereka merasa bahwa usaha yang dilakukan saat ini adalah sesuai dengan yang diinginkan, terbukti dengan jawaban

responden yang tidak ingin pindah pekerjaan (90,4 %), dan lamanya mereka menekuni sebagai PKL yaitu 0 – 3 tahun (21,5 %), 4 – 7 tahun (22,2 %), 8 – 10 tahun (23 %) , 11 – 15 tahun (21,5 %). Walaupun demikian, 9,6 % responden masih ingin pindah pekerjaan adalah untuk peningkatan pendapatan dan kesesuaian dengan pendidikan/ketrampilan yang dimiliki. Tampaknya pekerjaan yang diinginkan adalah mengarah ke jenis pekerjaan formal.

5.1.4. Jenis Usaha dan Modal Kerja

Jumlah PKL di kota Semarang menurut hasil pendataan UPD-PPKL kota Semarang tahun 1998 adalah sekitar 7.091 pedagang. Dengan jumlah terbanyak adalah pedagang makanan/minuman sebanyak 2.208 pedagang (31,1 %), pedagang non makanan seperti kelontong, onderdil, elektronik, rokok, mainan, kebutuhan dapur, hasil bumi/sayuran/buah-buahan, pakaian, barang bekas, sepatu bekas, pakaian bekas, tanaman/pot, barang, makanan burung, sangkar buah, kaset, majalah/kaset/buku, dan lain-lain sebanyak 4.398 pedagang (62,1%) sedangkan penjual jasa sebanyak 485 pedagang (6,84 %). Dari data tersebut jenis usaha yang terbanyak dilakukan oleh PKL di unit-unit usaha makanan-minuman. Hal tersebut dapat diduga oleh karena unit-unit usaha tersebut merupakan unit usaha yang fleksibel ditinjau dari sudut permodalan, syarat ketrampilan, pemasaran serta kebutuhan masyarakat sehari-hari sebagai ciri-ciri sektor informal (Hidayat, 1978 : 10).

Adapun jenis kegiatan usaha PKL yang menjadi sampel pada 10 lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel V.8.

TABEL V.8.
RESPONDEN PKL BERDASARKAN JENIS USAHA

No	Jenis Usaha PKL	Frekuensi	Prosentase
1	Makanan-minuman	40	29,63 %
2	Non makanan-minuman	86	63,70 %
	- Kelontong	19	
	- Alat/onderdil bekas	32	
	- Pakain,sepatu bekas	2	
	- Bensin	1	
	- Koran,helm,dompot,pigura	3	
	- Rokok	7	
	- Buah-buahan	3	
	- Kebutuhan Dapur/ Grabadan	6	
	- Konveksi	6	
	- Tas, sepatu/sandal	3	
	- Buku	1	
3	J a s a	9	6,67 %
	- Reparasi TV,sepeda	3	
	- Afdruk foto	2	
	- Las,penjahit,tambal ban, tk.kunci	4	
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Berdasarkan pengamatan dilapangan terlihat adanya pengelompokan PKL pada jenis dagangan tertentu, seperti misalnya barang-barang bekas seperti elektronik, onderdil sepeda , perkakas rumah tangga dan jenis dagangan makanan/minuman serta kelontong. Sarana permodalan merupakan kebutuhan utama bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya baik pada saat awal memulai usaha, pada saat pengembangan usaha maupun pada saat penurunan usaha. Modal awal berfungsi dalam pembelian peralatan, seperti tempat dasaran, peralatannya dan biaya awal dan lain-lain. Selanjutnya, modal kerja diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha seperti pembelian bahan/barang dagangan dan barang-barang dan biaya-biaya lainnya.

Besar modal awal yang dimiliki oleh PKL bervariasi dari 50.000 rupiah sampai dengan diatas 3 juta rupiah dengan perincian sebagai tersebut pada tabel V.9.

TABEL V.9.
BESAR MODAL PKL

No	Besar Modal (Rupiah)	Frekuensi	Prosentase
1	< 250.000	46	34,1 %
2	251.000 – <500.000	42	31,1 %
3	500.000 – ≤ 1.000.000	32	23,7 %
4	> 1.000.000	15	11,1 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dari tabel V.9 diatas, dapat dilihat besarnya modal awal para PKL tersebut kebanyakan sebesar kurang dari Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000.

Pemilikan modal awal kecil kurang dari Rp. 500.000, umumnya dimiliki oleh pedagang non-makanan, seperti rokok, kelontong, barang bekas. Bila ada yang tergolong pedagang makan/minuman tetapi hanya sebatas penyediaan minuman saja.

Pemilikan modal awal lebih besar Rp. 500.000 umumnya dimiliki oleh PKL yang berdagang makanan/minuman (warung makan) yang membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup banyak.

Rendahnya modal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri sektor informal (Hidayat, 1978 :8), dimana rendahnya modal tersebut antara lain disebabkan kurangnya akses PKL terhadap lembaga-lembaga keuangan formal terutama perbankan. Hal tersebut dikarenakan ; (1) tidak dipunyainya agunan dari PKL; (2) fasilitas modal/kredit yang disediakan cenderung menguntungkan pedagang berskala kuat, walaupun ada paket kredit yang diperuntukkan bagi pedagang kecil belum menyentuh ke PKL; (3) belum adanya “lembaga penjamin dengan sistem kemitraan” dari yang kuat kepada PKL, karena dianggap skala usaha mereka kecil dan bersifat labil.

5.1.5. Sarana Transportasi Yang Digunakan PKL

Sarana transportasi menyangkut cara yang digunakan PKL untuk menempuh jarak dari tempat tinggal ke lokasi atau sebaliknya. Menurut Daljoeni (1997:97) faktor jarak terdiri dari jarak linear dan jarak ekologis. Jarak linear adalah jarak lurus, sedangkan jarak ekologis adalah jarak yang dinilai dengan perhitungan waktu dan biaya untuk menempuhnya.

Sarana transportasi yang digunakan oleh para PKL dari tempat tinggal menuju lokasi tempat kerja akan mempengaruhi pendapatan para PKL, semakin jauh mereka tinggal dari tempat kerja, semakin banyak pengeluaran untuk ongkos transportasi. Menurut Greame Hugo (dalam Rachbini dan Hamid,1994:55) dalam penelitiannya di Bandung dan Jakarta ditunjukkan bahwa sekitar 15 persen pendapatan mereka digunakan untuk pengeluaran transportasi. Untuk menghemat ongkos transportasi tersebut biasanya mereka mencari tempat tinggal yang dekat tempat usahanya, kecenderungan ini mengakibatkan berkembangnya pemukiman-pemukiman kumuh dan padat.

Dalam penelitian ini mencatat, sarana yang digunakan PKL untuk menuju lokasi usaha sebagaimana tersebut dalam tabel V.10.

TABEL. V.10.
SARANA TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN

Sarana Transportasi	Frekwensi	Prosentase
Jalan Kaki	35	25,9 %
Lainnya (Sepeda/Becak)	9	6,7 %
Naik Angkutan Umum	54	40,0 %
Sepeda Motor	37	27,4 %
Jumlah	135	100 %

Sumber: Hasil Analisis, 2000

5.2. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha PKL

5.2.1. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Keramaian Kota

Dalam penelitian ini mencatat bahwa pada umumnya responden berusaha memilih lokasi (menempatkan barang) secara fisik sedekat mungkin dengan calon pembeli. Lokasi-lokasi yang banyak calon pembeli adalah pada tempat dimana terdapat kegiatan-kegiatan kota atau keramaian seperti misalnya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolahan, rumah sakit dan keramaian lainnya. Sedangkan seberapa dekat lokasi-lokasi PKL tersebut dengan tempat kegiatan kota atau keramaian menurut responden sebagaimana terlihat pada tabel V.11. berikut :

TABEL 5.11.
KEDEKATAN LOKASI USAHA PKL DENGAN PUSAT
KEGIATAN/KERAMAIAAN KOTA

Jarak	Frekwensi	Presentase (%)
< 100 m	50	37,1 %
100 m – 500 m	52	38,6 %
> 500 m	33	24,4 %
Jumlah	135	100,0 %

Sumber: Hasil Analisis, 2000

Terlihat kebanyakan responden menjawab bahwa jarak lokasi PKL dengan tempat kegiatan / keramaian kota adalah kurang dari 100 m (37,1%) dan antara 100 m s/d 500 m (38,5%). Hal ini menunjukkan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Kawasan perdagangan yang merupakan tempat yang banyak orang yang hilir mudik seperti di Jl. Empu Tantular yang dekat dengan kawasan perdagangan Johar, atau tempat untuk perkantoran dan sekolahan seperti di Jl. Mangunsarkoro sekitar Stadion Diponegoro dan

juga Jl. Karyadi yang dekat Rumah Sakit , dimana banyak calon pembeli potensial. Aspek Kedekatan (*proximity*) dengan sektor formal ini kiranya menunjukkan keinginan dari para PKL untuk beraglomerasi baik aglomerasi pada kegiatan-kegiatan serupa maupun aglomerasi karena saling menunjang (komplementer).

Hal tersebut tidak terlepas adanya keterkaitan antara sektor formal dan sektor informal. Makin berkembang sektor formal, makin berkembang pula sektor informal (Eko Budiharjo, 1993:54). Demikian juga menurut Sri Edi Swasono (dalam Rachbini, 1994:92) yang mengatakan bahwa secara struktural dapat dikatakan bahwa kehadiran sektor informal dibutuhkan atau sebagai penyangga sektor formal dan Miftah Wirahadikusuma (1991:31) yang mengatakan bahwa sektor informal sebagai bumper sektor kapitalis, sektor informal disamping mempunyai fungsi produksi juga fungsi konsumsi.

5.2.2. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal Pedagang

Turner (1972:167) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah, memilih rumah tinggal dekat dengan tempat kerja, dan kelompok atas aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial menduduki prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal.

PKL sebagai kelompok masyarakat yang kebanyakan berpenghasilan rendah (An-naf, 1983:30), sehingga bila teori diatas diaplikasikan dalam penelitian ini, PKL tentunya berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka

Jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.12.

TABEL V.12.
KEDEKATAN LOKASI USAHA PKL DENGAN TEMPAT TINGGAL PKL

Jarak	Frekwensi	Prosentase (%)
< 1 Km	46	34,8 %
1 – 5 Km	64	46,7 %
> 5 Km	25	18,6 %
Jumlah	135	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dari tabel V.12 tersebut terlihat kebanyakan PKL bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi PKL, yaitu pada jarak kurang dari 1 Km (34,8%) dan antara 1 s/d 5 Km (46,7%). Kedekatan dengan rumah tinggal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya para PKL yang menuju lokasi dengan jalan kaki (25,9 %). Kecenderungan PKL memilih lokasi usaha dekat dengan tempat tinggalnya tentunya berkaitan dengan biaya transportasi yang harus ditanggung serta kaitannya dengan bagaimana mereka membawa barang dagangan dan alat-alat yang digunakan.

Dalam penelitian ini terlihat pada responden di Jl. Kokrosono, dimana mereka kebanyakan bertempat tinggal di Kelurahan Krobokan dan Bulu Lor, yang berjarak kurang lebih 1 s/d 2 km dari lokasi tempat kerja. sedangkan PKL di Jl. Simongan - Bongsari, kebanyakan tinggal di Kelurahan Bongsari, PKL di Jl. Citarum-Jl Progo banyak yang tinggal di Kelurahan Mlatiharjo dan Mlatibaru yang dekat dengan lokasi.

Jarak lokasi dengan rumah tinggal ini menurut Rachbini dan Hamid (1994 : 101) dalam penelitiannya mengenai PKL di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal. Pedagang kaki lima akan

bertempat tinggal dimana saja, asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya. Kalau tidak mereka akan dililit masalah ongkos transportasi. Juga menurut Mantra (1985:185) mengatakan bahwa para migran setelah beberapa lama bertempat tinggal didaerah tujuan, mereka cenderung memilih tempat tinggal dekat dengan daerah dimana mereka bekerja. Sedangkan menurut Sugiono Soetomo (1998:10), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dan tempat tinggal, sebagian besar mereka bertempat tinggal kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat kerja.

5.2.3. Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Lokasi

Kemudahan (*conveniencies*) dan kedekatan (*proximity*) dalam suatu wilayah atau kota berfungsi untuk memperlancar pertukaran barang-barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang berjenis-jenis apabila berada dalam suatu wilayah ditumpu dengan sistem angkutan kota akan berkembang dengan lebih pesat (Reksohadiprojo,1994:95). Sedang menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum (beaya,waktu,frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jarak parkir).

Dalam penelitian ini mencatat bahwa hampir semua responden menjawab bahwa di lokasi mudah untuk memperoleh angkutan umum (85,2%) dan dan sedang (14,19%) hanya satu responden yang menjawab bahwa angkutan umum yang lewat dekat lokasi.

UPT-POSTAK-UNDIP

TABEL V.13.
KEMUDAHAN MEMPEROLEH ANGKUTAN UMUM DI SEKITAR LOKASI USAHA PKL.

Kemudahan Angkutan Umum	Frekwensi	Prosentase (%)
- Mudah	115	85,2 %
- Agak sulit	19	14,1 %
- Sulit	1	0,7 %
JUMLAH	135	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000.

Dari tabel V.13 tersebut dapat diketahui bahwa responden kebanyakan menetapkan lokasi usahanya dimana mudah untuk memperoleh angkutan umum. Hal ini disamping lokasi tersebut mudah dijangkau oleh para konsumen, juga merupakan alat transportasi yang kebanyakan dimanfaatkan oleh para PKL untuk menuju lokasi kerja dari tempat tinggal. Di lokasi-lokasi penelitian juga terlihat bahwa pada lokasi-lokasi tersebut banyak dilewati angkutan umum.

- Pada Jl. Simongan/ Bongsari, dilalui oleh jalur angkutan kota dengan nomor A-20, A-21 dan bus kota nomor B-22 , B-44.
- Jl. Kokroso, dilalui oleh jalur angkutan kota nomor A-26 dan A-27. Karena lokasi PKL di Jl. Kokroso ini letaknya dekat dengan pertemuan dengan Jl. Indraprasta, maka lokasi ini juga dapat diakses angkutan yang menuju Jl. Indraprasta, yaitu angkutan kota nomor A-22, A-23, A-24, A-25, A-28 dan A-29.
- Jl. Dr. Kariyadi dilalui oleh jalur angkutan kota dengan nomor A-17, A-18, A-19, dan bus kota nomor B-10, B-14A, B18, B21, B32 , B-42
- Jl. Dr. Cipto dilalui oleh jalur angkutan umum dengan nomor A-04, A-05, A-07, A-11, A-13, A-15, dan bus kota nomor B-03, B-08, B-09, B-10, B-13A, B-19A, B-22, B-24, B-30, B-37.

- Jl. Bugangan, lokasi PKL disini memang tidak dilalui angkutan umum, tetapi karena letak lokasinya pada ujung jalan pada pertemuan dengan Jl. Dr. Cipto, maka untuk mengakses lokasi ini dengan angkutan umum cukup melalui angkutan yang lewat Jl. Dr. Cipto.
- Jl. Empu Tantular, lokasinya PKL dekat pangkalan angkutan kota, sehingga hampir semua angkutan kota menuju ketempat ini.
- Kawasan Simpang Lima, Jl. Pahlawan dan Jl. Ahmad Dahlan, banyak dilalui angkutan kota dan bus kota.
- Lokasi di sekitar Stadion Diponegoro, cukup dekat dengan Jl. A. Yani, banyak angkutan kota yang lewat Jl. A. Yani.

Hal tersebut diatas seperti yang dikemukakan oleh Dean Forbes (dalam Manning, 1996:348) dalam penelitiannya mengenai sektor informal PKL di kota Ujung Pandang, bahwa terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi sektor informal PKL dengan jaringan transportasi, dimanan sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

5.2..4. Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi

Seorang pedagang yang akan menjalankan usahanya pada suatu lokasi , yang pertama perlu disadari adalah bagaimana posisi seorang pedagang terhadap pedagang lainnya. Suatu barang yang dipilih untuk diproduksi / dijual bagi seseorang bukan semata-mata masalah bagaimana memproduksi/ membeli barang tersebut dan biaya produksinya tetapi juga mencakup bagaimana menjual produknya. Untuk itu perlu disadari pada bentuk (struktur) pasar yang bagaimana pedagang tersebut berada.

Dalam teori ekonomi (Pass dan Lowes, 1998 : 400), struktur atau bentuk pasar yang dihadapi seorang pengusaha dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut

antara lain jumlah penjual dan pembeli, mudah tidaknya memasuki bidang usaha yang bersangkutan, homogen atau tidaknya sifat dari barang penjual di mata pembeli, tingkat kesempurnaan dari pengetahuan penjual dan pembeli terhadap tingkat harga

Dalam hal jumlah (banyak) penjual sejenis dilokasi penelitian mencatat bahwa sebanyak 53,3 % responden menyatakan jumlah usaha sejenis dilokasinya adalah banyak, sedangkan 28,1 % menyatakan sedang, dan 18,5 % menyatakan sedikit, selengkapnya seperti dalam tabel.V.14.

TABEL V.14.
BANYAK PENJUAL SEJENIS DI LOKASI

Banyaknya Penjual Sejenis	Erekwensi	Prosentase
Sedikit	25	18,6 %
Sedang	38	28,1 %
Banyak	72	53,3 %
Jumlah	135	100 %

Sumber: Hasil Analisis,2000

Disamping itu diketahui bahwa 71,9 % persen responden menyatakan bahwa wilayah operasinya sangat mudah dan mudah dimasuki pengusaha lain. Ditambah lagi 82,2 % dari responden menyatakan bahwa bidang usahanya sangat mudah dan dilakukan orang lain. Kondisi semacam ini dapat diartikan bahwa apabila dari usaha tersebut diperoleh keuntungan yang cukup menarik, maka dalam waktu singkat akan menjadi incaran berbagai pihak untuk ikut memasuki usaha pada lokasi tersebut, apalagi modal yang dibutuhkan untuk beroperasi di bidang usaha ini relatif kecil.

Selanjutnya dalam hal persaingan tercatat bahwa 84,4 % responden menyatakan bahwa persaingan yang mereka hadapi adalah ketat dan sedang. Bentuk persaingan bervariasi, mulai dari bentuk persaingan harga, kualitas, barang beragam, pelayanan dan

bentuk lainnya. Dari jawaban yang masuk dapat dicatat bahwa yang menghadapi persaingan harga adalah terbanyak 41,5 %, persaingan kualitas 20,7 % persaingan dalam keanekaragaman barang yang diusahakan sebanyak 17 %, persaingan dalam bentuk pelayanan 1,9 % dan dalam bentuk lainnya 9,6 %.

Berbagai fakta tersebut tadi memberi indikasi bahwa mobilitas usaha di sektor informal PKL tergolong sangat tinggi dan konsekuensi tingkat persaingan seperti diatas adalah usaha mencari keuntungan di bidang usaha PKL termasuk tidak mudah.

5.3. Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Pedagang Kaki Lima

5.3.1. Kebijakan Pengaturan Ruang Pedagang Kaki Lima

Walikota Semarang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk merencanakan dan menyelenggarakan hal-hal yang dianggap perlu dan penting demi pengembangan kotanya. Tetapi tugas dan wewenang itu tidak secara bebas tanpa pedoman. Adapun pedoman untuk penatan dan pelaksanaan fisik Kota Semarang diatur dalam peraturan –peraturan sebagai berikut.

- 1). Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000;
- 2). Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000.

Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 1990 menjelaskan bahwa pertumbuhan yang terjadi di kota Semarang meletakkan dasar kota Semarang sebagai kota yang berada dalam kedudukan tertinggi dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan menjadi pusat dan kutub pengembangan terutama dalam pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai bagian

Pembangunan Nasional. Selanjutnya dikemukakan bahwa terdapat dua masalah kota Semarang, yaitu masalah regional dan masalah lokal. Masalah lokal, antara lain adalah perkembangan sistem kota Semarang dari zaman Belanda yang berpola radial-sistem dan berpusat pada wilayah komersial Semarang di Johar/Pelabuhan laut ternyata menimbulkan permasalahan penumpukan kegiatan di sektor informal, kepadatan lalu lintas, dan lain-lain.

PKL sebagai salah satu bagian yang menonjol dari sektor informal di kota Semarang, bila mengacu pada penjelasan Peraturan Daerah tersebut, maka PKL termasuk dalam salah satu masalah Kota Semarang, yaitu adanya penumpukan kegiatan di sekitar pusat komersial.

Pada bab VIII dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990, mengenai rencana komponen pengembangan kota, masalah PKL merupakan bagian dari Rencana Pusat-Pusat Kegiatan Kota Semarang, dimana Kota Semarang akan dikembangkan dalam 3 pusat kegiatan yakni Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Pemerintah, Pusat Perdagangan, dan Pusat Kebudayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1). Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Pemerintah dipusatkan pada 2 lokasi, yaitu Sekitar Tugu Muda sepanjang Jl. Pemuda sampai perlimaian Jl. Thamrin-Tanjung-Pemuda-dan Beringin, dan sepanjang Jl. Pahlawan. Kegiatan PKL direncanakan sebagai komponen pendukung bersyarat yaitu sepanjang Jl. Pahlawan dengan ketentuan PKL hanya diperbolehkan berjualan pada malam hari.
- 2). Pusat Perdagangan yang terdiri dari 10 lokasi. Diantara 10 lokasi tersebut kegiatan PKL yang direkomendasi sebagai komponen pendukung adalah 7 lokasi yaitu di

sekitar Pasar Johar, Rejomulyo, Jl. Pemuda dan Jl. Gajahmada; Jl. Pandanaran/Jl A. Yani (Tugu Muda-Simpang Lima-Bangkong); Jl. MT.Haryono-Peterongan; Pasar Bulu-Kalibanteng dan sepanjang Jl. Majaphit. Lokasi sekitar Kota lama kegiatan PKL direkomendasikan sebagai komponen pendukung dengan syarat yaitu berjualan malam hari.

- 3). Pusat Kebudayaan terdiri dari 2 lokasi, yaitu Sekeliling Simpang Lima dan Tegalwareng. Untuk sekeliling Simpang Lima, kegiatan PKL direkomendasikan sebagai komponen pendukung bersyarat malam hari PKL siang hari hanya diperbolehkan jika berada di dalam gedung atau lahan. Sedangkan Tegalwareng kegiatan PKL direkomendasikan sebagai komponen pendukung bersyarat.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai masalah PKL sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tersebut, Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Daerah tersendiri yaitu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan PKL yaitu Peraturan Daerah Nomor. 3 tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan PKL.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :

- Keberadaan PKL adalah suatu kenyataan maka Pemerintah Daerah menaruh perhatian untuk menampung usaha tersebut serta memberikan penyuluhan dan pembinaan usahanya;
- Pengaturan PKL dimaksudkan untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak bagi usahanya dan menjadikan sektor usaha PKL sebagai suatu usaha yang lebih produktif dalam membangun perekonomian daerah;

- Pemerintah Daerah memberikan perhatian, bimbingan, dan pembinaan kepada golongan ekonomi lemah agar PKL dapat berkembang dan dalam jangka waktu tertentu mampu berpindah ke toko-toko/pasar-pasar sehingga PKL tidak tumbuh dan berkembang secara liar; dan
- Mengingat tempat-tempat untuk berdagang yang ditunjuk untuk PKL tersebut adalah bidang tanah yang sudah mempunyai fungsi tertentu menurut perencanaan kota maka perlu diatur dengan jam-jam tertentu dengan bangunan tidak permanen sehingga akan tercipta kota yang aman tertib, lancar, dan sehat.

Pengertian PKL menurut pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 adalah mereka yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Penunjukan lokasi tempat-tempat usaha PKL menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 adalah meliputi lokasi milik, dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah maupun swasta. Untuk yang dikuasi swasta harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Penunjukan pengaturan lokasi ditetapkan oleh Walikota (pasal-2). Tempat-tempat usaha ini dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu:

- Tipe A dengan luas lebih dari $5M^2$ dengan batas maksimum $40M^2$;
- Tipe B dengan luas lebih dari $3M^2$ sampai dengan $5M^2$; dan
- Tipe C dengan luas $3M^2$ ke bawah.

Untuk mempergunakan tempat-tempat usaha tersebut harus mendapatkan ijin lebih dahulu dari Walikota (pasal-5). Selanjutnya pada pasal-6 disebutkan bahwa pada

tempat-tempat yang telah diberi ijin, di atasnya tidak boleh didirikan bangunan semi permanen/permanen. Dan disebutkan pula, bahwa ijin tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal-6). Konsekuensi diberikannya ijin tersebut PKL wajib membayar retribusi. (pasal-7).

Pembinaan PKL merupakan kewajiban Pemerintah Daerah beserta lembaga/instansi yang terkait (pasal-8), yaitu antara lain menyangkut kewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan cara-cara berusaha pada Pedagang kaki Lima. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dan diatur oleh Walikota (Pasal 10).

Pengaturan PKL tersebut diatas dilengkapi dengan ancaman sanksi. Sanksi yang diatur di dalam pada Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut yaitu; pelanggaran terhadap larangan melakukan kegiatan di luar lokasi yang ditunjuk; pelanggaran terhadap tanggung jawab keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha; pelanggaran karena mendirikan bangunan semi permanen/permanen; dan pelanggaran terhadap pengenaan retribusi. Terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya enam (6) bulan atau denda Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Di samping hukuman tersebut diatas, pelanggar dapat dikenakan sanksi pembongkaran oleh Walikota.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 1986 tersebut, Walikota dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1991 No. 511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD-PPKL) Kotamadya Dati II Semarang

membentuk lembaga pelaksana yang khusus melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah PKL. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tempat usaha PKL, Walikota telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang, berturut-turut adalah SK. Nomor 511.2/368/1991 tanggal 18 Maret 1991, kemudian diperbaharui dengan SK. Nomor 511.2/169/94 tanggal 2 Maret 1994 dan diperbaharui lagi dengan SK. Nomor 511.3/367/99 tanggal 6 Agustus 1999, yang isinya mengenai lokasi-lokasi yang diijinkan untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima. SK Walikota tersebut berisi ketentuan jalur jalan mana yang perbolehkan menyangkut luas areal, letak dan waktu usaha siang (pukul 04.00-16.00), malam (pukul 6.00 - 04.00). Sedangkan perubahan-perubahan pada SK tersebut menyangkut penambahan jumlah lokasi-lokasi yang diijinkan.

PKL yang diijinkan menempati lokasi-lokasi yang seharusnya untuk kepentingan umum tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Pada pasal-3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 disebutkan bahwa setiap PKL yang menggunakan tempat usaha bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan. Selanjutnya menurut pasal-4 disebutkan bahwa penunjukan/penetapan tempat-tempat usaha diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan fasilitas pasarana yang ada, tempat ibadah, dan tempat kepentingan umum lainnya. Pada pasal-6 Peraturan Daerah yang sama juga mengatur tentang larangan mendirikan bangunan semi permanen/permanen.

Sesuai ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut PKL mempunyai tanggung jawab yaitu: (1) PKL harus menempati lokasi-lokasi yang memang telah

dijijinkan untuk tempat usaha dengan waktu usaha yang telah ditentukan; (2) PKL yang telah menempati atau akan menempati lokasi-lokasi setelah dikeluarkannya SK. Walikota tentang penetapan lahan PKL berkewajiban untuk mempunyai ijin; (3) PKL berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka berjualan.; (4) PKL dilarang mendirikan bangunan semi permanen dan permanen; dan (5) PKL wajib membayar retribusi.

Pada observasi lapangan dijumpai banyak PKL yang tidak mempunyai ijin (36,3 %) dan tidak memperhatikan masalah kebersihan terutama pembuangan sampah dan adanya tenda-tenda yang tidak dibongkar pada waktu yang telah ditentukan, serta alat-alat seperti meja, kursi yang dibiarkan tergeletak begitu saja di trotoar atau pinggir jalan. Hal ini memberikan gambaran rendahnya perilaku kepedulian PKL terhadap kebersihan lingkungan yang dan keindahan kota. Perilaku semacam ini tidak terlepas dari kondisi internal dari PKL sendiri, yaitu mereka menjadi PKL karena desakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Dalam kaitan ini menurut Suparmoko (1994:46) yang mengatakan bahwa karena kemiskinan seseorang, seseorang cenderung untuk memikirkan kebutuhan yang paling mendesak (segera) dan untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

5.3.2. Pembinaan dan Penataan PKL

Pemerintah Kota Semarang secara spesifik telah mampu memproduksi peraturan yang berkaitan dengan permasalahan PKL yaitu Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan (penertiban) PKL melalui instrumen hukum telah membuktikan adanya penanganan dan antisipasi.

Dilihat dari beberapa ketentuan dalam pasal-pasal pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 seperti telah diuraikan dimuka, dirumuskan bagaimana prosedur dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Kota maupun para PKL. Peraturan memuat tentang beberapa kewenangan Pemerintah Kota dalam upaya pembinaan/penertiban PKL dan sekaligus mengatur usaha PKL dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para PKL dimaksud.

Beberapa aspek yang dikemukakan dalam pembahasan ini adalah persepsi pihak Pemerintah Kota dan PKL terhadap materi peraturan daerah tentang upaya pembinaan / penertiban PKL yang difokuskan pada beberapa substansi Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 1986 yaitu pasal-2 mengenai pengaturan tempat usaha atau lokasi usaha., pasal-5 kewenangan mengenai perijinan dan pasal 7 kewenangan untuk pemungutan retribusi .

Sesuai dengan materi dalam pasal-pasal tersebut ingin diketahui bagaimana persepsi pihak Pemerintah Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPD-PPKL selaku pejabat yang langsung bertanggungjawab pada masalah PKL serta persepsi para PKL terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

5.3.2.1. Persepsi Aparat Pemerintah Kota tentang Pembinaan dan Penataan PKL

Pembahasan bagian ini adalah merupakan rangkuman dari hasil wawancara mengenai pembinaan yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang diuraikan sebagai berikut.

(a) Pembinaan Langsung/ Penyuluhan.

Dilaksanakan secara langsung terutama kepada PKL yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 atau SK Walikota mengenai penataan PKL di Kota

Semarang. Pembinaan ini dilakukan oleh UPD-PPKL, dan frekuensinya dapat dikatakan setiap hari. Oleh karena setiap hari selalu terdapat PKL yang melanggar, dan saat itu pula selain diperingatkan biasanya petugas sekaligus memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada yang bersangkutan.

(b) Pertemuan/ Sarasehan

Pertemuan rutin selalu diadakan antara pihak UPD-PPKL dengan para PKL dengan memanfaatkan acara bulanan yang diselenggarakan oleh para PKL di masing-masing lokasi melalui jalur PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa) Tingkat Kota dan Tingkat Rayon/Unit se Kota Semarang. Pembicaraan berkaitan dengan masalah kebersihan lingkungan lokasi dan masalah-masalah lain yang penting yang terjadi tiap hari. Juga membahas penetapan tempat jualan yang tentunya ingin menciptakan kota Semarang yang tertib, rapi dan bersih tetapi tetap mempertahankan keberadaan PKL. Disamping itu dilakukan juga pembinaan perkoperasian yang dikelola oleh organisasi itu sendiri, juga penyuluhan tentang permodalan. Pertemuan rutin ini tidak diikuti oleh semua PKL, namun demikian masing-masing PKL telah diwakili oleh rekan-rekannya yang bertindak selaku ketua kelompok.

Sarasehan dilakukan oleh UPD-PPKL dengan instansi terkait dan PPJ (Persatuan Pedagang Dan Jasa) serta wakil PKL. Sarasehan ini berlangsung paling tidak setahun 1 (satu) kali, atau bila ada permasalahan yang segera diselesaikan.

(c) Pemberian Ijin Tempat Usaha

Dalam rangka memudahkan pengaturan dan penataan PKL, Walikota telah membuat suatu ketentuan tentang penetapan areal/lokasi yang diijinkan untuk

aktivitas PKL. Sesuai dengan ketentuan yang terbaru yaitu SK. Nomor 511.3/367/1999 telah ditetapkan sebanyak 129 lokasi yang diijinkan untuk tempat usaha PKL. Para PKL yang sudah atau akan menempati lokasi-lokasi tersebut diwajibkan untuk memiliki ijin terlebih dahulu yang melaksanakan adminitrasinya ditangani oleh UPD-PPKL.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembinaan PKL menyangkut masalah ijin tempat usaha, antara lain disebutkan yaitu adanya kesadaran dari PKL yang masih rendah disebabkan oleh tuntutan akan kebutuhan mereka yang sangat dominan serta banyaknya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai namanya, antara ijin yang diberikan pihak Pemerintah Kota dengan pedagang yang menempati lokasi tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya tempat usaha yang dijual oleh PKL dan para PKL yang sudah memiliki ijin tempat usaha ini kemudian mencari lokasi yang tidak diijinkan (liar).

PKL dikenal sebagai pedagang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, baik mobilitas usaha maupun mobilitasi lokasi, seperti pedagang *oprokan*, dimana mereka datang dari desa yang membawa dagangan untuk dijual disekitar pasar pada saat-saat tertentu saja, misalkan pagi hari atau sore hari, atau pada musim-musim tertentu jadi sifatnya tidak menetap atau sering berpindah. PKL yang tidak menetap inilah yang sulit pengaturannya, dan ini berkaitan pula dengan kesulitan penarikan retribusi. Pengaturan tempat yang telah ditetapkan kadang dilanggar, dan ini sering dibiarkan, karena jika ditindak tegas, maka akibatnya penarikan retribusi akan turun, dilain

pihak bahwa Pemerintah Kota menargetkan penerimaan retribusi yang tiap tahun selalu naik.

Hambatan lain dalam masalah tempat usaha PKL adalah disatu pihak, PKL tentunya ingin selalu dekat dengan pembeli, karena pembelipun akan memilih tempat yang lebih dekat karena barang tersebut memang mudah didapat, akibatnya tumbuh PKL di tempat-tempat strategis, seperti pedagang rokok, koran dan bensin. PKL yang demikian memang sulit dalam pengaturannya/penentuan lokasinya, lain halnya kalau menjual barang-barang tertentu seperti barang elektronik dan onderdil motor baik bekas maupun baru, dimana mudah dalam penentuan lokasi PKL, seperti di Jl. Progo atau Jl. Kokrosono.

Akibat belum tertatanya lokasi-lokasi PKL tersebut menyebabkan Peraturan Daerah yang ada juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

(d) Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kota

Disamping fasilitas yang berupa lokasi-lokasi jualan yang diijinkan, Pemerintah Kota bekerjasama dengan instansi/lembaga lainnya telah memberikan bantuan akan sarana/prasarana berdagang, seperti gerobak-gerobak rokok, bak sampah serta bantuan modal, sebagai contoh pada tahun anggaran 1998/1999 Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada 400 orang PKL masing-masing sebesar Rp. 100.000,-

Namun demikian pemberian fasilitas tersebut sering disalahgunakan misalnya fasilitas lokasi-lokasi jualan yang telah diijinkan, kadang PKL tidak mau

menempatnya. Di lain pihak, ada daerah lokasi PKL yang telah mapan, namun oleh PKL tersebut tempat jualan diperjualbelikan.

(e) Penarikan Retribusi

Pada awalnya penarikan retribusi kepada PKL berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL (pasal-7). Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan untuk Perdagangan/ Jasa, maka penarikan retribusi berdasarkan pada peraturan daerah yang terbaru.

Retribusi untuk PKL sesuai pasal-8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 diartikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada para PKL di Kota Semarang sehubungan dengan penggunaan jasa/fasilitas berupa lahan dipinggir jalan, trotoar, bahu jalan, kampung-kampung dan lain-lain yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk digunakan sebagai tempat usaha jualan barang/jasa bagi para PKL. Sedangkan besarnya retribusi tergantung letak lokasi, yaitu :

- Lokasi A sebesar Rp. 100,- per m²/ 1 hari.
- Lokasi B sebesar Rp. 75,- per m²/ 1 hari
- Lokasi C sebesar Rp. 50,- per m²/ 1 hari.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota sehubungan dengan penarikan retribusi, meliputi target yang ditentukan Pemerintah Kota melampaui kapasitas yang dapat dicapai, adanya organisasi PKL yang juga memungut iuran,

bahkan lebih banyak diikuti/dituruti oleh para PKL dalam pelunasannya, serta adanya oknum-oknum yang kadangkala merusak aturan yang telah ditetapkan pihak Pemerintah Kota sendiri.

Dalam penarikan retribusi masih terdapat masalah, seperti halnya jumlah petugas penarik retribusi yang terbatas. Kendala lainnya adalah seperti tingkat mobilitas tinggi dari PKL terutama pedagang *oprokan*, dimana mereka mangkal hanya sebentar, yang tentunya kalau petugas belum datang, mereka tidak kena retribusi.

(f) Penataan Lokasi PKL.

Tindakan ini memang secara operasional dilaksanakan secara terpadu bersama dengan instansi terkait , antara lain UPD-PPKL, Satpol/Tibum, Bagian Perkonomian, DLLAJ dan PPJ.

Penataan atau relokasi dilakukan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota memerlukan lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kepentingan umum atau lainnya.

Dalam hal ini Pemerintah Kota mengambil kebijaksanaan yaitu :

- Mencarikan lokasi PKL yang baru sebagai pengganti lokasi yang lama tanpa dipungut biaya.
- Menyediakan angkutan transportasi untuk mengangkut dan memindahkan barang dagangan dan alat-alatnya termasuk membantu dalam membongkarnya tanpa dipungut biaya.

5.3.2.2. Persepsi PKL Tentang Ijin Tempat Usaha Dan Retribusi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 Bab III pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mempergunakan tempat usaha, setiap PKL harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Walikota.

Ketentuan formal yang demikian tersebut, tidak berarti bahwa dengan sendirinya semua PKL telah mempunyai ijin. Hal ini tergantung pada persepsi mereka tentang ijin tersebut. Keadaan ini terbukti banyaknya para PKL yang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan ijin dengan bervariasi alasan.

**TABEL V.15.
KEPEMILIKAN IJIN MENEMPATI LOKASI**

No	Memiliki Ijin	Frekuensi	Prosentase
1	Punya	86	63,7 %
2	Tidak punya	49	36,3 %
	Jumlah	135	100 %

Sumber : Hasil Analisi, 2000.

Dari tabel V.15 menunjukkan bahwa tidak semua PKL mempunyai ijin untuk menempati tempat usaha. Tidak adanya ijin bagi sebagian PKL di Kota Semarang akan membawa dampak negatif bagi keberadaannya, antara lain, rasa aman, diakui, dan didukung atas keberadaannya. Ijin yang didapatkan akan membuat mereka mudah dalam melakukan kegiatan usahanya, paling tidak terhadap perasaan takut atau was-was untuk diusir, dirazia, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ijin yang diberikan Pemerintah Kota akan membuat mereka merasa aman dalam berusaha, diakui dan diperhatikan keberadaannya. Selain itu data tersebut merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kota dalam pengambilan kebijakan atas keberadaan PKL, karena

bagaimanapun mereka merupakan salah satu penggerak kegiatan perekonomian kota, bahkan memberikan kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Dampak lain terhadap ijin yang diberikan menyangkut ketertiban, kerapian dan keindahan kota. Sehingga iklim yang baik akan tercipta, dan ini akan membawa akibat yang positif terhadap tumbuh dan berkembangnya PKL terutama di Kota Semarang.

Para PKL yang tidak punya ijin memiliki alasan bahwa : (1) Menambah pengeluaran (26,5 %), (2) menyusahkan (26,5 %) dan (3) prosesnya sulit (47%). Sedangkan yang mempunyai ijin mempunyai alasan sebagai berikut : (1) ketenangan (18,6 %); (2) perlindungan (31,4 %); (3) ketertiban (12,8 %) dan (4) mendapatkan tempat tetap (37,2 %).

Untuk mendapat ijin tempat usaha, PKL harus mengeluarkan biaya yang besarnya tergantung dengan luas lokasi yang ditempati dan nilai lokasi tersebut. Ijin tempat usaha ini berlaku 1 (satu) tahun, namun apabila masa ijin usaha sudah habis maka perpanjangan ijin dapat dimintakan kembali kepada Pemerintah Kota.

Kurun waktu berlakunya ijin usaha yang hanya 1 (satu) tahun relatif singkat. Hal ini menurut pejabat di UPD-PPKL alasannya karena peruntukan-peruntukan lokasi yang diijinkan untuk ditempati oleh PKL tersebut sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan umum dan pengembangan kota. Apabila lokasi yang selama ini dimanfaatkan PKL akan dibangun atau untuk kepentingan umum lainnya, maka tentunya ijin tempat usaha tersebut tidak akan diperpanjang. Masalah yang dihadapi oleh PKL tersebut pada dasarnya adalah ketidaktahuan mereka tentang kapan atau bilamana lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atau dibangun. Hal ini tentu berimplikasi terhadap keraguan mereka untuk memperluas usahannya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa PKL kota Semarang terbagi menjadi dua kriteria yang PKL yang berijin dan tidak berijin. Hal lain yang menarik untuk dikemukakan adalah bahwa PKL yang berijin dan yang tidak berijin, mereka sama-sama dapat menjalankan usahanya. Keadaan ini yang harus lebih diperhatikan karena dapat memberikan persepsi yang keliru terhadap perijinan tersebut.

Setiap ketentuan yang diberlakukan pada dasarnya mempunyai konsekuensi tersendiri. Juga dalam hal penataan PKL, dimana keharusan menempati lokasi-lokasi yang ditunjuk dan mempunyai ijin tempat usaha tentunya mempunyai konsekuensi tersendiri apabila tidak dilaksanakan. Apabila PKL tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan akan pentingnya ketertiban, keindahan dan kebersihan tentunya PKL akan menerima konsekuensi antara lain berupa teguran. Dalam penelitian ini mencatat bahwa 61,5 % responden pernah mendapat teguran. Siapa yang melakukan teguran, 67,4 % adalah dari aparat pemerintah, 19,2 % dari warga sekitar dan 13,5 % dari lainnya. Sedangkan alasan mengapa mendapat teguran 34,6 % responden belum punya ijin, 23,1 % karena mengotori lingkungan, 17,3 % mengganggu lalu lintas dan lainnya seperti menghalangi pemandangan, mengganggu keamanan (25 %).

Berbagai alasan teguran tersebut mungkin karena PKL tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan tertentu ataupun mereka beranggapan bahwa lokasi usahanya tidak memerlukan ijin dari pemerintah kota.

Konsekuensi dari adanya ijin tempat usaha tersebut adalah adanya kewajiban bagi PKL untuk membayar retribusi yang besarnya tergantung pada nilai strategis lokasi, luas areal yang ditempati dan jenis dagangan. Disamping pungutan resmi tersebut, PKL sering terbebani oleh pungutan-pungutan lain seperti uang keamanan, dan iuran

organisasi. Dalam penelitian ini mencatat 129 responden (95,6%) terkena pungutan. Adapun jenis pungutan-pungutan tersebut seperti antara lain retribusi, uang keamanan, sewa tempat dan iuran organisasi. Pungutan-pungutan diluar yang resmi (retribusi) tentunya merupakan beban tersendiri bagi para PKL.

5.3.2.3. Persepsi PKL Tentang Penataan Ulang Lokasi.

Pandangan PKL terhadap upaya pengaturan (penataan ulang) lokasi PKL mendapat tanggapan positif. Dari 135 responden yang setuju dengan penataan ulang adalah 62,2 % dan yang tidak setuju 37,8 %. Sedangkan bagaimana bentuk penataan ulang yang diinginkan oleh para PKL yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut :

- Dipindah ke lokasi yang permanen dengan mengelompokkan usaha sejenis (14,3%),
- Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan serta dikelompokkan sesuai jenis dagangannya (25 %),
- Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan (48,8 %),
- Terserah pemerintah (11,9 %)

Uraian di atas menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan PKL adalah suatu kebutuhan termasuk bagi para PKL sendiri. Hal itu sekaligus memberikan gambaran bahwa pada dasarnya mereka ingin menciptakan lingkungan tertib dan rapi. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa penataan yang dilakukan harus berpihak pada keberadaan usaha PKL, dalam arti mereka tidak dirugikan atau bahkan ditutup usahanya. Sehingga konotasi negatif “penataan” sedikit demi sedikit dapat dihilangkan.

5.4. Persepsi Konsumen Terhadap Keberadaan PKL

5.4.1. Karakteristik Konsumen

Konsumen (pembeli) produk atau jasa Pedagang Kaki Lima menurut penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1994:24), adalah kebanyakan hanya dinikmati oleh golongan yang berpendapatan menengah kebawah. Dari penelitian ini ditunjukkan karakteristik konsumen dilihat dari tipe sarana transportasi yang digunakan oleh konsumen seperti pada tabel V.16.

TABEL V.16.

KARAKTERISTIK KONSUMEN PKL

Tipe Konsumen	Frekwensi	Prosentase (%)
- Jalan Kaki	10	28,6 %
- Naik Becak	2	6,7 %
- Niak Angkutan Kota	6	17,1 %
- Sepeda Motor	8	22,9 %
- Bermobil,	3	8,6 %
- Lainnya	6	17,1 %
Jumlah	35	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dilihat dari tipe konsumen sesuai dengan tabel V.16 tersebut, konsumen yang berjalan kaki adalah sebanyak (28,6%). Disini dapat diartikan bahwa kebanyakan konsumen PKL bukan masyarakat disekitar (dekat) dengan lokasi PKL. Demikian juga bila konsumen bermobil dianggap mereka yang dikategorikan berpenghasilan atas dan konsumen yang selain itu adalah konsumen berpenghasilan menengah kebawah, maka konsumen PKL kebanyakan adalah mereka yang berpenghasilan menengah kebawah.

Sedangkan berapa jauh tempat tinggal konsumen dari lokasi PKL 17% mereka mengaku bertempat tinggal kurang dari 0,5 km, 22,9 % bertempat tinggal antara 0,5 km s/d 1 km dan 60 % bertempat tinggal lebih dari 1 km.

Salah satu faktor daya tarik konsumen untuk mengunjungi suatu kawasan perdagangan menurut Nelson (1958) adalah adanya kemudahan sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Dalam penelitian ini mencatat, bahwa menurut persepsi responden terhadap kemudahan memperoleh angkutan kota, 77,1% menjawab bahwa angkutan kota untuk menuju lokasi PKL adalah mudah, 17,1 % agak sulit dan 6,7 % menjawab sulit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kaitan yang erat antara lokasi PKL dan jaringan transportasi. PKL kebanyakan tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan jalur untuk melayani penduduk. Semua ini kebanyakan terdapat di pusat kota, tetapi kurang di pinggiran kota.

5.4.2. Pengaruh Keberadaan PKL terhadap lingkungan.

Keberadaan PKL yang biasanya berjualan di tempat-tempat strategis memberikan pengaruh positif dan negatif. Ditinjau dari sisi positif, keberadaan PKL dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah kebawah, seperti misalnya tanggapan konsumen terhadap manfaat keberadaan PKL adalah konsumen merasa mudah mencari makan (31,4 %), mudah mencari kebutuhan sehari-hari (40 %), dan harga murah (25,7 %).

PKL yang berjualan makanan/minuman yang dekat dengan perkantoran akan sangat membantu sekali bagi para karyawan, dimana mereka akan mudah untuk makan siang. Lebih-lebih instansi yang memberlakukan lima hari kerja dimana karyawan baru pulang sore hari, keberadaan PKL yang ada disekitarnya sangat dirasakan manfaatnya. Menurut Rachbini dan Hamid (1994:92), keberadaan PKL di kota-kota sangat dirasakan manfaatnya oleh para karyawan atau pegawai pada sektor formal yang bergaji rendah, mereka memanfaatkan warung-warung makan (warteg) dari sektor informal yang berada disekitar kantornya untuk makan siang. Dikatakan selanjutnya oleh Rachbini, dari 2 juta

karyawan/pegawai di Jakarta sebanyak 1,6 juta diantaranya membutuhkan sektor informal.

Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan PKL terhadap lingkungannya menurut tanggapan konsumen adalah karena mengganggu lalu lintas (17,1%), mengganggu pejalan kaki (8,6%), lingkungan kurang bersih dan tidak tertib (57,1%), mengganggu keamanan (0%), menghalangi pematangan (8,6%) dan lainnya (8,6%).

Nampak bahwa pengaruh negatif adanya PKL menurut tanggapan konsumen yang terbanyak adalah bahwa keberadaan PKL menjadikan lingkungan kurang bersih dan tidak tertib. Kebanyakan PKL yang masuk kategori ini berdasarkan pengamatan adalah PKL-PKL yang berjualan makanan/minuman (warung makan), dimana mereka membuang sampah dan sisa-sisa makanan pada selokan-selokan yang ada di dekat tempat jualannya. Disamping itu pemasangan tenda atau penutup tempat berdagang jauh dari kesan rapi.

Tempat berdagang para PKL di tempat-tempat strategis secara tidak langsung akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini karena banyak dari PKL yang berjualan di bahu jalan, disamping karena lalu lalang dari para pembeli. Namun demikian adanya kemacetan lalu lintas justru dimanfaatkan oleh para PKL untuk mempromosikan barang dagangan mereka.

5.4.3. Persepsi Konsumen Terhadap Penataan Ulang Lokasi PKL

Pendapat konsumen terhadap upaya pengaturan (penataan ulang) lokasi PKL mendapat tanggapan positif. Dari 35 responden yang setuju dengan penataan ulang adalah 62,9 % dan yang tidak setuju 37,1 %. Sedangkan bagaimana bentuk penataan ulang yang diinginkan oleh konsumen yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut :

- Dipindah ke lokasi yang permanen dengan mengelompokkan usaha sejenis (27,3%),

- Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan serta dikelompokkan sesuai jenis dagangannya (31,8 %),
- Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan (36,4 %),
- Lainnya, (4,5 %)

Persepsi konsumen mengenai penataan ulang lokasi terdapat kecenderungan yang sama dengan pihak PKL. Sebagian besar PKL maupun konsumen mendukung adanya penataan lokasi PKL yaitu dengan merapikan dan menertibkan lokasi dan mengelompokkan usaha sejenis, namun tetap pada lokasi yang ada saat ini. Penataan lokasi dalam bentuk pemindahan (relokasi) bagi PKL terdapat kecenderungan untuk menolak, untuk konsumen terdapat kecenderungan untuk mendukung.

Uraian diatas menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan PKL adalah suatu kebutuhan semua pihak termasuk bagi para PKL sendiri. Bagi para konsumen keberadaan PKL memang dibutuhkan, namun mereka juga menginginkan lingkungan yang bersih, tertib dan rapi, sehingga mereka dapat menikmati suasana yang nyaman. Selain dari itu, bentuk penataan lokasi baik menurut PKL maupun menurut konsumen mengarah kepada bentuk pengelompokan menurut jenis dagangan, hal ini bagi konsumen menyangkut luasnya pilihan dan mudah untuk mendapatkan barang yang akan dibeli. Disini terlihat bahwa jenis dagangan PKL merupakan faktor yang berpengaruh dalam penentuan lokasi baik ditinjau dari sisi PKL maupun konsumen.

5.5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PKL Dalam Memilih Lokasi Usaha.

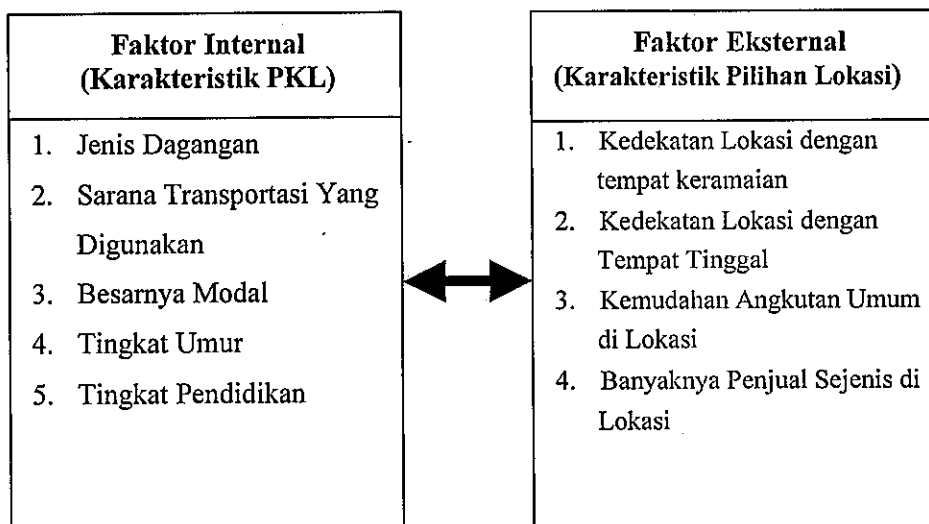
Tujuan pokok proses penelitian adalah membuat pernyataan sementara tentang hubungan sebab-akibat di antara beberapa variabel, seperti dikatakan oleh Walizer dan Wienir (1993: 13-15). Hubungan yang paling sederhana adalah antara variabel pengaruh

(*independent variable*) dengan variabel terpengaruh (*dependent variable*). Adapun variabel yang dimaksud sesuai dengan penelusuran pada kajian pustaka adalah sebagai berikut:

- (1). jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal awal, umur dan pendidikan PKL sebagai variabel-variabel penentu pilihan lokasi usaha.
- (2). kedekatan lokasi dengan tempat kegiatan/keramaian kota, kedekatan lokasi usaha dengan rumah tinggal pedagang, kemudahan memperoleh angkutan umum di lokasi, banyaknya pedagang dengan usaha sejenis dilokasi merupakan variabel-variabel karakteristik pilihan lokasi usaha.

Teknik analisis terhadap data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran hubungan antar variabel dan mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh digunakan teknik analisis statistik dengan kajian bivariat (korelasi dua variabel) dengan teknik tabulasi silang. Analisis kuadrat Chi (X^2) digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel, sebagaimana terlihat pada gambar 5.1.

GAMBAR 5.1.
DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR VARIABEL



TABEL V.17
VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM ANALISIS

No	Variabel	Diskripsi
1	Jenis Dagangan	1= Dagangan Makanan/minuman 2= Dagangan Non Makanan/minuman 3= Dagangan Jasa
2	Sarana Transportasi Yang Digunakan	1= Jalan Kaki 2= Sepeda/Becak 3= Angkutan Umum 4= Sepeda Motor
3	Besar Modal	1= < Rp. 250.000 2= Rp. 250.000 - < Rp.500.000 3= Rp. 500.000 - < Rp.1.000.000 4= > Rp.1.000.000
4	Tingkat Umur	1= < 30 Th 2= 30 – 40 Th 3= 41 – 50 Th 4= > 50 Th
5	Tingkat Pendidikan	1= Tidak Sekolah, Tidak Tamat SD, Tamat SD 2= Tidak Tamat SLTP, Tamat SLTP 3= Tidak Tamat SLTA, Tamat SLTA 4= Lainnya (Perguruan Tinggi)
6	Kedekatan (Jarak) Lokasi ke tempat keramaian	1= < 100 m (dekat) 2= 100 m – 500 m (sedang) 3= > 500 m (jauh)
7	Kedekatan (Jarak) Lokasi ke tempat tinggal	1= < 1 Km (dekat) 2= 1 – 5 Km (sedang) 3= > 5 Km (jauh)
8	Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi	1= Mudah 2= Agak Sulit 3= Sulit
9	Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi	1= Sedikit 2= Sedang 3= Banyak

Sumber : Hasil Analisis, 2000

5.5.1. Analisis Hubungan Antara Jenis Dagangan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL. V.18.
HUBUNGAN ANTARA JENIS DAGANGAN DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN LOKASI

		Karakteristik Pilihan Lokasi PKL															
		Jarak ke Tempat Keramaian				Jarak ke Tempat Tinggal				Kemudahan Angk. Umum				Banyaknya Penjual Sejenis			
Karakteristik PKL		1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot
Jenis Dagangan	1	22	12	6	40	22	12	6	40	33	7	0	40	7	9	24	40
	2	26	34	26	86	23	45	18	86	74	11	1	86	14	26	46	86
	3	2	6	1	9	1	7	1	9	8	1	0	9	4	3	2	9
	Tot	50	52	33	135	46	64	25	135	115	19	1	135	25	38	72	135
		Chi (X ²)=11,014				Chi (X ²)=13,440				Chi (X ²)=1,116				Chi (X ²)=6,161			

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.18. terdapat kecenderungan pada jenis dagangan makanan/minuman (1) menempatkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan tempat keramaian. Sedang untuk jenis dagangan non makanan/ minuman (2) dan jasa (3) cenderung menempatkan barang dagangannya pada jarak sedang dengan tempat keramaian.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan kedekatan lokasi ke tempat keramaian/kegiatan kota adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan jenis dagangan yang dipasarkan, responden mempunyai pola pikir bahwa dengan jenis dagangan tertentu akan menentukan lokasi sedekat mungkin ke tempat keramaian dimana banyak calon pembeli, seperti jenis makanan/minuman yang tingkat ketahanan barangnya cenderung kurang dibanding dengan dagangan non makanan atau jasa, akan

berusaha mendekatkan barangnya sedekat mungkin dengan tempat-tempat keramaian agar barang cepat laku untuk menghindari resiko kerugian karena penurunan mutu.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut sesuai dengan pengamatan dilapangan, PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman di lokasi penelitian seperti di Jl. Dr. Karyadi terdapat konsentrasi PKL dekat Rumah Sakit, demikian juga di depan Rumah Sakit Pantiwiloso di Jl. Citarum dan Sekitrar Stadion Diponegoro dekat dengan perkantoran. Sedangkan PKL jenis dagangan non makanan/minuman seperti jenis dagangan barang bekas di Jl. Kokroso, Jl. Citarum dan Jl. Progo bila dilihat jaraknya dengan tempat-tempat yang menimbulkan keramaian seperti kawasan perdagangan, perkantoran, rumah sakit cenderung agak jauh.

Dari perhitungan didapat harga kuadrat Chi $X^2 = 11,014$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=4$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=9,4877$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan jenis dagangan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian dari kelompok PKL dengan jenis dagangan (1); (2); dan (3).

(2). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.18. terdapat kecenderungan PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman (1) memilih lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggal, sedangkan PKL dengan jenis dagangan non makanan/minuman (2) dan jasa (3), lokasi usahanya pada jarak sedang dengan rumah tinggalnya.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan kedekatan lokasi ke tempat tinggal adalah mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan jenis dagangan yang akan

dipasarkan mempunyai kaitan erat dengan jarak lokasi dengan tempat tinggal responden, dengan jenis dagangan tertentu barang dagangan dan peralatannya yang mudah atau sulit dibawa akan membutuhkan sarana transportasi tertentu. Jenis dagangan dan peralatan yang dapat dibawa dengan sepeda motor atau angkutan umum jarak lokasi usaha dapat lebih jauh dengan tempat tinggal responden.

PKL dengan jenis makanan/minuman (warung makan), barang dagangan yang dipasarkan sebagian atau seluruhnya dimasak dahulu dirumah, disamping itu peralatan seperti kompor, piring, gelas dan alat-alat masak lainnya bila ditinggal di lokasi tidak terjamin keamanannya, sehingga perlu dibawa pulang. Sehingga apabila lokasi jauh dengan rumah akan menyulitkan. Sedangkan pedagang seperti barang-bekas yang cenderung lebih ringkas dapat mudah dibawa pulang atau ditinggal dilokasi. PKL barang bekas di Jl. Progo dan Jl. Kokroso dengan tempat usaha menyerupai kios-kios barang dagangannya ditinggal dilokasi. Sedangkan PKL barang bekas di Jl. Citarum kelihatan dibawa pulang.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 13,440$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=4$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=9,4877$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan jenis dagangan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal. Dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal dari PKL kelompok dengan jenis dagangan (1); (2); dan (3).

(3). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.18 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman, non makanan/minuman dan jasa dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi.

Keterkaitan antara jenis dagangan yang dipasarkan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi berasumsi bahwa dengan mudahnya angkutan umum di lokasi akan mudah dijangkau oleh konsumen. Adanya kemudahan angkutan umum maka minat pedagang lebih terdorong untuk memilih lokasi yang mudah angkutan umumnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 1,116$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=4$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=9,4877$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

(4). Hubungan Jenis Dagangan dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan banyaknya penjual sejenis di lokasi berasumsi bahwa dengan jumlah penjual sejenis tertentu di lokasi, responden mempunyai pola pikir bahwa sesuai dengan jenis dagangan yang akan dipasarkan, lokasi usahanya mempertimbangkan adanya persaingan untuk jenis dagangan tersebut di lokasi, yang diukur dengan banyaknya jumlah penjual sejenis di lokasi.

Dari tabel V.18 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman dan non makanan/minuman dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis di lokasi yang ada di lokasi, dalam arti mereka lebih senang memilih lokasi mengelompok dengan usaha sejenis, meskipun dengan dengan konsekuensi adanya persaingan yang ketat. Sedangkan penjual jasa pengelompokan tersebut cenderung kurang.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 6,161$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=4$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=9,4877$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

5.5.2. Analisis Hubungan Antara Sarana Transportasi Yang Digunakan Dengan Karakteristik Pilihan Lokasi.

TABEL V.19.
HUBUNGAN ANTARA SARANA TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN
DENGAN KARAKTERSITIK PILIHAN LOKASI

		Karakteristik Pilihan Lokasi PKL															
		Jarak Ke Tempat Keramaian				Jarak ke Tempat Tinggal				Kemudahan Angk. Umum				Banyaknya Penjual Sejenis			
Karakteristik PKL		1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot
Sarana Transportasi Yang Digunakan	1	10	15	10	35	16	12	7	35	31	4	0	35	7	11	17	35
	2	1	5	3	9	1	7	1	9	7	1	1	9	0	2	7	54
	3	15	25	14	54	11	32	11	54	48	6	0	54	7	15	32	54
	4	24	7	6	37	18	13	6	37	29	8	0	37	11	10	16	37
	Tot	50	52	33	135	46	64	25	135	115	19	1	135	25	38	72	135
		Chi (X ²)=18,292				Chi (X ²)=14,379				Chi (X ²)=16,458				Chi (X ²)=7,604			

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.19. terdapat kecenderungan PKL yang jalan kaki (1), sepeda/becak (2) dan naik angkutan umum (3) cenderung memilih lokasinya dengan jarak sedang ke tempat keramaian, PKL yang naik sepeda motor (1) cenderung memilih jarak dekat.

Dalam menganalisa hubungan antara sarana transportasi dengan kedekatan lokasi dengan tempat keramaian adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan sarana transportasi tertentu responden mempunyai peluang bebas untuk menentukan jarak lokasi usahanya dekat dengan tempat keramaian sesuai dengan sarana transportasi yang dimiliki atau tersedia

Dari perhitungan didapat harga kuadrat Chi $X^2 = 18,292$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar $0,05$ adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan sarana transportasi berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian dari kelompok PKL dengan sarana transportasi (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dalam menganalisa hubungan sarana transportasi dengan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal ini diambil dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan sarana transportasi yang ada mempunyai kaitan erat dengan jarak tempat tinggal responden. Responden mempunyai pola pikir bahwa dengan jarak lokasi usaha yang dekat tempat tinggal dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki, untuk jarak yang jauh memerlukan sarana transportasi seperti sepeda motor atau dengan angkutan umum.

Dari tabel V.19. terdapat kecenderungan PKL yang jalan kaki (1) lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya sedang PKL yang naik sepeda/becak (2) dan angkutan umum (3) lokasi usahanya pada jarak yang sedang dengan rumah tinggal. Keadaan ini berkaitan dengan barang dagangan dan alat-alat yang digunakan dan bagaimana cara membawa barang dan alat tersebut ke lokasi dan ongkos transportasi yang ditanggung, misalnya PKL dengan jenis makanan/minuman (warung makan), dengan barang dagangan dan alat-alat yang harus dibawa ke lokasi kurang memungkinkan untuk naik angkutan umum, alternatifnya adalah dengan memakai gerobak dorong atau sepeda motor yang dilengkapi dengan kranjang, sedangkan

pedagang seperti barang-bekas yang cenderung lebih ringkas dapat mudah dibawa-pulang atau ditinggal dilokasi, sehingga mereka lebih mudah untuk menggunakan sarana angkutan umum.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 14,379$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL sarana transportasi yang berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya dengan rumah tinggal, dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal dari PKL dengan sarana transportasi (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi.

Keterkaitan hubungan antara sarana transportasi dengan tingkat kemudahan memperoleh angkutan umum dilokasi dengan asumsi bahwa dengan sarana transportasi tertentu yang dimiliki atau digunakan, responden mempunyai peluang bebas untuk menentukan lokasi usahanya yang mudah untuk memperoleh angkutan umum

Dari tabel V.19 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL pada kelompok transportasi yang digunakan dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi. Hal ini dapat dimengerti karena kemudahan memperoleh angkutan umum sangat berpengaruh terhadap konsumen untuk mencapainya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 16,458$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$,

sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan sarana transportasi yang berbeda dalam pandangannya dengan kemudahan memperoleh angkutan umum, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap kemudahan angkutan umum di lokasi dari PKL dengan sarana transportasi (1); (2); (3) dan (4).

(4). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Dari tabel V.19 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dengan sarana transportasi berbeda dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis di lokasi yang ada di lokasi, dalam arti mereka lebih senang memilih lokasi yang banyak usaha sejenis atau mengelompok.

Dalam menganalisa hubungan antara sarana transportasi dengan banyaknya penjual sejenis berasumsi bahwa dengan sarana transportasi tertentu yang dimiliki atau yang digunakan, responden mempunyai pola pikir bahwa dengan jenis dagangan tertentu yang akan dibawa atau diangkut dengan sarana transportasi, keputusan untuk menentukan lokasi yang banyak penjual sejenis perlu dipertimbangkan apakah lokasi yang banyak pesaingnya tetapi barang dagangnya mudah dibawa/ diangkut dengan sarana transportasi yang digunakan.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 7,604$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

5.5.3. Analisis Hubungan Antara Modal Dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.20.
HUBUNGAN ANTARA MODAL DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN LOKASI

	Karakteristik Pilihan Lokasi PKL																
	Jarak Ke Tempat Keramaian				Jarak ke Tempat Tinggal				Kemudahan Angk. Umum				Banyaknya Penjual Sejenis				
Karakteristik PKL	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	
Modal	1	17	15	14	46	12	20	14	46	39	7	0	46	11	18	17	46
	2	10	22	10	42	9	26	7	42	34	7	1	42	9	12	21	42
	3	19	9	4	32	17	13	2	32	29	3	0	32	4	7	21	32
	4	4	6	5	15	8	5	2	15	13	2	0	15	1	1	13	15
	Tot	50	52	33	135	46	64	25	135	115	19	1	135	25	38	72	135
	Chi (X ²)=13,184				Chi (X ²)=17,246				Chi (X ²)=3,170				Chi (X ²)=13,991				

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Modal dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.20. terdapat kecenderungan PKL dengan modal < Rp. 250.000 (1) dan modal Rp.500.000-, Rp.1000.000 (3) memilih lokasi sedekat mungkin dengan tempat keramaian sedangkan PKL dengan modal Rp.250.000 - <Rp.500.00 (2) dan modal > Rp.1.000.000 memilih lokasi dengan jarak sedang.

Dalam menganalisa hubungan antara modal dengan kedekatan ke tempat keramaian adalah berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden mempunyai peluang bebas untuk menentukan lokasi usahanya dekat dengan keramaian/kegiatan kota

Hasil perhitungan didapat harga kuadrat Chi X² = 13,184. Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X²=12,5916, sehingga X²> X²

0,05 , sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian dari kelompok PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Modal Dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.20. terdapat kecenderungan PKL dengan modal (1) dan (4) lokasi usahanya pada jarak yang sedang dengan rumah tinggal, sedangkan PKL yang modal (3) lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya. Hal ini diduga menyangkut barang dagangan dan alat-alat yang dibeli serta transportasi yang digunakan, semakin jauh lokasi dengan tempat tinggal, akan memperbesar ongkos transportasi, sehingga modal yang digunakan juga bertambah.

Keterkaitan antara modal dengan kedekatan dengan lokasi ke tempat tinggal berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan menyesuaikan dengan kemampuannya yang diukur dengan modal yang dimiliki responden dapat menentukan pilihan jarak lokasi usaha dengan tempat tinggalnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 17,246$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya dengan rumah tinggal, dengan

perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal dari PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Modal dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.20 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL modal berbeda dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi.

Dalam menganalisa hubungan antara modal dengan kemudahan angkutan umum di lokasi adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden mempunyai peluang bebas untuk menentukan lokasi usahanya yang mudah dilalui angkutan umum.

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 3,170$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal yang berbeda dalam pandangannya dengan kemudahan memperoleh angkutan umum, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap kemudahan memperoleh angkutan umum di lokasi dari PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(4). Hubungan Modal dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Keterkaitan antara modal dengan banyaknya penjual sejenis dilokasi dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden dapat menentukan satu pilihan lokasi usaha yaitu apakah memilih lokasi yang penjual sejenisnya sedikit berarti persaingan kurang, atau lokasi yang penjual sejenisnya banyak dengan persaingan tinggi yang akan membutuhkan modal yang lebih besar

Dari tabel V.20 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi, dalam arti mereka cenderung memilih lokasi dengan mengelompok pada usaha sejenis meskipun tingkat persaingan tinggi.

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 13,991$ Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal berbeda dalam pandangannya terhadap banyaknya penjual sejenis dilokasi.

5.5.4. Analisis Hubungan Antara Umur dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.21.
HUBUNGAN ANTARA UMUR DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN LOKASI

		Karakteristik Pilihan Lokasi PKL															
		Jarak Ke Tempat Keramaian				Jarak ke Tempat Tinggal				Kemudahan Angk. Umum				Banyaknya Penjual Sejenis			
Karakteristik PKL		1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot
Umur	1	8	15	4	27	7	13	7	27	20	7	0	27	6	13	8	27
	2	12	16	15	43	17	18	8	43	41	2	0	43	9	8	26	43
	3	26	14	9	49	21	19	9	49	40	8	1	49	8	16	25	49
	4	4	8	4	16	1	14	1	16	14	2	0	16	2	1	13	16
	Tot	50	52	33	135	46	64	25	135	115	19	1	135	25	38	72	135
		Chi (X^2)=13,090				Chi (X^2)=14,226				Chi (X^2)=8,363				Chi (X^2)=14,724			

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Umur dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.21. terdapat kecenderungan PKL yang berumur < 30 tahun (1), 30 – 40 tahun (2) dan > 50 (4) tahun lokasi usahanya dengan jarak sedang tempat

keramaian sedangkan PKL dengan umur 41-50 tahun lokasi usahanya dekat tempat keramaian.

Keterkaitan antara umur dengan kedekatan lokasi ke tempat keramaian/kegiatan adalah mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan umur tertentu responden responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan dan pengalamannya maka keputusan jarak ke tempat keramaian perlu dipertimbangkan.

Hasil perhitungan didapat harga kuadrat Chi $X^2 = 13,090$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan umur berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian dari kelompok PKL dengan umur (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Umur dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dalam menganalisa hubungan antara umur dengan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal ini diambil dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan umur tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan fisik dan pengalamannya maka keputusan jarak dari lokasi ke tempat tinggal perlu dipertimbangkan.

Dari tabel V.21. terdapat kecenderungan PKL dengan umur (1), dan (2) lokasi usahanya pada jarak yang sedang dengan rumah tinggal, sedangkan PKL yang umur (3)

dan (4) lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya. Terdapat kecenderungan semakin tua PKL lokasi usahanya dekat dengan tempat tinggalnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 14,266$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan umur berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal dari PKL yang berumur (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Umur dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.21 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi., yaitu sama-sama dilokasinya mudah mencari angkutan umum.

Dalam menganalisa hubungan antara umur dengan kedekatan lokasi dengan kemudahan angkutan umum di lokasi dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan umur tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan fisik dan pengalamannya maka keputusan lokasi yang mudah angkutan umumnya perlu dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 8,363$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

(4). Hubungan Umur dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Dari tabel V.21 diketahui terdapat kecenderungan yang tidak sama antara PKL dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi .

Dalam menganalisa hubungan antara umur dengan banyaknya penjual sejenis di lokasi dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan umur tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan pengalamannya maka keputusan lokasi yang mudah angkutan umumnya perlu dipertimbangkan

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 14,724$ Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan umur berbeda dengan banyaknya penjual sejenis dilokasi, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap banyaknya lokasi sejenis dari kelompok PKL yang berumur (1), (2), (3) dan (4).

5.5.5. Analisis Hubungan Antara Pendidikan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.22.
HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN LOKASI

		Karakteristik Pilihan Lokasi PKL															
		Jarak Ke Tempat Keramaian				Jarak ke Tempat Tinggal				Kemudahan Angk. Umum				Banyaknya Penjual Sejenis			
Karakteristik PKL		1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot	1	2	3	Tot
Pendidikan	1	13	26	12	51	10	33	8	51	46	4	1	51	7	16	28	51
	2	10	15	9	34	9	8	7	43	25	9	0	34	9	9	16	34
	3	26	9	11	46	25	12	9	46	40	6	0	40	9	13	24	46
	4	1	2	1	4	2	1	1	4	4	0	0	4	0	0	4	4
	Tot	50	52	33	135	46	64	25	135	115	19	1	135	25	38	72	135
		Chi (X^2)=14,082				Chi (X^2)=18,246				Chi (X^2)=8,177				Chi (X^2)=5,830			

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Pendidikan PKL dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.22. terdapat kecenderungan PKL yang berpendidikan Tidak sekolah, tidak tamat SD, Tamat SD (1) dan berpendidikan tidak tamat SLTP, Tamat SLTP (2) serta yang berpendidikan SLTA keatas (4) jarak lokasi usahanya dalam kategori sedang dan PKL dengan pendidikan Tidak tamat SLTA, Tamat SLTA (3) lokasi usahanya dekat tempat keramaian.

Keterkaitan antara pendidikan dengan kedekatan lokasi ke tempat keramaian mempertimbangkan dan berasumsi bahwa tempat keramaian merupakan tempat yang banyak calon pembeli, sehingga minat PKL yang berpendidikan rendah ataupun tinggi lebih terdorong untuk memilih lokasi yang dekat dengan tempat keramaian/kegiatan kota.

Hasil perhitungan didapat harga kuadrat Chi $X^2 = 13,560$ Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan pendidikan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkatan lain, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian dari kelompok PKL dengan pendidikan (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Pendidikan PKL dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.22. terdapat kecenderungan PKL dengan umur (1), (2) dan (4) lokasi usahanya pada jarak yang sedang ke rumah tinggal, sedangkan PKL dengan pendidikan (3) lokasi usahanya sedekat mungkin ke rumah tinggalnya.

Dalam menganalisa hubungan antara pendidikan dengan kedekatan ke tempat tinggal adalah mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan memiliki pendidikan

tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuannya maka keputusan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal perlu dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 18,246$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 > X^2_{0,05}$, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan pendidikan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal. Dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal dari PKL berpendidikan (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Pendidikan PKL dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.22 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi yaitu berpandangan dilokasinya mudah mencari angkutan umum.

Kekerkaitan antara pendidikan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi dengan berasumsi bahwa dengan memiliki tingkat pendidikan tertentu responden mempunyai pola pikir menentukan lokasi yang mudah angkutan umumnya perlu dipertimbangkan. Mudahnya angkutan umum di lokasi mendorong minat PKL yang berpendidikan ataupun rendah untuk menempati lokasi sebagai tempat berjualan.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 8,177$. Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

(4). Hubungan Pendidikan PKL dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Dari tabel V.22 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi, yaitu menganggap bahwa dilokasinya penjual sejenis adalah banyak.

Keterkaitan pendidikan dengan banyaknya penjual sejenis dilokasi berasumsi bahwa dengan tingkat pendidikan tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuannya maka keputusan menentukan lokasi yang banyak penjual sejenis perlu dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga $X^2 = 6,830$ Untuk tabel Kuadrat Chi pada $df=6$ dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah $X^2=12,5916$, sehingga $X^2 < X^2_{0,05}$, sehingga tidak terdapat hubungan anatar dua variabel.

TABEL V.23.
REKAPITULASI HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Karakteristik PKL Karakteristik Pilihan Lokasi	Jenis Dagangan	Sarana Transportasi yang digunakan	Modal	Umur	Pendidikan
Kedekatan Lokasi Dengan Keramaian	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan
Kedekatan Lokasi Dengan Tempat Tinggal	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan
Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi	Tidak Signifikan	Signifikan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Banyaknya Penjual sejenis di lokasi	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Signifikan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Pada tabel V. 23 terlihat bahwa untuk berbagai karakteristik PKL yaitu jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal, umur dan pendidikan PKL terdapat hubungan yang signifikan dengan karakteristik pilihan lokasi yaitu kedekatan lokasi dengan tempat keramaian dan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal, sedang sarana transportasi yang digunakan dengan kemudahan angkutan umum menunjukkan hubungan yang signifikan, modal dengan serta banyaknya penjual sejenis menunjukkan hubungan yang signifikan.

5.6. Temuan-Temuan Studi

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- (1). PKL di Kota Semarang dapat dikategorikan menjadi dua kriteria yaitu PKL yang berijin dan PKL yang tidak berijin. Disamping itu PKL dapat digabungkan kedalam tiga jenis yaitu PKL makanan/minuman, PKL non makanan/minuman dan PKL yang bejualan jasa.
- (2). Karakteristik orang-orang yang bergerak di bidang usaha PKL umumnya berpendidikan rendah dan sedikit yang berpendidikan SLTA ke atas dan kebanyakan dalam usia kerja produktif. Pada umumnya mereka berstatus pendatang yang sebagian besar telah tinggal di kota Semarang lebih dari 5 tahun.

Faktor yang mempengaruhi mereka meninggalkan daerah asal yang menonjol adalah karena usaha pertanian tidak mencukupi kebutuhan, penghasilan kurang dan tidak ada pekerjaan di daerah asal. Sedangkan motivasi mereka bekerja di bidang usaha PKL adalah karena bidang usaha ini telah memberikan hasil yang cukup dan usaha inilah yang dapat mereka kerjakan karena sulit mencari pekerjaan yang sesuai

dengan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Kebanyakan mereka bekerja menjadi PKL merupakan pekerjaan tetap. Disamping itu usaha berdagang kaki lima yang ditekuni ternyata sesuai dengan yang diinginkan, meskipun bidang usaha ini menghadapi persaingan yang ketat. Namun demikian masih ada juga yang ingin pindah usaha.

- (3). Sektor informal PKL merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Dengan pendidikan dan ketrampilan yang terbatas serta modal yang kecil mereka mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri.
- (4). Dari berbagai aspek, peranan PKL terbukti potensial yaitu disamping dapat menciptakan lapangan kerja, mereka mampu memberikan pelayanan dengan harga murah, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat khususnya konsumen menengah kebawah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi.
- (5). Faktor yang dirasakan bermanfaat dengan adanya PKL bagi masyarakat (konsumen) adalah kemudahan memperoleh kebutuhan sehari-hari dan harga yang murah. Dari sini dapat diketahui bahwa ada hubungan timbal balik antara PKL dan pengguna (konsumen) dimana mereka saling membutuhkan atas keberadaannya. Namun demikian bagi masyarakat dampak negatif keberadaan PKL yang menonjol adalah lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak tertib. Faktor yang mendorong konsumen mengunjungi lokasi PKL adalah adanya kemudahan angkutan umum .
- (6). Baik PKL maupun pengguna (konsumen) sebagian besar mereka sependapat bahwa keberadaan PKL perlu ditata ulang. Namun terdapat kecenderungan PKL untuk

mempertahankan eksistensinya pada lokasi yang ada sekarang. Hal ini terlihat dari sebagian besar PKL memberi jawaban bahwa penataan ulang tersebut cukup ditertibkan dan dirapikan dengan lokasi tetap, bahkan pendapat ini juga mendapat dukungan dari konsumen. Baik PKL maupun konsumen cenderung menginginkan adanya pengelompokan menurut jenis dagangannya.

- (7). Dari kajian berbagai peraturan daerah, permasalahan PKL di kota Semarang melalui instrumen hukum telah membuktikan adanya penanganan dan antisipasi. Sebagai misal adanya rekomendasi dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1992 tentang Rencana Induk Kota mengenai penyediaan fasilitas untuk PKL sebagai komponen pendukung pada pusat-pusat kegiatan kota, meskipun belum tampak adanya perencanaan yang lebih spesifik.

Namun demikian adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL dan produk-produk Surat Keputusan Walikota yang berhubungan dengan masalah penataan dan pembinaan PKL serta dibentuknya instansi UPD-PPKL yang khusus menangani penataan dan pembinaan PKL menunjukkan bahwa Pemerintah Kota peduli terhadap permasalahan PKL.

Faktor yang mendorong ditetapkannya lokasi-lokasi yang diijinkan sebagai tempat usaha PKL oleh Pemerintah Kota Semarang hanya bersifat akomodasi dan bersifat sementara, dimana tidak didasarkan pada program yang terencana. Aspek keinginan untuk menarik retribusi lebih menonjol. Sifat akomodasi ini terlihat adanya 3 kali perubahan SK Walikota mengenai penetapan lokasi usaha PKL dengan penambahan lokasi baru. Penambahan lokasi yang diijinkan ini untuk mengakomodasi munculnya PKL pada lokasi tersebut.

BAB VI

K ESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang berhubungan dengan pilihan lokasi usaha dan analisa perhitungan statistik dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut ini.

Karakteristik lokasi usaha yang dipilih oleh PKL adalah :

(1). Kedekatan Lokasi Usaha ke Tempat Keramaian

- PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman menempati lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat keramaian
- PKL berumur lebih tua, pendidikan lebih tinggi dan bermodal kecil menempati lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat keramaian
- PKL dengan sarana transportasi yang dimiliki atau digunakan tidak tertikat dengan jarak dekat atau jauhnya dari lokasi usaha ke tempat keramaian.

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/sarana transportasi/modal/umur/pendidikan PKL dengan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian.

(2). Kedekatan Lokasi Usaha ke Tempat Tinggal

- PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman menempati lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat tinggal.
- PKL berumur lebih tua, pendidikan lebih tinggi dan bermodal kecil menempati lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat tinggal

- PKL dengan sarana transportasi yang dimiliki atau digunakan tidak tertikat dengan jarak dekat atau jauhnya dari lokasi usaha ke tempat tinggal.

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/ sarana transportasi/modal/umur/pendidikan dengan jarak lokasi usahanya ke tempat tinggal.

(3). Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi.

- Terdapat kecenderungan yang sama pada PKL baik berdasarkan jenis dagangan/modal/umur/pendidikan memilih lokasi usahanya yang mudah angkutan umumnya. Berarti PKL terikat dengan kemudahan angkutan umum di lokasi

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/modal/umur/pendidikan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi.

- PKL dengan sarana transportasi yang dimiliki atau digunakan tidak tertikat dengan mudah tidaknya angkutan umum di lokasi.

Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana transportasi dengan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi.

(4). Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

- Terdapat kecenderungan yang sama pada PKL baik berdasarkan jenis dagangan/sarana transportasi/umur/pendidikan memilih lokasi usahanya yang banyak penjual sejenis. Berarti PKL terikat, dalam arti lebih suka, mengelompok dengan penjual sejenis.

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/sarana transportasi/umur/pendidikan dengan banyaknya penjual sejenis di lokasi.

- PKL dengan modal yang lebih kecil menempati lokasi yang penjual sejenisnya sedikit.

Terdapat hubungan yang signifikan antara modal yang dimiliki dengan banyaknya penjual sejenis di lokasi

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha adalah faktor jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal, umur, pendidikan serta faktor kedekatan dengan tempat keramaian dan kedekatan dengan tempat tinggal.

6.2. Rekomendasi

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan baik dari segi keterbatasan literatur atau studi-studi yang menyangkut permasalahan sektor informal PKL yang menjadi rujukan maupun keterbatasan dalam penyajian data baik sekunder maupun primer, disamping kedalaman analisisnya. Untuk itu direkomendasikan adanya penelitian lanjutan antara lain :

- (1). Diperlukan penelitian lanjutan yang serupa yang lebih komprehensif dan holistik untuk memperluas jumlah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha sekaligus mencari titik temu keinginan antara tiga komponen yaitu PKL, Pemerintah Kota dan Konsumen (pengguna).
- (2). Penelitian menyangkut hubungan antara persebaran lokasi PKL dengan lokasi tempat tinggal. Hal ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa kebanyakan PKL bertempat tinggal di kampung-kampung kumuh yang tidak jauh dari lokasi usahanya.

Dalam kaitannya dengan para pengambil keputusan, khususnya Pemerintah Kota Semarang, orientasi pembinaan kepada PKL melalui stratifikasi menyangkut jenis dagangan, umur dan tingkat modal kiranya akan lebih membantu meningkatkan produktifitas PKL dan pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL. Disamping itu stratifikasi PKL menyangkut jarak lokasi usaha ke tempat keramaian dan ke tempat tinggal perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pemindahan lokasi (relokasi) atau penampungan-penampungan premanen.

LAMPIRAN-1
HASIL PERHITUNGAN KOMPUTER
UJI KUADRAT CHI

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku :

- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bintarto, R. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bryant, Coralie dan White, Louise.G. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES, Jakarta.
- Budihardjo, Eko dan Hardjohubojo, Sudanti. 1995. *Kota Berwawasan Lingkungan*. ALUMNI, Bandung
- Chadwick, George. 1987. *Model Of Urban And Regional Systems In Developing Countries Some Theoriesm Their Application In Physical Planning*. Pergamon Press, Chicago.
- Daldjoeni, P. 1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek*. ALUMNI, Bandung.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Firadausy, Carunia Mulya. 1995 (penyunting). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan*. Dewan Riset Nasional, Jakarta.
- Gilbert, Alan dan Gugler, Yosef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hidayat. 1987. *Peran Sektor Informal Dalam Struktur Perekonomian D.I Jogjakarta*. PPE-SDM, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Kostof, Spiro. 1991. *The City Shaped-Urban Patterns and Meanings Through History*. Thames and Hudson Ltd, London.
- Lipsey, Richard.G, et.al., 1997. *Pengantar Mikro Ekonomi (2)*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer., 1996 (penyunting). *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Kota*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Mantra, I.B. 1985. *Pengantar Studi Geografi*. Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Mills, E.S. 1972. *Urban Economics*. Foresmen and Company Glenview, Illinois.
- Nazir, Moh, .1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nelson, R.L. 1958. *The Selection Of Retail Location*. FE.Dodge. Co, New York.
- Pardoko, R.H., 1997. *Mobilitas Migrasi Dan Urbanisasi*. Angkasa, Bandung.

- Pass, Christopher dan Lowes, Byran,.1988. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Rachbini, Didiek dan Hamid, Abdul,.1994. *Ekonomi Informal Perkotaan LP3ES*, Jakarta.
- Ramli, Rusli. 1992.*Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Ind-Hill.Co, Jakarta
- Reksohadiprodo, Sukanto dan Karseno. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. BPFE, Yogyakarta.
- Richardson, Harry.W. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. LP-Fak.Ekonomi-Universitas Indonesia.Jakarta.
- Sangarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka-LP3ES, Jakarta.
- Sethuraman,S,V. 1981. *The Urban Informal Sektor In Developing Countries*. International Labour Office, Geneva.
- Suparmoko, M.1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan Teoritis*. BPFE, Yogyakarta.
- Swastha, Basu dan Irawan,.1986. *Menejemen Pemasaran Modern*.Liberty, Yogyakarta.
- Todaro, Michael.P,.1994. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga-Jilid-1*. Erlangga, Jakarta.
- Triandis, HC. 1971. *Attitude and Attitude Changes*. John Wley and Sons Inc, New York.
- Walizer, Michael .H and Wienir, Paul .L. 1993. *Researc Methods And Analysis Searching For Relationship*, alih bahasa oleh Arief Sukadi Sadiman. Erlangga, Jakarta.

Kelompok Journal/Majalah :

- An-Naf, Julissar, 1983. *Pedagang Kaki Lima dengan Berbagai Permasalahannya*. Dalam Journal Galang No.1 (1983), Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta
- Rahardjo, M.B. 1985. *Sektor Informal dan Ketenagakerjaan Indonesia*, dalam Majalah Analisa, No.3. (1985).
- Salim, Agus.2000. *PKL,Tampilan Sosial Budaya*. Dalam Wawasan, 29/6/2000.
- Surbakti, Ramelan,.1996. *Perebutan Ruang Di Perkotaan dan Pembengarannya*. dalam PRISMA No.9 (1996), LP3ES, Jakarta.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991.*Sektor Informal sebagai "Bumper" pada Masyarakat Kapitalis*. Dalam PRISMA. No.5. (1991).

Kelompok Makalah :

- Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Madya Bandung*. Bahan Seminar Menggali Potensi PKL Sebagai Unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah, April
- Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. *Pengembangan dan Pembinaan Kewiraswastaan Pada Pedagang Kaki Lima Di Kota Madya Bandung*. Bahan Seminar Menggali Potensi PKL Sebagai Unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah, April
- Fakultas Sosial Politik, Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bahan Seminar Menggali Potensi PKL Sebagai Unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah, April
- Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bahan Seminar Menggali Potensi PKL Sebagai Unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah, April
- Mantra, I.B. 1986. *Migrasi Sirkuler dan Kesempatan Kerja di Beberapa Kota Besar di Indonesia*. Makalah pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional ke IV, Jakarta, September
- Soetomo, Sugiono, 1990. *Ruang Semi Urban Dalam Proses Pemekaran Kota* Makalah dalam Seminar Peranan Kota Menengah dan Kecil dalam Pembangunan Daerah, Semarang.
- Soetomo, Sugiono. 1999. *Sektor Informal Dalam Struktur Keruangan Kota Semarang, Menuju Keterpaduan dan Keseragaman Kualitas Ruang-Ruang Perkotaan*, Makalah.
- Suharso. 1986, *Kaitan Desa Kota, Migrasi Sirkuler dan Sektor Informal di Perkotaan*. Makalah dalam Seminar Konpenrensi Nasional Pertumbuhan Penduduk, Urbanisasi dan Kebijakan Nasional Perkotaan, Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta, Oktober.

Kelompok Peraturan :

- , 1981. *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor.5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000*.
- , 1990. *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor.2 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000*.
- , 1986. *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No.3 Tahun 1986 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

- , 1993. *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor.63 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.*
- , 1998. *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan untuk Perdagangan dan Jasa.*
- , 1991. *Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 511.3/367/1991 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima*
- , 1994. *Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 511.2/160/1994 Tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*
- , 1999. *Laporan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. UPD-PKL Kota Semarang.*